



Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat

KAJIAN DAMPAK EKONOMI PADA KEBIJAKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 2025

Penulis:
Zaenal.Muttaqin

Kerjasama dengan
Lembaga Penelitian, Pendidikan
dan Penerangan Ekonomi dan
Sosial (LP3ES)

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB : Kajian Dampak Ekonomi Pada Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2025/Penulis,Zaenal.Muttaqin, Erwan Khalil, Nana Setiana, editor: Ikbar.N
EDISI : Cetakan Pertama. Desember 2025

PUBLIKASI : Depok. Pustaka LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), 2025

DESKRIPSI FISIK : xi 85 halaman, 23 cm

IDENTIFIKASI : ISBN 978-6347080-02-2

SUBJEK : PENDIDIKAN

LINK :



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Kajian Dampak Ekonomi Pada Kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan ini merupakan upaya penting dalam rangka memperkuat kualitas layanan pendidikan terutama terkait dengan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan peningkatan kesejahteraan guru.

Laporan Kajian ini memuat informasi tentang latar belakang penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi, desain penelitian termasuk instrumen penelitian, serta temuan awal dampak ekonomi kebijakan program revitalisasi satuan pendidikan dan program bantuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru Non ASN.

Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan staff Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan untuk kelancaran seluruh rangkaian kegiatan penelitian ini.

Akhirnya, kami berharap semoga kajian ini dapat memberikan manfaat nyata dalam memperkuat layanan pendidikan di Indonesia. Semoga ikhtiar bersama ini berkontribusi dalam meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan peningkatan kesejahteraan guru.

Jakarta, Desember 2025

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak ekonomi dari dua kebijakan strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025, yaitu: Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan, dan Program bantuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru Non ASN. Keduanya merupakan intervensi penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus menciptakan efek ekonomi berlapis (multiplier effect) di tingkat lokal hingga nasional.

Metodologi dan indikator dalam kajian ini dirancang untuk menangkap dampak ekonomi secara komprehensif dan terukur. Instrumen program revitalisasi dikembangkan untuk memetakan kapasitas dasar sekolah (SDM dan sarpras), mendokumentasikan proses penerimaan dan penggunaan bantuan revitalisasi sarpras serta mengidentifikasi dampak revitalisasi terhadap kualitas pendidikan, keterlibatan ekonomi lokal, dan operasional sekolah. Sedangkan instrumen program untuk meningkatkan tambahan penghasilan guru Non ASN dikembangkan untuk mengidentifikasi karakteristik sosial-ekonomi guru non-ASN penerima tambahan penghasilan, mengevaluasi proses pengajuan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan, mengukur dampak bantuan terhadap kesejahteraan keluarga, stabilitas ekonomi, dan produktivitas kerja guru serta menggali masukan dan harapan guru terhadap perbaikan kebijakan program ke depan. Sedangkan intrumen kualitatif dikembangkan untuk mengidentifikasi rekomendasi perbaikan agar kebijakan tersebut semakin optimal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan mutu pendidikan daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Kajian	1
1.3. Keluaran	2
1.4. Ruang Lingkup Kajian	2
1.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	2
1.6. Tim Pelaksana.....	2
BAB II KAJIAN PUSTAKA	3
2.1. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan	3
2.2. Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non ASN	6
2.3. Dampak Ekonomi Kebijakan Pendidikan.....	8
BAB III METODOLOGI	11
3.1. Pendekatan Penelitian	11
3.2. Populasi dan Sampel	11
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3.4. Teknik Analisa Data.....	13
3.5. Proses Pengumpulan Data	18
BAB IV TEMUAN DAN ANALISA.....	19
4.1. Dampak Ekonomi Program	19
4.2. Tata Kelola Program.....	52
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	55
5.1. Kesimpulan	56
5.2. Rekomendasi	57
Lampiran	58

DAFTAR TABEL

Table 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan.....	2
Table 2. Jenis Menu revitalisasi Sarana dan Prasarana Pada Satuan Pendidikan	4
Table 3. Sebaran Responden.....	11
Table 4. Jumlah (besaran) Tambahan Penghasilan yang diterima dalam Satu Tahun Terakhir	34

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.Pemahaman responden tentang tujuan program tambahan penghasilan guru	52
Grafik 2. Media/moda pengajuan penerima bantuan tambahan penghasilan	53
Grafik 3. Informasi resmi tentang waktu penyaluran bantuan tambahan penghasilan guru	54
Grafik 4. Sumber informasi lain penyaluran tambahan penghasilan guru.....	54
Grafik 5. Perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga setelah tambahan penghasilan guru	35
Grafik 6. Dampak tambahan penghasilan terhadap kebutuhan dasar guru	36
Grafik 7. Pemanfaatan dana bantuan pertama.....	40
Grafik 8. Pemanfaatan Dana Bantuan terakhir.....	41
Grafik 9. Peningkatan pengeluaran/belanja rumah tangga penerima bantuan	38
Grafik 10. Perilaku belanja setelah mendapat tambahan penghasilan.....	43
Grafik 11. Pengaruh tambahan penghasilan terhadap pembelian barang/jasa	44
Grafik 12. Perumahan pola menabung/investasi setelah tambahan penghasilan	45
Grafik 13. Manfaat tambahan penghasilan untuk kebutuhan mendesak.....	46
Grafik 14. Dampak tambahan penghasilan pada kebutuhan operasional guru	39
Grafik 15. Dampak tambahan penghasilan terhadap stabilitas ekonomi.....	46
Grafik 16.Dampak jika tambahan penghasilan guru dihentikan	47
Grafik 17. Perumahan frekuensi peminjaman uang setelah tambahan penghasilan guru	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peningkatan kualitas pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari dua aspek penting, yaitu ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran. Pada tahun 2025, pemerintah meluncurkan dua intervensi strategis besar: Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan dengan mekanisme swakelola yang melibatkan masyarakat, komite, dan sekolah secara langsung; serta Kebijakan Tunjangan Profesi (TPG) dan Tunjangan Khusus (TKG) bagi Guru Non-ASN yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik di wilayah perkotaan, pedesaan, hingga daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Program Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan 2025 merupakan intervensi strategis pemerintah dalam rangka memperkuat kualitas layanan pendidikan sekaligus mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC). Program ini juga selaras dengan Asta Cita ke-4 yang menekankan pentingnya penguatan pendidikan sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia berdaya saing. Pelaksanaan program dilakukan melalui mekanisme swakelola, di mana sekolah, komite, dan masyarakat menjadi aktor utama dalam perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan. Pendekatan swakelola diharapkan tidak hanya menghasilkan infrastruktur pendidikan yang lebih layak, tetapi juga menumbuhkan nilai gotong royong, meningkatkan partisipasi sosial, serta menggerakkan ekonomi lokal.

Program Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Non-ASN dibagi menjadi dua kategori yaitu Tunjangan Profesi (TPG): diberikan kepada guru Non-ASN yang aktif mengajar sesuai sertifikat pendidik yang dimiliki, memenuhi beban kerja guru, dan memperoleh penghasilan tetap dari pemerintah daerah atau yayasan. Tunjangan Khusus (TKG): ditujukan bagi guru Non-ASN yang bertugas di daerah khusus dengan kondisi kesulitan tinggi, seperti daerah terpencil, perbatasan, pulau kecil terluar, wilayah terdampak bencana, komunitas adat terpencil, atau daerah darurat sosial. Melalui program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru Non-ASN, namun juga memberi dampak ekonomi lebih luas. Dampak langsung berupa peningkatan daya beli untuk kebutuhan dasar (pangan, transportasi, pendidikan anak, dan kesehatan). Dampak tidak langsung melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang mendorong aktivitas ekonomi lokal, terutama di wilayah pedesaan dan daerah khusus penerima TKG.

Kedua program tersebut tidak hanya memiliki nilai sosial dan pendidikan, tetapi juga berpotensi menciptakan dampak ekonomi berlapis (multiplier effect) terhadap masyarakat, pelaku usaha lokal, serta perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menganalisis dampak ekonomi dari kedua program tersebut pada berbagai level (mikro, meso, dan makro).

1.2. Tujuan Kajian

Tujuan umum dari kajian yaitu menganalisis dampak ekonomi dari pelaksanaan Program Revitalisasi Sekolah dan TAMSIL terhadap masyarakat, pelaku usaha, serta perekonomian lokal dan nasional.

Sedangkan tujuan khusus yaitu Mengukur efek ekonomi langsung dan tidak langsung di tingkat Mikro (individu, rumah tangga, pelaku usaha kecil); Meso (daerah) dan Makro (nasional/agregasi)

1.3. Keluaran

1. Laporan riset lengkap berisi analisis dampak ekonomi pada program revitalisasi sarana dan tunjangan guru Non-ASN.
2. Dataset terstruktur (kuantitatif & kualitatif).

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Penelitian ini mencakup dua komponen utama:

Program Revitalisasi Sekolah. Rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas sanitasi yang rusak/kurang layak.

Program TAMSIL (Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN). Transfer fiskal langsung kepada guru non-ASN untuk meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga guru.

1.5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan kajian dilakukan selama 60 hari (14 Oktober 2025 s.d. 13 Desember 2025)

Table 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kontrak Riset								
2	Desain riset (Laporan Pendahuluan)								
3	Data Desain Program, dll								
4	Penyusunan Instrumen								
5	Finalisasi Instrumen Dikdasmen								
6	Uji Instrumen								
7	Pengumpulan Data Lapangan								
	- Online								
	- Wawancara Mendalam								
8	Pengolahan dan analisa data								
9	Penyusunan laporan Akhir (temuan awal dan Final)								

1.6. Tim Pelaksana

- Peneliti Utama / Team Leader (Data Analyst): S3 Ekonomi / Statistik
- Peneliti Bidang Pendidikan: S3 Pendidikan.
- Peneliti Bidang Psikologi Pendidikan: S3 Ekonomi Pembangunan.
- Research Manager: S2 Ilmu Sosial.
- Asisten Peneliti: S1 Ilmu Sosial.
- IT Support: S1 Teknologi Informasi
- Koordinator Pengumpulan Data: S1 Ilmu Sosial.
- Enumerator Survei: S1 Ekonomi / Sosial.
- Tim Administrasi & Keuangan: S1 Ekonomi / Sosial

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan

Program dikenal juga dengan istilah sebuah rencana atau sistem yang menjadi dasar tindakan dapat dilakukan (Merriam-Webster, 2021). Program berarti usaha yang terencana untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki. Program juga berarti rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Arikunto(2009) mengartikan program sebagai suatu kegiatan yang direncanakan secara cermat. Revitalisasi berarti kegiatan untuk membuat berdaya kembali (KBBI, 2016). Sedangkan Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Dalam Pasal 1, Perditjendikdasmen Nomor: M2400/C/HK.03.01/2025 dinyatakan bahwa Program Revitalisasi Satuan Pendidikan adalah program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas melalui rehabilitasi dan pembangunan prasarana, serta penyediaan sarana. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Satuan Pendidikan merupakan implementasi program hasil terbaik cepat (PHTC) membangun satuan pendidikan unggul dan revitalisasi satuan pendidikan (Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Revitalisasi).

Program Revitalisasi bertujuan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diberikan kepada Satuan Pendidikan. Program Revitalisasi berfokus pada ‘pemenuhan’ dan ‘peningkatan’ kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PDM). Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan dilakukan melalui pembangunan unit sekolah baru (USB) dan penyediaan sarana dan prasarana yang esensial. Sementara itu, kegiatan peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan dilakukan dengan cara merehabilitasi fasilitas ruang kelas dan ruang non kelas serta meningkatkan daya tampung murid. Pada tahun 2025, Program revitalisasi sarana prasarana satuan pendidikan dan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) bertujuan untuk: 1) meningkatkan akses layanan pendidikan dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah; dan 2) menyediakan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman.

Program Revitalisasi merupakan upaya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan secara umum bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua melalui penyediaan sarana dan prasarana esensial bagi pendidikan yang berkualitas, aman, dan nyaman.

Secara khusus pemberian Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan sebagai berikut:

- a) merehabilitasi ruang kelas dan ruang non kelas yang rusak;
- b) membangun prasarana pendidikan sesuai standar nasional pendidikan;
- c) meningkatkan daya tampung peserta didik; dan
- d) memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

Jenis menu revitalisasi yang diberikan kepada satuan pendidikan melalui Program Revitalisasi ditampilkan pada Tabel 1 berikut:

Table 2. Jenis Menu revitalisasi Sarana dan Prasarana Pada Satuan Pendidikan

No.	Jenis Menu Bantuan	PAUD	SD	SMP	SMA
1.	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	v	v	v	v
2.	Rehabilitasi toilet dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya.	v	v	v	v
3.	Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya	-	v	v	v
4.	Rehabilitasi ruang administrasi dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	v	v	v	v
5.	Rehabilitasi ruang ibadah dengan tingkat kerusakan minimal sedang.	-	-	v	v
6.	Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	v	v	v
7.	Rehabilitasi ruang laboratorium dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;	-	v	v	-
8.	Rehabilitasi ruang laboratorium IPA dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	-	-	v
9.	Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	-	-	v
10.	Rehabilitasi rumah dinas guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	v	v	v
11.	Rehabilitasi asrama siswa dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	-	-	v
12.	Rehabilitasi ruang bimbingan konseling (BK) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	-	-	v
13.	Rehabilitasi ruang OSIS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya.	-	-	-	v
14.	Rehabilitasi prasarana penunjang lainnya.	v	v	v	v
15.	Pembangunan ruang administrasi beserta perabotnya.	v	v	v	v
16.	Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya.	v	v	v	v
17.	Pembangunan toilet beserta sanitasinya.	v	v	v	v
18.	Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang;	v	-	-	-
19.	Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya	v	-	-	-
20.	Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya	-	v	v	v
21.	Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya.	-	v	v	v
22.	Pembangunan SATAP PAUD-SD	-	v	v	v
23.	Pembangunan rumah dinas guru beserta perabotnya pada daerah 3T dan kepulauan	-	v	v	v
24.	Pembangunan asrama siswa beserta perabotnya pada daerah 3T dan kepulauan	-	v	v	v

Sumber: Juknis Program Revitalisasi

Pelaksanaan revitalisasi sarana dan prasarana pada satuan pendidikan dilakukan berdasarkan lima prinsip, yaitu: a. efektif; b. efisien; c. akuntabel; d. partisipatif; dan e. kepentingan terbaik bagi anak.

Prinsip Efektif. Makna efektif yaitu membawa hasil atau berhasil guna. Prinsip efektif pelaksanaan revitalisasi mengindikasikan bahwa kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana layanan pendidikan berhasil guna, berdampak nyata baik dalam pemenuhan maupun peningkatan layanan pendidikan. Program Revitalisasi diharapkan berdampak nyata dalam meningkatkan akses layanan pendidikan dan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan untuk mewujudkan layanan pendidikan bermutu.

Prinsip Efisien. Arti efisien yaitu sangkil atau tepat, sesuai untuk menghasilkan sesuatu. Prinsip efisien pelaksanaan Program Revitalisasi berarti kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana layanan pendidikan dilaksanakan secara tepat sasaran dalam pemenuhan maupun peningkatan layanan pendidikan sehingga tujuan program tercapai.

Prinsip Akuntabel. Kandungan makna akuntabel yaitu ‘dapat dipertanggungjawabkan’. Prinsip akuntabel pelaksanaan Program Revitalisasi memiliki pengertian bahwa pelaksanaan kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana layanan pendidikan dalam pemenuhan maupun peningkatan layanan pendidikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan program tercapai. Pelaksanaan dan hasil Program Revitalisasi dievaluasi untuk menjamin standar pelaksanaan program terpenuhi. Pelaksana program membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara transparan baik biaya maupun pelaksanaan pekerjaan.

Prinsip Partisipatif. Kata partisipatif berarti bersifat partisipasi. Prinsip partisipatif pelaksanaan Program Revitalisasi berarti bahwa kegiatan revitalisasi sarana dan prasarana layanan pendidikan dalam pemenuhan maupun peningkatan layanan pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan satuan pendidikan (sekolah) sehingga tujuan program tercapai. Pemangku kepentingan satuan pendidikan seperti orang tua, komite, maupun warga sekitar diikutsertakan baik dalam pembangunan sarana dan prasarana baru, rehabilitasi maupun peningkatan sarana dan prasarana layanan pendidikan.

Prinsip Kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pelaksanaan Program Revitalisasi sarana dan prasarana layanan pendidikan dalam pemenuhan maupun peningkatan layanan pendidikan dilaksanakan dengan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (murid) sebagai pemangku kepentingan satuan pendidikan utama. Kepentingan terbaik anak merupakan standar dalam memenuhi dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Program Revitalisasi dikelola dengan cara mekanisme swakelola atau mandiri oleh satuan pendidikan. Mekanisme swakelola diartikan sebagai bentuk mekanisme pengelolaan revitalisasi secara mandiri oleh satuan pendidikan yang melibatkan peran serta masyarakat. Dalam melaksanakan revitalisasi pada tingkat satuan pendidikan berdasarkan Juknis Program Revitalisasi Kepala Satuan Pendidikan membentuk Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dapat berasal dari unsur:

- a) kepala satuan pendidikan;
- b) ASN untuk satuan pendidikan negeri/pegawai tetap pada satuan pendidikan swasta;
- c) komite sekolah/orang tua siswa;
- d) anggota masyarakat, diutamakan yang memiliki latar belakang konstruksi,

untuk memperkuat pengendalian revitalisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, P2SP merekrut tim teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Model pembangunan pendidikan dengan pelibatan peran serta masyarakat ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana pengelolaan pendidikan dilakukan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (otonomi sekolah). Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dapat berdampak pada peningkatan mutu layanan pendidikan, rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan sekolah, hingga terciptanya penguatan karakter sosial siswa dan masyarakat.

Dampak lain mekanisme swakelola Program Revitalisasi selain berdampak pada keberpihakan masyarakat kepada sekolah dan penguatan karakter sosial juga diharapkan berdampak secara ekonomi. Model mekanisme swakelola memberikan kesempatan kerja kepada warga sekitar sekolah. Satuan pendidikan dapat melibatkan warga sekitar sebagai tenaga kerja dalam pembangunan dan rehabilitasi. Mekanisme swakelola memungkinkan Satuan Pendidikan untuk membelanjakan dana bantuan program di toko-toko yang ada di sekitar sekolah atau daerah

setempat. Satuan Pendidikan diharapkan membeli kebutuhan bahan bangunan di toko-toko yang dimiliki warga sekitar. Selain pelibatan warga sekitar sebagai tenaga kerja atau pembelian bahan bangunan di toko sekitar Satuan Pendidikan, mekanisme swakelola memungkinkan warga untuk memenuhi kebutuhan konsums harian pekerja. Warung di sekitar Satuan Pendidikan menjadi hidup untuk berjualan. Dengan cara tersebut, pemberian dana Program Revitalisasi akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di sekitar Satuan Pendidikan.

2.2. Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non ASN

Penghasilan disebut juga pendapatan, perolehan berupa uang yang diterima (KBBI, 2016). Penghasilan umumnya diterima oleh pegawai atau pekerja sebagai konsekuensi dari tenaga, pikiran, maupun profesionalisme yang telah diberikannya kepada pihak lain yang memberikan pekerjaan. Jenis pendapatan (Ingg: *income*) yang diperoleh pegawai atau pekerja di antaranya seperti upah, gaji, honorarium, atau tunjangan. Komponen gaji karyawan berdasarkan SE Menaker RI No. SE/07/MEN/1990 disebutkan bahwa penghasilan karyawan dikelompokkan dalam tiga komponen yaitu: 1) upah pokok, 2) tunjangan tetap, dan 3) pendapatan non upah.

Pengaturan pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN; PP No. 5 Tahun 2024 tentang Gaji Pokok PNS; dan Perpres No. 79 Tahun 2025 tentang Kenaikan Gaji ASN. Peraturan lainnya yaitu Perpres No. 11 Tahun 2024 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Komponen pendapatan ASN terdiri dari: gaji pokok, tunjangan, dan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Pemberian TPP diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019. Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan faktor seperti beban kerja, lokasi, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan prestasi kerja, serta kemauan keuangan daerah.

Guru Non-ASN yaitu guru yang berstatus bukan PNS maupun PPPK yang bertugas di sebuah satuan pendidikan, baik PAUD, SD, SMP, SMA, maupun SMK. Dalam Persesjen Kemdikdasmen No. 7 Tahun 2025 disebutkan Pendidik Nonaparatur Sipil Negara adalah pendidik pada satuan pendidikan yang tidak berstatus ASN. Pendidik atau guru Non-ASN adalah guru honorer yang diangkat pemerintah pusat atau daerah untuk mengisi kekosongan guru di satuan pendidikan. Jumlah guru honorer yang bertugas di satuan pendidikan negeri sampai Tahun 2024 diperkirakan berjumlah 484.483 guru (berkas.dpr.go.id) dari sekitar 1,5 juta guru honorer di sekolah negeri dan swasta (beritasatu.com). Guru honorer memperoleh penghasilan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jumlah pendapatan guru honorer tidak menentu. Waktu penerimaan pendapatan pun tidak jelas. Besaran pendapatan guru honorer antara Rp 200.000 s.d. Rp 600.000 per bulan (<https://www.bantenraya.com>).

Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru merupakan kebijakan pemerintah (Kemdikdasmen RI). Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru diberikan baik kepada guru ASN maupun guru atau pendidik Non-ASN. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Persesjen Kemdikdasmen No. 4 Tahun 2025).

Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN diatur berdasarkan tiga Persesjen Kemdikdasmen, yaitu:

- 1) Persesjen Kemdikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) Persesjen Kemdikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Insentif Bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negera Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2025.

- 3) Persesjen Kemdikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Tahun Anggaran 2025.

Jenis Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN berdasarkan ketiga Persesjen Kemdikdasmen dalam bentuk: 1) bantuan Tunjangan Khusus Guru (TKG), 2) Bantuan Insentif, dan) Bantuan Subsidi Gaji/Upah Pendidik.

Tunjangan Khusus Guru Non-ASN

Tunjangan Khusus Guru Non-ASN adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam menjalankan tugas di daerah khusus. Daerah khusus yang dimaksud adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain dan/atau pulau-pulau kecil terluar.

Tunjangan Khusus diberikan kepada Guru Non ASN yang melaksanakan tugas di Daerah Khusus dan memenuhi kriteria penerima Tunjangan Khusus. Tunjangan Khusus diberikan kepada guru Non-ASN setiap bulan. Penyaluran Tunjangan Khusus dilakukan dengan prinsip: efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan manfaat.

Besaran Tunjangan Khusus Guru Non-ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/yayasan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda, yaitu: a. setara gaji pokok PNS sesuai dengan yang tertera pada surat keputusan inpassing atau penyetaraan setiap bulan bagi yang telah memiliki SK inpassing atau penyetaraan; dan b. sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan bagi yang belum memiliki SK inpassing atau penyetaraan.

Bantuan Insentif Pendidikan Non-ASN

Bantuan Insentif adalah bantuan pemerintah yang diberikan untuk menambah penghasilan di luar gaji/upah dan kesejahteraan pendidik nonaparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian Bantuan Insentif bertujuan untuk: a) menambah penghasilan di luar gaji/upah bagi pendidik Nonaparatur Sipil Negara (Non-ASN) yang belum memiliki sertifikat pendidik; dan b) mendorong peningkatan motivasi kerja dan kesejahteraan pendidik Non-ASN yang belum memiliki sertifikat pendidik.

Bantuan Insentif diberikan kepada pendidik atau guru yang berstatus Non-ASN, mencakup:

- a) pendidik pada Kelompok Bermain (KB)/Tempat Penitipan Anak (TPA);
- b) guru pada Taman Kanak-Kanak (TK);
- c) guru pada satuan pendidikan dasar;
- d) guru pada satuan pendidikan menengah; dan
- e) guru pada satuan pendidikan khusus.

Bantuan Insentif yang diberikan kepada pendidik atau guru berupa uang. Besaran bantuan insentif dengan total sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk Pendidik pada KB/TPA yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan; dan b. total sebesar Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) untuk Guru pada TK, jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan.

Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah

Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal adalah bantuan pemerintah yang diberikan kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini nonformal untuk kemaslahatan penghasilan. Layanan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan pendidikan anak usia dini yang sejenis.

Pemberian Subsidi Gaji/Upah bagi Pendidik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dengan tujuan memberikan kemaslahatan terhadap penghasilan Pendidik Satuan PAUD Nonformal. Bantuan diberikan dalam bentuk uang. Jumlah bantuan Subsidi Gaji/Upah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap penerima Bantuan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada guru Non-ASN baik dalam bentuk Tunjangan Khusus Guru, Bantuan Insentif, maupun Bantuan Pemerintah berupa subsidi gaji/upah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik/guru dan meningkatkan kemaslahatan guru. Peningkatan kesejahteraan dan kemaslahatan guru agar berdampak dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik di satuan pendidikan. Guru termotivasi menjalankan tugas-tugasnya sebagai pendidik lebih khusus bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, terluar, dan terdepan.

Pemberian tambahan penghasilan guru Non-ASN secara ekonomi diharapkan berdampak dalam peningkatan daya beli guru, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta memiliki kemampuan menabung. Secara makro kebijakan Program Pemberian Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN dapat menghidupkan kegiatan ekonomi di daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

2.3. Dampak Ekonomi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan revitalisasi sekolah dan pemberian subsidi bagi guru non-ASN memberikan implikasi ekonomi yang saling melengkapi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Revitalisasi sekolah melalui pembangunan serta peningkatan fasilitas pendidikan mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap material konstruksi, jasa tenaga kerja, dan rantai pasok pendukung. Belanja modal pemerintah pada sektor pendidikan memunculkan efek pengganda (*multiplier effect*) yang memperluas perputaran uang di daerah, terutama ketika penggeraan proyek melibatkan kontraktor dan pemasok setempat. Pada saat yang sama, subsidi bagi guru non-ASN meningkatkan pendapatan rumah tangga tenaga pengajar, yang selanjutnya memperkuat daya beli masyarakat serta konsumsi domestik. Kondisi ini tidak hanya berkaitan pada kesejahteraan guru, tetapi juga memperkuat stabilitas tenaga pengajar di sekolah, yang merupakan prasyarat penting bagi peningkatan mutu pembelajaran.

Dalam jangka menengah, keterkaitan antara infrastruktur pendidikan yang membaik dan peningkatan kesejahteraan guru membentuk fondasi yang lebih kuat bagi peningkatan kualitas proses pembelajaran. Ketersediaan ruang kelas yang layak, laboratorium, fasilitas teknologi informasi, dan sarana pendukung lainnya memungkinkan sekolah menerapkan kurikulum secara lebih efektif, sementara jaminan pendapatan bagi guru non-ASN berkontribusi pada motivasi mengajar dan mengurangi tingkat pergantian tenaga pendidik. Kedua kebijakan tersebut memperbaiki lingkungan kerja pendidikan secara simultan, sehingga berpotensi meningkatkan capaian literasi, numerasi, dan kesiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi atau memasuki dunia kerja.

Dalam jangka panjang, kombinasi revitalisasi sekolah dan subsidi guru berperan strategis dalam memperkuat modal manusia (*human capital*) yang menjadi determinan utama pertumbuhan ekonomi nasional. Perbaikan kualitas pendidikan akan mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja di masa depan, yang pada gilirannya mempercepat transformasi ekonomi menuju pertumbuhan berkelanjutan. Apabila alokasi revitalisasi dan subsidi diprioritaskan pada daerah tertinggal dan kawasan dengan kesenjangan akses pendidikan yang tinggi, kebijakan ini juga berpotensi mempersempit ketimpangan regional serta memperluas inklusi pembangunan. Dengan demikian, manfaat ekonominya tidak hanya bersifat langsung melalui perputaran ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, tetapi juga bersifat jangka panjang melalui peningkatan kompetensi dan daya saing sumber daya manusia Indonesia.

2.3.1. Dampak Ekonomi Revitalisasi Satuan Pendidikan

Revitalisasi sekolah dirancang sebagai *education-based fiscal stimulus* yang memberikan efek langsung dan berkelanjutan terhadap perekonomian. Belanja publik dalam sektor konstruksi dan jasa pendukung pendidikan memicu pemulihan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap tenaga kerja dan material bangunan sebagaimana diidentifikasi oleh Center for Equitable Growth (2020). Selain itu, kegiatan pembangunan turut menumbuhkan lapangan kerja sementara maupun permanen bagi masyarakat sekitar sekolah sebagaimana disampaikan oleh Watson dan Tervala (2022). Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sarana pendidikan memperkuat kualitas sumber daya manusia yang kemudian menjadi basis produktivitas dan daya saing ekonomi daerah, sejalan dengan temuan Hanushek dan Woessmann (2021) serta Simmons (2024). Dengan demikian, revitalisasi sekolah merupakan investasi ekonomi jangka pendek dan jangka panjang sekaligus.

Pada tingkat mikro, revitalisasi sekolah secara langsung memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat sekitar, pelaku usaha kecil, serta rumah tangga pekerja. Proses pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan membuka peluang kerja bagi pekerja harian, tukang bangunan, penyedia jasa transportasi, dan pemasok bahan bangunan lokal. Hal ini menghasilkan peningkatan pendapatan rumah tangga yang terlibat dalam proyek serta menciptakan dorongan konsumsi baru melalui efek pengganda pada perekonomian lokal. Secara bersamaan, UMKM yang menyediakan bahan bangunan, makanan, jasa angkutan, dan alat tulis mengalami peningkatan permintaan selama masa revitalisasi, dan setelah proses selesai, aktivitas sekolah yang lebih tinggi meningkatkan kebutuhan barang dan jasa secara berkelanjutan. Dalam horizon jangka menengah, perbaikan sarana pembelajaran meningkatkan kualitas pendidikan siswa dan kinerja guru, menghasilkan sumber daya manusia dengan kompetensi yang lebih kuat dan kesiapan kerja yang lebih baik, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan produktivitas ekonomi.

Pada level meso atau wilayah, revitalisasi sekolah berfungsi sebagai stimulus fiskal terdesentralisasi yang memperkuat dinamika ekonomi daerah. Peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan memperluas aktivitas sektor konstruksi, manufaktur kecil, serta perdagangan lokal sehingga perekonomian regional menjadi lebih hidup dan likuid. Perputaran uang dari proyek revitalisasi sekolah meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada saat yang sama memperluas basis pajak daerah melalui retribusi, PPh jasa konstruksi, dan PPN daerah, sehingga kapasitas fiskal daerah meningkat dan ruang pembiayaan pembangunan lain menjadi lebih besar. Mengacu pada estimasi multiplier fiskal daerah sebesar 1,2 hingga 1,8 sebagaimana dicatat ADB (2022), setiap satu rupiah belanja revitalisasi berpotensi menghasilkan tambahan output ekonomi antara Rp1,2 hingga Rp1,8. Daerah dengan tingkat keterlibatan UMKM yang tinggi cenderung mengalami multiplier lebih besar, sejalan dengan pandangan Moretti (2010) mengenai keterkaitan belanja publik dan penguatan ekonomi lokal.

Secara nasional, dampak ekonomi program revitalisasi sekolah merupakan agregasi dari efek meso yang berakumulasi hingga tingkat makro. Belanja pemerintah yang tersebar secara luas di sektor pendidikan mendorong peningkatan permintaan domestik terhadap barang dan jasa, memperluas konsumsi masyarakat, dan memperkuat kontribusi belanja modal pemerintah terhadap pertumbuhan PDB. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sarana belajar memperkuat kompetensi sumber daya manusia yang menjadi determinan utama produktivitas tenaga kerja nasional. Revitalisasi sekolah menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi nasional yang strategis melalui perpaduan dampak fiskal jangka pendek dan peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

2.3.2. Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non ASN

Dengan pendekatan *fiscal transfer* berbasis tenaga kerja publik (*public wage transfer*), TAMSIL menyalurkan dana langsung kepada rumah tangga guru Non-ASN untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial. Secara ekonomi, TAMSIL memiliki tiga tujuan utama. Pertama, meningkatkan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga guru Non-ASN melalui injeksi pendapatan langsung, sebagaimana ditegaskan dalam laporan World Bank (2022), Bappenas (2023), ADB (2022), dan IMF (2021). Kedua, memperkuat aktivitas ekonomi lokal melalui efek pengganda konsumsi, karena sebagian besar pendapatan tambahan masuk ke sektor ritel dan jasa domestik. Ketiga, menjaga stabilitas tenaga kerja di sektor pendidikan, khususnya di wilayah dengan disparitas ekonomi tinggi, sehingga layanan pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pada tingkat mikro, dampak ekonomi Program TAMSIL meningkatkan pendapatan disposabel rumah tangga, yang umumnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Peningkatan konsumsi rumah tangga akan berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga, perbaikan kesejahteraan, serta penguatan retensi tenaga pendidik Non-ASN. Kajian OECD (2020) dan Bappenas (2022) menunjukkan bahwa tambahan pendapatan reguler juga menurunkan risiko rumah tangga memasuki jeratan hutang, sekaligus meningkatkan ketahanan finansial. Di tingkat produktivitas, kondisi finansial yang lebih stabil memungkinkan guru lebih fokus pada pengajaran dan pengembangan kompetensi profesional. Peningkatan daya beli guru turut mempercepat perputaran ekonomi sektor informal di lingkungan sekolah seperti warung makan, toko serbaguna, transportasi lokal, dan penyedia jasa lainnya, memperkuat struktur ekonomi mikro daerah.

Pada level meso (regional), TAMSIL berfungsi sebagai stabilisator ekonomi lokal. Arus konsumsi rumah tangga menjadi terjaga sehingga mencegah kontraksi aktivitas ekonomi, terutama pada periode ketidakpastian ekonomi. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa lokal mendorong penguatan struktur ekonomi berbasis permintaan (*demand-side economy*). Selain itu, aktivitas konsumsi yang meningkat berpotensi berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah, baik melalui retribusi usaha, pajak konsumsi, maupun pajak properti, sehingga memperluas kapasitas fiskal daerah tanpa menaikkan beban pajak.

Dampak program pada level makro merupakan hasil agregasi dari dinamika ekonomi mikro dan meso. Distribusi pendapatan kepada guru Non-ASN di berbagai kabupaten/kota membantu menurunkan ketimpangan antar-wilayah, karena transfer fiskal efektif mengalir ke wilayah berpendapatan rendah dan ke daerah dengan kapasitas fiskal terbatas. Dengan sebagian besar dana terserap oleh konsumsi domestik, TAMSIL bertindak sebagai stimulus ekonomi dengan multiplier yang diperkirakan berada pada kisaran 1,2–1,6, sebagaimana disampaikan oleh Federal Reserve Bank of Richmond (2025), Moretti (2010), dan De Ridder (2020). Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu rupiah yang disalurkan pemerintah melalui program TAMSIL menghasilkan nilai tambah ekonomi yang lebih besar dari satu rupiah dalam perekonomian nasional.

BAB III METODOLOGI

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yaitu kuantitatif dan kualitatif, dengan sumber data yaitu Data Primer yang bersumber dari Hasil survei lapangan dan wawancara mendalam. Data Sekunder yang bersumber dari publikasi kementerian dan data BPS. Data analisis Kuantitatif dikumpulkan melalui Survei terstruktur terhadap kepala sekolah, guru, rumah tangga, UMKM, dan kontraktor untuk mengukur indikator ekonomi utama. Sedangkan data analisis Kualitatif dikumpulkan melalui Wawancara mendalam dan studi kasus untuk menangkap dinamika sosial-ekonomi dan persepsi pelaku program.

Unit Analisis dalam penelitian ini mencakup: Sekolah penerima program revitalisasi, Guru non-ASN penerima TAMSIL, Rumah tangga sekitar sekolah, Pelaku UMKM/pedagang lokal, Pekerja/buruh proyek dan suplier bahan bangunan, Kontraktor atau vendor pelaksana

Teknik Analisis data yang digunakan yaitu Analisis deskriptif (sebelum dan sesudah intervensi program); Analisis multiplier ekonomi lokal (estimasi pengganda fiskal dan konsumsi); dan analisis regresi sederhana untuk hubungan antara variabel input (dana revitalisasi/TAMSIL) dan output (pendapatan, konsumsi, produktivitas).

3.2. Populasi dan Sampel

Table 3. Sebaran Responden

No	Provinsi	Kabupaten	Sekolah	Guru Non ASN
1	Prov. Aceh	Aceh Utara	4	12
2	Prov. Jawa Barat	Bogor	4	9
		Kota Bogor		4
3	Prov. Jawa Tengah	Blora	4	8
		Pati		8
4	Prov. Jawa Timur	Tuban	4	7
		Ngawi		2
5	Prov. Kalimantan Barat	Kubu Raya	4	11
6	Prov. Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin	4	8
		Kota Banjar Baru		8
7	Prov. Kalimantan Timur	Kota Balikpapan	4	6
8	Prov. Lampung	Kab. Lampung Selatan		7
		Bandar Lampung	4	3
9	Prov. Maluku	Kota Ambon	4	8
10	Prov. Nusa Tenggara Timur	Kupang	4	11
11	Prov. Papua	Jayapura	4	5
		Kota Jayapura		4

12	Prov. Sulawesi Selatan	Maros	4	4
		Goa		2
13	Prov. Sulawesi Tenggara	Konawe selatan	4	9
14	Prov. Sumatera Selatan	Ogan Komering Ilir	4	12
15	Prov. Sumatera Utara	Kota Medan	4	4
		Deli Serdang		3
16	Prov. Papua Barat	Kab. Manokwari	4	16
17	Prov. Papua Selatan	Kab. Merauke	4	12
18	Prov. Banten	Kab. Tangerang	4	9
		Kota Tangerang Selatan		2
19	Prov. Papua Barat Daya	Kab. Sorong	4	9
20	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka	4	9
21	Prov. Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	4	9
22	Prov. Kalimantan Utara	Kota Tarakan	4	7
23	Prov. Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	4	4
24	Yogyakarta	Kab. Sleman	4	11
25	Prov. Riau	Kab. Bengkalis	4	9
26	Prov. Jambi	Kota Jambi	4	4
27	Prov. Gorontalo	Kab. Gorontalo	4	4
		Kota Gorontalo		3
28	Prov. Sulawesi Tengah	Kota Palu	4	4
29	Prov. Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	4	4
		Kab. Lombok Tengah		3
30	Prov. Sumatera Barat	Kab. Agam	4	3
		Kota Padang		2
			120	279

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kombinasi data primer dan data sekunder guna memperoleh informasi yang komprehensif, valid, dan reliabel. Data primer dikumpulkan melalui survei terstruktur terhadap responden yang terdiri atas pemangku kepentingan pendidikan, termasuk kepala sekolah, guru ASN dan Non-ASN, serta pelaku ekonomi lokal di sekitar sekolah dan yang terlibat dengan program ini. Instrumen survei berbentuk kuesioner untuk mengetahui persepsi, kondisi sosial-ekonomi, dan dampak program kebijakan pendidikan terhadap kesejahteraan rumah tangga dan aktivitas ekonomi lokal. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan informan kunci seperti pejabat dinas pendidikan kabupaten/kota dan pihak sekolah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan Revitalisasi Sekolah dan Program TAMSIL. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kinerja Kementerian Pendidikan, data statistik BPS, dan publikasi penelitian terdahulu yang relevan.

3.4. Teknik Analisa Data

Data dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara terintegrasi. Analisis kuantitatif dilakukan untuk menguji dampak ekonomi kebijakan pendidikan terhadap indikator sosial-ekonomi. Model ekonometrika regresi digunakan untuk menganalisis hubungan antara Revitalisasi Sekolah dan Program TAMSIL terhadap ekonomi daerah. Analisis statistik deskriptif juga digunakan untuk memetakan karakteristik responden dan dinamika sosial-ekonomi. Sementara itu, data kualitatif dari wawancara dianalisis dengan metode *thematic content analysis* untuk mengidentifikasi pola dan isu implementasi kebijakan secara empiris di lapangan. Integrasi kedua pendekatan analisis ini memastikan bahwa hasil penelitian memiliki kekuatan inferensial sekaligus kedalaman kontekstual dalam memahami efektivitas kebijakan.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan ekonometrika berbasis model regresi berganda untuk mengukur dua intervensi kebijakan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Konstruksi model ekonometrika ini memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menawarkan bukti kausal empiris mengenai efektivitas kebijakan pendidikan sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah. Analisis dibangun melalui model yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kebijakan.

a. Model Revitalisasi Sekolah dan Ekonomi Daerah

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa investasi pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan kinerja ekonomi. Teori Human Capital (Schultz, 1961; Becker, 1964) menegaskan bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris juga menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, termasuk sarana dan prasarana, berperan penting dalam meningkatkan output ekonomi wilayah (Barro, 1997; Hanushek & Woessmann, 2015). Sejalan dengan itu, Bank Dunia menekankan bahwa modernisasi fasilitas pendidikan memperkuat kesiapan tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah (World Bank, 2020). Analisis hubungan antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB dalam studi ini sejalan dengan kerangka teoretis dan empiris yang telah mapan.

Analisis ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linier berganda untuk mengkaji hubungan antara alokasi dana revitalisasi sekolah dan kinerja ekonomi daerah di Indonesia. Unit analisis adalah seluruh provinsi di Indonesia, sehingga data yang digunakan bersifat lintas provinsi (*cross-section*) pada satu periode pengamatan. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap variasi antarwilayah dalam satu tahun yang sama dan menggambarkan pola hubungan statistik antarvariabel utama. Penggunaan data satu tahun dilakukan secara sengaja dan metodologis, mengingat program revitalisasi sekolah merupakan kebijakan yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025.

Variabel dependen dalam analisis ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang diukur menggunakan PDRB Triwulan III Tahun 2025 sebagai proksi tingkat aktivitas ekonomi daerah. Variabel independen utama adalah dana revitalisasi sekolah, yang diukur berdasarkan total alokasi anggaran revitalisasi sekolah yang digelontorkan sepanjang tahun 2025 pada masing-masing provinsi. Untuk mengontrol perbedaan kondisi sosial ekonomi dasar antarprovinsi, analisis ini memasukkan tingkat kemiskinan (Semester I Tahun 2025) dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) (Agustus 2025) sebagai variabel kontrol.

Untuk mengatasi perbedaan skala data dan meningkatkan stabilitas estimasi, variabel yang diukur dalam nilai moneter, yaitu PDRB dan dana revitalisasi sekolah, ditransformasikan ke dalam logaritma natural. Sementara itu, variabel kemiskinan dan pengangguran tetap digunakan dalam bentuk persentase agar interpretasi hasil tetap langsung dan relevan bagi kebijakan. Dengan spesifikasi ini, koefisien dana revitalisasi sekolah dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, sedangkan koefisien kemiskinan dan pengangguran mencerminkan perubahan PDRB akibat perubahan satu poin persentase pada masing-masing indikator sosial.

Estimasi dilakukan menggunakan metode Ordinary Least Squares (OLS). Analisis disusun secara bertahap melalui beberapa spesifikasi model, dimulai dari model dasar yang hanya memasukkan dana revitalisasi sekolah, kemudian diperluas dengan menambahkan variabel kontrol kemiskinan dan pengangguran. Pendekatan bertahap ini digunakan untuk menilai konsistensi hubungan antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB setelah mempertimbangkan faktor sosial ekonomi utama. Terdapat tiga model bertahap. Penyajian model secara bertahap memungkinkan penilaian apakah hubungan antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB stabil atau sensitif terhadap penambahan variabel kontrol.

Perlu ditekankan bahwa karena data yang digunakan bersifat cross-section satu tahun, analisis ini tidak bertujuan untuk mengidentifikasi dana revitalisasi sekolah terhadap PDRB. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh diinterpretasikan sebagai hubungan statistik lintas wilayah pada tahun pengamatan. Meskipun demikian, temuan ini tetap memberikan informasi empiris yang relevan untuk memahami keterkaitan antara belanja revitalisasi pendidikan dan kinerja ekonomi daerah, serta dapat menjadi dasar awal bagi evaluasi kebijakan yang lebih mendalam menggunakan data panel atau pendekatan kausal pada penelitian selanjutnya.

1. Model (1): Hubungan Dasar

$$\ln(PDRB_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(REVITALISASI_i) + \varepsilon_i$$

Model 1 mengestimasi hubungan antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB tanpa memasukkan variabel kontrol. Model ini bertujuan untuk menangkap hubungan awal (*baseline association*) antara alokasi dana revitalisasi dan kinerja ekonomi provinsi. Hasil pada model ini menunjukkan bagaimana variasi PDRB antarprovinsi berkaitan dengan perbedaan alokasi dana revitalisasi sekolah sebelum mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi lainnya.

2. Model (2): Model dengan Kontrol Kemiskinan

$$\ln(PDRB_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(REVITALISASI_i) + \beta_2 KEMISKINAN + \varepsilon_i$$

Model 2 menambahkan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol. Penambahan ini dimaksudkan untuk mengendalikan perbedaan struktur sosial ekonomi antarprovinsi yang dapat memengaruhi PDRB sekaligus berpotensi berkorelasi dengan besaran dana revitalisasi. Model 2 mengevaluasi apakah hubungan antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB tetap konsisten setelah mempertimbangkan tingkat kemiskinan daerah.

3. Model (3): Model dengan Kontrol Kemiskinan dan Pengangguran

$$\ln(PDRB_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(REVITALISASI_i) + \beta_2 KEMISKINAN_i + \beta_3 TPT_i + \varepsilon_i$$

Model 3 merupakan spesifikasi yang lebih lengkap dengan memasukkan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai variabel kontrol. Model ini bertujuan untuk mengendalikan kondisi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan dasar masyarakat secara simultan. Estimasi pada model ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan dana revitalisasi sekolah dan PDRB setelah memperhitungkan perbedaan utama dalam kondisi sosial ekonomi antarprovinsi.

b. Model Revitalisasi dan Pemenuhan Kebutuhan Sekolah

Model selanjutnya, menggambarkan kaitan dana revitalisasi terhadap kebutuhan sekolah yang merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas intervensi pemerintah di sektor pendidikan. Secara empiris, peningkatan alokasi dana revitalisasi seharusnya berbanding lurus dengan semakin terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, baik dalam bentuk perbaikan ruang kelas, laboratorium, sanitasi, media pembelajaran, maupun penguatan digitalisasi sekolah. Ketika dana yang diterima sekolah mampu menutup kesenjangan kebutuhan yang sebelumnya belum terpenuhi, maka kebijakan revitalisasi terbukti bekerja

secara efektif dalam meningkatkan kapasitas layanan pendidikan. Sebaliknya, apabila kebutuhan sekolah masih tinggi meskipun alokasi dana telah disalurkan, hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penyaluran belum tepat sasaran atau besaran bantuan belum sebanding dengan kondisi riil sekolah. Melalui model ini, pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi kecocokan antara besaran anggaran, profil kebutuhan, serta capaian kinerja sekolah, sehingga ke depan alokasi anggaran pendidikan dapat dirancang lebih adaptif, berkeadilan, dan berbasis kebutuhan nasional.

$$\ln(\text{KEBUTUHAN})_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{NILAI REVITALISASI})_i + \varepsilon_i$$

Dalam model ini, kebutuhan sekolah berperan sebagai variabel dependen yang merepresentasikan tingkat kelayakan fasilitas pendidikan yang harus dipenuhi agar sekolah mampu menjalankan proses pembelajaran secara optimal. Kebutuhan tersebut mencakup aspek fisik, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, perangkat TIK, keamanan bangunan, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, dana revitalisasi ditempatkan sebagai variabel independen yang berfungsi sebagai input kebijakan yang secara teoritis diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan tersebut. Variabel ini diukur dari besaran anggaran revitalisasi yang diterima sekolah dalam satu tahun anggaran, baik secara total maupun relatif terhadap jumlah siswa dan kondisi awal infrastruktur.

Model ketiga, memperlihatkan kaitan revitalisasi terhadap perekonomian lokal. Model ketiga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana kegiatan revitalisasi sekolah berkaitan dengan ekonomi langsung pada wilayah setempat, khususnya melalui penggunaan material lokal. Secara empiris, hubungan tersebut diuji melalui regresi linier antara logaritma nilai kontrak revitalisasi sekolah (LKONTRAK) dan penggunaan material lokal (MATERIALLOKAL).

$$\text{MATERIALLOKAL}_i = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{KONTRAK})_i + \varepsilon_i$$

MATERIALLOKAL merepresentasikan persentase atau proporsi material konstruksi yang berasal dari pemasok lokal di wilayah proyek, sedangkan $\ln(\text{KONTRAK})$ adalah logaritma natural dari nilai kontrak revitalisasi sekolah. Penggunaan bentuk logaritmik pada variabel independen mencerminkan Setiap perubahan persentase pada nilai kontrak diperkirakan memengaruhi perubahan persentase pada pemanfaatan material lokal. Jika revitalisasi sekolah yang lebih besar terbukti mendorong penggunaan material lokal, maka kebijakan anggaran pendidikan tidak hanya memperbaiki infrastruktur sekolah, tetapi juga memperkuat rantai pasok domestik, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal seperti toko bangunan, pemasok semen, kayu, baja, maupun jasa konstruksi skala kecil. Model ini juga memungkinkan pemerintah menilai efektivitas kebijakan revitalisasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah, tidak hanya sebagai program perbaikan fisik. Ketika estimasi menunjukkan koefisien yang signifikan dan bernilai positif, maka revitalisasi sekolah dapat diposisikan sebagai kebijakan fiskal yang memiliki *multiplier effect* terhadap perekonomian lokal.

c. Model Subsidi dan Ekonomi Daerah

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa subsidi untuk guru berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kinerja ekonomi daerah. Teori Human Capital (Schultz, 1961; Becker, 1964) menegaskan bahwa peningkatan kualitas guru melalui tunjangan dan insentif meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Bukti empiris menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk guru, termasuk tunjangan profesi dan subsidi khusus, berperan penting dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan, yang secara tidak langsung berdampak pada output ekonomi wilayah (Hanushek & Woessmann, 2015; Dinasti, 2021). Sejalan dengan itu, Bank Dunia menekankan bahwa peningkatan kesejahteraan guru

melalui dukungan finansial memperkuat kualitas pembelajaran dan membantu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah (World Bank, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda untuk mengevaluasi hubungan antara dana subsidi guru dan kinerja ekonomi daerah di Indonesia. Unit analisis terdiri dari seluruh provinsi, sehingga data yang digunakan bersifat lintas provinsi (cross-section) pada satu periode pengamatan Tahun 2025. Variabel dependen adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan III 2025, sedangkan variabel independen utama adalah dana subsidi guru. Untuk mengendalikan perbedaan kondisi sosial ekonomi antarprovinsi, variabel kontrol yang digunakan mencakup tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Variabel moneter (PDRB dan dana subsidi guru) ditransformasikan ke dalam logaritma natural agar koefisien dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, sedangkan variabel kontrol tetap dalam bentuk persentase agar interpretasi hasil langsung relevan bagi kebijakan. Data yang digunakan bersifat cross-section satu tahun, dengan demikian analisis ini menunjukkan hubungan statistik lintas wilayah, bukan efek kausal. Meskipun demikian, temuan ini tetap memberikan informasi empiris penting tentang keterkaitan antara alokasi subsidi guru dan kinerja ekonomi daerah, serta dapat menjadi dasar evaluasi kebijakan pendidikan lebih lanjut.

1. Model (1): Hubungan Dasar

$$\ln(PDRB_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(SUBSIDI_i) + \varepsilon_i$$

Model ini mengevaluasi hubungan awal antara dana subsidi guru dan PDRB tanpa memasukkan variabel kontrol. Model 1 bertujuan menangkap asosiasi dasar (baseline association) antara alokasi dana subsidi dan kinerja ekonomi antarprovinsi.

2. Model (2): Model dengan Kontrol Kemiskinan

$$\ln(PDRB_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(SUBSIDI_i) + \beta_2 KEMISKINAN + \varepsilon_i$$

Model ini menambahkan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan perbedaan struktur sosial ekonomi yang dapat memengaruhi PDRB sekaligus berpotensi berkorelasi dengan besaran dana subsidi guru. Dengan demikian, model 2 menilai apakah hubungan antara subsidi guru dan PDRB tetap konsisten setelah mempertimbangkan kondisi sosial dasar.

3. Model (3): Model dengan Kontrol Kemiskinan dan Pengangguran

$$\ln(PDRB_i) = \beta_0 + \beta_1 \ln(SUBSIDI_i) + \beta_2 KEMISKINAN_i + \beta_3 TPT_i + \varepsilon_i$$

Model 3 adalah spesifikasi yang lebih lengkap dengan memasukkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebagai variabel kontrol tambahan. Model ini bertujuan mengendalikan kondisi pasar tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat secara simultan, sehingga estimasi koefisien dana subsidi guru memberikan gambaran hubungan yang lebih komprehensif terhadap PDRB.

d. Model Subsidi Upah dan Kesejahteraan Guru

Model ini dirancang untuk menganalisis kaitan subsidi guru non ASN terhadap pengeluaran rumah tangga, dengan pengeluaran digunakan sebagai proksi kesejahteraan. Penggunaan variabel pengeluaran dalam kajian kesejahteraan mengacu pada pendekatan ekonomi pembangunan yang menilai kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan hidup melalui konsumsi barang dan jasa. Pendekatan ini dianggap lebih stabil dan reliabel dibandingkan pendapatan, karena pendapatan cenderung fluktuatif, sedangkan pengeluaran mencerminkan pola konsumsi aktual yang berkelanjutan. Sejalan dengan teori fungsi konsumsi Keynes (1936), peningkatan sumber pendapatan seperti subsidi diperkirakan mendorong perluasan alokasi pengeluaran rumah tangga. Selain itu, literatur seperti Deaton dan Grosh (2000) serta laporan

Bank Dunia (2016) menegaskan bahwa pengeluaran rumah tangga merupakan indikator yang valid untuk menangkap tingkat kesejahteraan. Model pertama dibangun untuk mengevaluasi bagaimana intervensi fiskal berupa subsidi mampu memperkuat kapasitas ekonomi guru non ASN melalui peningkatan kemampuan pembelanjaan rumah tangga dengan rincian model sebagai berikut:

$$PENGELUARAN_i = \beta_0 + \beta_1 SUBSIDI_i + \beta_2 HONOR_i + \varepsilon_i$$

Dalam model ini, variabel PENGELUARAN_i merepresentasikan total alokasi belanja rumah tangga guru ke berbagai kebutuhan hidup, sehingga mencerminkan kapasitas ekonomi dan tingkat kesejahteraan aktual. Variabel SUBSIDI_i digunakan sebagai prediktor pertama yang menjelaskan tambahan pendapatan yang diterima guru melalui program bantuan atau dukungan finansial pemerintah. Secara teori, peningkatan pendapatan disposibel dari subsidi diperkirakan mendorong peningkatan pengeluaran karena rumah tangga memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, sesuai kerangka fungsi konsumsi Keynesian yang menyatakan bahwa pengeluaran meningkat seiring kenaikan pendapatan. Variabel HONOR_i dimasukkan sebagai prediktor kedua yang mencerminkan pendapatan rutin yang diterima guru sebagai kompensasi pekerjaan. Honor dianggap sebagai determinan penting pengeluaran karena menjadi sumber pendapatan utama yang menopang daya beli. Sementara itu, ε_i berfungsi menangkap variabel-variabel lain di luar subsidi dan honor yang dapat memengaruhi pengeluaran seperti jumlah tanggungan keluarga, gaya hidup, inflasi, atau kondisi sosial ekonomi. Melalui struktur ini, model regresi memberikan kerangka kuantitatif untuk menilai seberapa besar kontribusi subsidi dan honor dalam menentukan kemampuan pengeluaran guru non ASN, sehingga membantu memahami mekanisme ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan.

Model kedua berfokus pada hubungan antara subsidi dan perilaku konsumsi guru non ASN. Berbeda dengan model pertama yang melihat total pengeluaran sebagai proksi kesejahteraan, model ini secara spesifik mengamati konsumsi langsung sebagai indikator daya beli jangka pendek. Konsumsi menggambarkan kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga menjadi aspek penting dalam melihat kondisi ekonomi aktual. Kerangka teori ekonomi mikro menjelaskan bahwa keputusan konsumsi berjalan seiring dengan besarnya tingkat pendapatan disposibel, preferensi, dan kebutuhan prioritas rumah tangga. Dalam konteks kebijakan kesejahteraan guru, subsidi berpotensi meningkatkan likuiditas keuangan sehingga konsumsi meningkat sebagai respons terhadap ketersediaan pendanaan tambahan. Dengan membangun model kedua, penelitian ini memberikan ruang untuk menilai sejauh mana subsidi difungsikan sebagai sarana peningkatan daya beli langsung, sekaligus membedakannya dari pengeluaran total yang mungkin mencakup pos keuangan non-konsumtif seperti investasi, cicilan, pendidikan anak, atau tabungan. Model kedua dirincikan sebagai berikut:

$$KONSUMSI_i = \beta_0 + \beta_1 SUBSIDI_i + \beta_2 HONOR_i + \varepsilon_i$$

Variabel KONSUMSI_i merepresentasikan besaran konsumsi rumah tangga guru dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga menjadi indikator langsung daya beli dan kesejahteraan ekonomi jangka pendek. Variabel SUBSIDI_i menggambarkan tambahan pendapatan yang diterima guru melalui program bantuan pemerintah, yang secara teori meningkatkan pendapatan disposibel dan mendorong kenaikan konsumsi sesuai fungsi konsumsi Keynesian. Variabel HONOR_i mencerminkan pendapatan rutin yang diperoleh guru dari aktivitas mengajar, yang turut memengaruhi kemampuan konsumsi karena menjadi sumber keuangan utama rumah tangga. Honor sebagai asumsi ceteris paribus Sementara itu, ε_i menangkap berbagai faktor lain di luar subsidi dan honor yang juga berpotensi memengaruhi

konsumsi, seperti jumlah tanggungan, preferensi belanja, tingkat harga, dan kondisi sosial ekonomi.

3.5. Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilaksanakan secara sistematis melalui tiga tahapan utama. Pertama, tahap persiapan, yang meliputi penyusunan instrumen survei dan pedoman wawancara, uji coba instrumen (pilot test), serta perizinan dan koordinasi dengan sekolah sampel. Kedua, tahap pelaksanaan pengumpulan data lapangan dilakukan secara langsung dengan metode *field survey* untuk responden sekolah, guru non ASN, dan masyarakat sekitar, serta wawancara daring atau tatap muka dengan informan kunci. Pada tahap ini, enumerator dilatih untuk memastikan keseragaman pemahaman instrumen dan mengurangi bias pengisian. Ketiga, tahap verifikasi dan validasi data, yaitu proses pemeriksaan kelengkapan jawaban, cross-checking data ganda atau tidak konsisten, dan transkripsi data kualitatif dari wawancara. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan prosedur etika penelitian, termasuk persetujuan partisipasi (*informed consent*), kerahasiaan data, dan penggunaan data untuk tujuan ilmiah.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISA

4.1. Dampak Ekonomi Program

4.1.1. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan

a. Revitalisasi dan Ekonomi Daerah

1. Model 1: Hubungan Dasar

Analisis regresi lintas provinsi menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara alokasi dana revitalisasi sekolah dan kinerja ekonomi daerah. Pada model pertama, yang hanya memasukkan dana revitalisasi sekolah sebagai variabel penjelas, ditemukan bahwa provinsi dengan alokasi revitalisasi sekolah yang lebih besar cenderung memiliki nilai PDRB yang lebih tinggi. Hubungan ini bersifat positif dan signifikan secara statistik, yang mengindikasikan bahwa belanja revitalisasi sekolah berjalan seiring dengan besarnya aktivitas ekonomi daerah. Namun demikian, hasil ini masih mencerminkan hubungan kasar karena belum mempertimbangkan perbedaan kondisi sosial ekonomi antarprovinsi.

Hasil Model 1 menunjukkan bahwa dana revitalisasi sekolah berhubungan positif dan signifikan dengan PDRB provinsi. Koefisien dana revitalisasi sebesar 0,647 dan signifikan pada tingkat 1 persen ($p = 0,003$), yang berarti bahwa kenaikan 1 persen dana revitalisasi sekolah berkaitan dengan peningkatan PDRB sekitar 0,65 persen. Nilai R^2 sebesar 0,278 menunjukkan bahwa sekitar 27,8 persen variasi PDRB antarprovinsi dapat dijelaskan oleh variasi dana revitalisasi sekolah saja. Meskipun daya jelaskannya masih terbatas, model ini memberikan indikasi awal bahwa belanja revitalisasi sekolah berjalan seiring dengan tingkat aktivitas ekonomi daerah. Dengan PDRB rata-rata Rp 579,49 triliun, maka peningkatan 0,65 persen setara dengan sekitar Rp 3,77 triliun. Artinya, secara rata-rata, peningkatan dana revitalisasi sekolah sebesar 1 persen berjalan seiring dengan tambahan aktivitas ekonomi daerah hampir Rp 4 triliun. Temuan ini menunjukkan bahwa belanja revitalisasi sekolah memiliki skala ekonomi yang nyata meskipun belum mempertimbangkan faktor struktural lain.

. regress LPDRB LREVITALISASI

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	38
Model	13.3712049	1	13.3712049	F(1, 36)	=	10.33
Residual	46.6102245	36	1.29472846	Prob > F	=	0.0028
Total	59.9814294	37	1.62111971	R-squared	=	0.2229
				Adj R-squared	=	0.2013
				Root MSE	=	1.1379

LPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LREVITALISASI	.6472306	.2014017	3.21	0.003	.238769 1.055692
_cons	7.125986	1.095902	6.50	0.000	4.903393 9.348579

2. Model (2): Model dengan Kontrol Kemiskinan

Pada model kedua, ketika tingkat kemiskinan provinsi dimasukkan sebagai variabel kontrol, hubungan antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB tetap positif dan signifikan. Artinya, meskipun perbedaan tingkat kemiskinan telah diperhitungkan, provinsi dengan dana revitalisasi sekolah yang lebih besar masih cenderung memiliki PDRB yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan menunjukkan hubungan negatif yang kuat dengan PDRB, di mana provinsi dengan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi umumnya memiliki kinerja ekonomi yang

lebih rendah. Hasil ini menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari revitalisasi sekolah akan lebih optimal apabila dibarengi dengan pengendalian kemiskinan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien dana revitalisasi sekolah tetap positif dan signifikan, dengan nilai sebesar 0,549 ($p = 0,002$). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara dana revitalisasi dan PDRB tetap kuat meskipun perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi telah dikendalikan. Kenaikan 1 persen dana revitalisasi sekolah berkaitan dengan peningkatan PDRB sekitar 0,55 persen. Dengan basis PDRB rata-rata sebesar Rp 579,49 triliun, 1 persen kenaikan dana revitalisasi berkaitan dengan peningkatan PDRB sekitar Rp 3,18 triliun. Sementara itu, koefisien kemiskinan bernilai $-0,169$ dan signifikan ($p = 0,003$), yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 poin persentase tingkat kemiskinan berkaitan dengan penurunan PDRB sekitar 0,17 persen. Nilai R^2 meningkat menjadi 0,484, yang berarti hampir 48,4 persen variasi PDRB antarprovinsi dapat dijelaskan oleh kombinasi dana revitalisasi dan tingkat kemiskinan.

. regress LPDRB LREVITALISASI KEMISKINAN

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	38
Model	29.0912228	2	14.5456114	F(2, 35)	=	16.48
Residual	30.8902065	35	.88257733	Prob > F	=	0.0000
Total	59.9814294	37	1.62111971	R-squared	=	0.4850
				Adj R-squared	=	0.4556
				Root MSE	=	.93946

LPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LREVITALISASI	.5495224	.1678878	3.27	0.002	.2086919 .8903528
KEMISKINAN	-.1004564	.0238028	-4.22	0.000	-.1487786 -.0521342
_cons	8.716005	.9801157	8.89	0.000	6.726265 10.70575

3. Model (3): Model dengan Kontrol Kemiskinan dan Pengangguran

Pada model ketiga, analisis diperluas dengan menambahkan tingkat pengangguran terbuka. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hubungan positif antara dana revitalisasi sekolah dan PDRB tetap konsisten, sementara kondisi negatif kemiskinan terhadap PDRB juga tetap kuat dan signifikan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan PDRB lintas provinsi pada tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu titik waktu, tingkat pengangguran belum tentu mencerminkan kekuatan ekonomi daerah secara keseluruhan, terutama karena beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi juga memiliki tingkat pengangguran yang relatif besar akibat karakteristik pasar kerja perkotaan dan industri.

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien dana revitalisasi sekolah tetap positif dan signifikan, sebesar 0,527 ($p = 0,003$), yang menunjukkan konsistensi hubungan dengan PDRB. Kenaikan 1 persen dana revitalisasi berkaitan dengan peningkatan PDRB sekitar 0,53 persen. Dalam nilai PDRB rata-rata sebesar Rp 579,49 triliun, kenaikan ini setara dengan sekitar Rp 3,05 triliun. Koefisien kemiskinan tetap negatif dan signifikan, sebesar $-0,182$ ($p < 0,001$), memperkuat temuan bahwa kemiskinan merupakan faktor struktural yang berkaitan erat dengan rendahnya kinerja ekonomi daerah. Sementara itu, koefisien pengangguran terbuka bernilai $-0,105$, namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,149$), yang mengindikasikan bahwa pada satu tahun observasi ini, variasi pengangguran belum menunjukkan hubungan yang kuat dengan PDRB antarprovinsi. Nilai R^2 meningkat kembali menjadi 0,530, menunjukkan bahwa sekitar 53 persen variasi PDRB dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut secara simultan.

. regress LPDRB LREVITALISASI KEMISKINAN PENGANGGURAN

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	38
Model	30.9501863	3	10.3167288	F(3, 34)	=	12.08
Residual	29.031243	34	.853860089	Prob > F	=	0.0000
Total	59.9814294	37	1.62111971	R-squared	=	0.5160
				Adj R-squared	=	0.4733
				Root MSE	=	.92405

LPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LREVITALISASI	.5272152	.1658245	3.18	0.003	.1902193 .8642112
KEMISKINAN	-.1021823	.0234415	-4.36	0.000	-.1498212 -.0545434
PENGANGGURAN	.1637488	.1109778	1.48	0.149	-.0617852 .3892829
_cons	8.124336	1.04411	7.78	0.000	6.002449 10.24622

Secara keseluruhan, hasil ini memberikan indikasi awal bahwa belanja revitalisasi sekolah selaras dengan dinamika ekonomi regional. Pertama, alokasi dana revitalisasi sekolah berkaitan positif dan konsisten dengan skala ekonomi daerah, sehingga belanja pendidikan ini berpotensi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi wilayah. Kedua, tingkat kemiskinan muncul sebagai faktor penghambat utama kinerja ekonomi daerah. Ketiga, indikator pengangguran terbuka perlu ditafsirkan secara hati-hati dalam analisis lintas wilayah karena tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi makro daerah pada satu periode tertentu. Dengan PDRB rata-rata Rp 579,49 triliun, hasil ketiga model secara konsisten menunjukkan bahwa dana revitalisasi sekolah memiliki potensi mendorong PDRB provinsi sebesar Rp 3 hingga 4 triliun untuk setiap kenaikan 1 persen anggaran, terutama bila disertai penurunan kemiskinan.

Revitalisasi sekolah menjadi investasi strategis pada kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan produktif, sekaligus mendukung pemerataan layanan pendidikan antarwilayah. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa alokasi dana revitalisasi sekolah berjalan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi daerah, sehingga kebijakan ini tidak hanya terkait pada sektor pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada dinamika ekonomi lokal. Selain itu, program revitalisasi memiliki keunggulan dari sisi tata kelola karena berbasis kebutuhan sekolah yang terukur dan dapat dievaluasi. Hasil analisis ini memperkuat argumen bahwa revitalisasi sekolah bukan sekadar belanja sektor pendidikan, melainkan instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah. Keberlanjutan program ini penting untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang merata serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

b. Revitalisasi dan Kebutuhan Sekolah

Hasil survei terhadap sekolah penerima revitalisasi yang tersebar di 30 propinsi di Indonesia, Hasil regresi menunjukkan bahwa dana revitalisasi sekolah memiliki hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan tingkat kebutuhan sekolah. Koefisien variabel LREVITALISASI sebesar 0,953 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 1 persen ($p < 0,001$). Karena kedua variabel dinyatakan dalam bentuk logaritma natural, koefisien ini dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas, yaitu kenaikan 1 persen dana revitalisasi berkaitan dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan sekolah sekitar 0,95 persen. Nilai R^2 sebesar 0,892 mengindikasikan bahwa sekitar 89,2 persen variasi kebutuhan sekolah dapat dijelaskan oleh variasi dana revitalisasi, yang tergolong sangat tinggi untuk analisis lintas unit. Uji F yang signifikan (Prob > F = 0,000) semakin menegaskan bahwa model

secara keseluruhan kuat dan layak secara statistik, serta memberikan dukungan empiris bahwa kebijakan revitalisasi sekolah telah selaras dengan kondisi riil kebutuhan pendidikan di lapangan.

. regress LKEBUTUHAN LREVITALISASI

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	97
Model	329.589107	1	329.589107	F(1, 95)	=	788.25
Residual	39.7223457	95	.418129954	Prob > F	=	0.0000
Total	369.311452	96	3.8469943	R-squared	=	0.8924
				Adj R-squared	=	0.8913
				Root MSE	=	.64663

LKEBUTUHAN	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LREVITALISASI	.9532884	.0339542	28.08	0.000	.8858808 1.020696
_cons	1.183139	.6673134	1.77	0.079	-.141646 2.507923

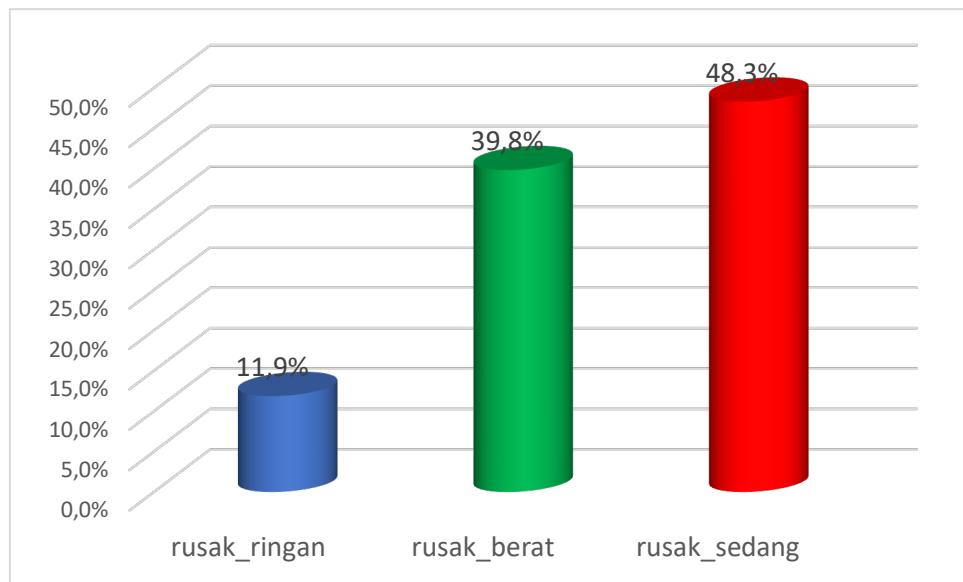
Nilai elastisitas sebesar 0,953 menunjukkan bahwa tambahan dana revitalisasi sekolah hampir sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kemampuan sekolah untuk memenuhi kebutuhannya. Kedekatan nilai elastisitas dengan satu mencerminkan tingginya daya serap dan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan tingkat daya jelaskan model yang sangat tinggi, temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan revitalisasi sekolah berjalan secara efektif dan responsif terhadap kondisi riil sekolah, serta mampu mengarahkan anggaran secara tepat sesuai dengan tingkat kebutuhan di lapangan.

Temuan ini menegaskan bahwa dana revitalisasi memiliki efek langsung dan hampir sebanding terhadap kebutuhan sekolah dalam memenuhi berbagai kebutuhan strategis, baik terkait sarana prasarana, fasilitas pembelajaran, maupun dukungan operasional lainnya. Hasil ini memberikan bukti empiris kuat bahwa program revitalisasi sekolah merupakan intervensi yang sangat efektif. Penambahan anggaran bahkan dalam skala relatif kecil terbukti menghasilkan peningkatan signifikan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah. Peningkatan anggaran revitalisasi secara langsung mengurangi kesenjangan fasilitas pendidikan di sekolah. Alokasi revitalisasi terbukti menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan pemenuhan kebutuhan sekolah, sehingga keberlanjutan pendanaan serta perluasan cakupan revitalisasi perlu dipertahankan dan diperkuat. Namun demikian, signifikansi yang sangat tinggi menandakan bahwa sekolah sangat bergantung pada revitalisasi untuk memenuhi fasilitas pendidikan, sehingga diperlukan desain kebijakan strategis seperti mekanisme pengalokasian berbasis kebutuhan faktual, prioritas untuk sekolah dengan kondisi sarana paling kritis, serta penguatan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan anggaran.

Kebijakan revitalisasi sekolah menjadi instrumen sistematis untuk pemerataan mutu pendidikan dan peningkatan kualitas layanan sekolah di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei, diperoleh hasil besaran total dana revitalisasi yang disetujui dan dana revitalisasi yang telah diterima sekolah yang menjadi sampel di 30 provinsi Indonesia sebagai berikut:

No	Besaran Dana	Dana Revitalisasi yang di setujui	Dana Revitalisasi yang di terima
1	Di bawah 100 juta	2,5%	7,6%
2	100 juta - 500 juta	42,4%	49,2%
3	500 juta - 1 Milyar	27,1%	24,6%
4	Di atas 1 Milyar	28,0%	18,6%

Grafik di bawah ini menggambarkan klasifikasi tingkat kerusakan bangunan sarana dan prasarana sekolah yang menerima bantuan program revitalisasi, yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Distribusi ini memberikan gambaran awal mengenai kondisi fisik infrastruktur sekolah sebelum atau pada saat memperoleh intervensi program.



Berdasarkan data pada grafik, kategori rusak sedang merupakan kondisi yang paling dominan, dengan persentase sebesar 48,3%. Temuan ini menunjukkan bahwa hampir setengah sarana dan prasarana sekolah berada pada tingkat kerusakan yang memerlukan perbaikan cukup signifikan, baik pada komponen struktural maupun non-struktural, namun masih memungkinkan untuk direhabilitasi tanpa harus dilakukan pembangunan ulang secara menyeluruh. Kondisi ini mencerminkan urgensi revitalisasi agar fungsi bangunan dapat kembali optimal dan tidak mengalami degradasi lebih lanjut.

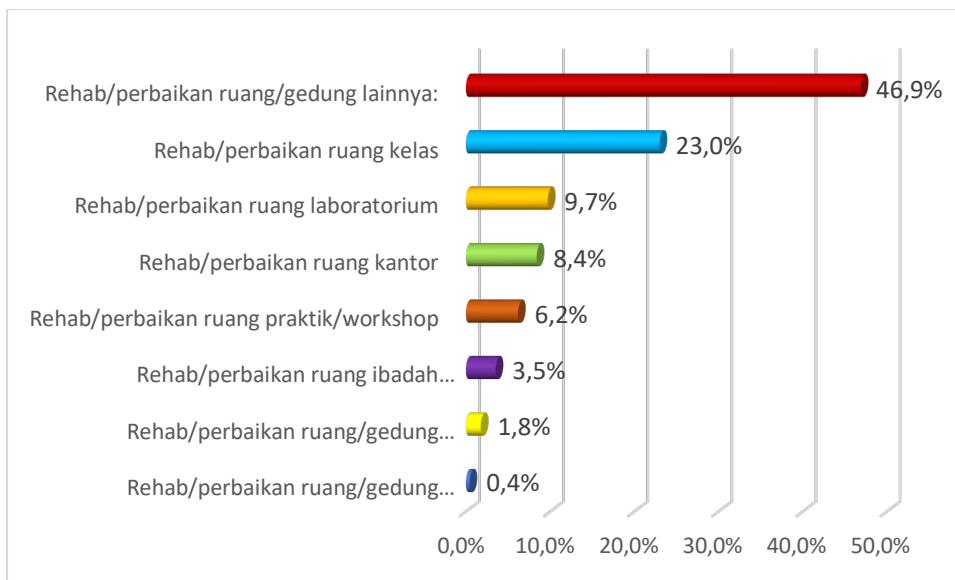
Selanjutnya, kategori rusak berat mencapai 39,8%, yang menunjukkan proporsi yang relatif tinggi. Persentase ini mengindikasikan bahwa sebagian besar bangunan sekolah berada dalam kondisi kerusakan serius yang berpotensi mengganggu keselamatan pengguna serta kelangsungan proses belajar mengajar. Bangunan dengan tingkat kerusakan berat umumnya membutuhkan rehabilitasi menyeluruh, penguatan struktural, atau bahkan pembangunan kembali, sehingga memerlukan dukungan anggaran dan perencanaan teknis yang lebih besar.

Sementara itu, kategori rusak ringan hanya sebesar 11,9%, yang merupakan proporsi paling kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan minor dan dapat ditangani melalui pemeliharaan rutin atau perbaikan sederhana, tanpa intervensi teknis yang kompleks.

Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas sarana dan prasarana sekolah penerima program revitalisasi berada pada kondisi rusak sedang hingga rusak berat. Temuan ini menegaskan bahwa program revitalisasi memiliki peran strategis dan relevan dalam menjawab kebutuhan nyata sekolah, terutama dalam meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelayakan infrastruktur pendidikan. Selain itu, hasil ini juga mengindikasikan pentingnya penentuan prioritas bantuan berbasis tingkat kerusakan agar pelaksanaan program lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil yang ditampilkan, kategori “rehabilitasi/perbaikan ruang/gedung lainnya” menempati proporsi terbesar, yaitu 46,9%. Perlu dicermati bahwa kategori ini mencakup bantuan pembangunan baru fasilitas sekolah, seperti pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), ruang UKS, laboratorium baru, toilet, serta fasilitas pendukung lainnya. Dominasi kategori ini menunjukkan

bahwa hampir separuh responden tidak hanya menerima bantuan berupa perbaikan fasilitas yang telah ada, tetapi juga memperoleh dukungan dalam bentuk penambahan dan pengembangan fasilitas baru, yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya tampung layanan pendidikan.



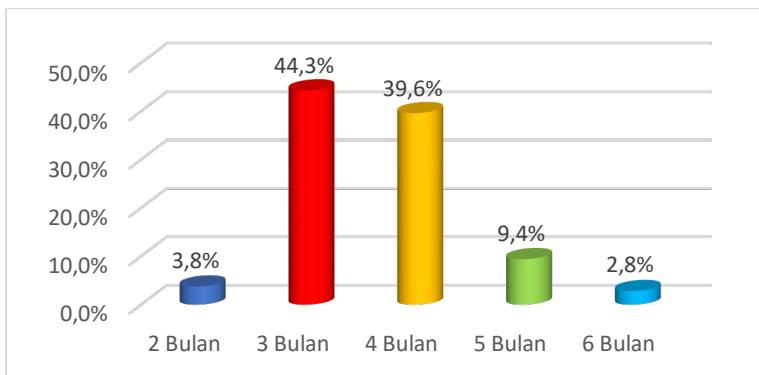
Selanjutnya, rehabilitasi atau perbaikan ruang kelas menempati urutan kedua dengan persentase 23,0%. Temuan ini mengindikasikan bahwa ruang kelas tetap menjadi fokus utama program revitalisasi, mengingat perannya yang sangat strategis sebagai ruang utama berlangsungnya proses pembelajaran. Perbaikan ruang kelas berpotensi meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta kualitas lingkungan belajar peserta didik.

Jenis bantuan lainnya meliputi rehabilitasi ruang laboratorium sebesar 9,7%, rehabilitasi ruang kantor sebesar 8,4%, dan rehabilitasi ruang praktik/workshop sebesar 6,2%. Persentase ini menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan fasilitas penunjang akademik dan administratif, meskipun intensitasnya relatif lebih rendah dibandingkan ruang kelas dan pembangunan fasilitas baru.

Sementara itu, rehabilitasi ruang ibadah (musholla/masjid) hanya mencapai 3,5%, dan rehabilitasi ruang/gedung perpustakaan berada pada persentase yang paling kecil, yaitu 1,8% dan 0,4%. Rendahnya proporsi pada kategori ini dapat mengindikasikan bahwa fasilitas tersebut relatif sudah tersedia atau belum menjadi prioritas utama dalam program revitalisasi pada periode pengamatan.

Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa bantuan revitalisasi tidak hanya berfokus pada perbaikan fasilitas eksisting, tetapi juga secara signifikan diarahkan pada pembangunan fasilitas baru guna memperluas dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pola ini mencerminkan upaya pemerintah atau penyelenggara program dalam menyesuaikan jenis bantuan dengan kebutuhan riil satuan pendidikan, baik dari aspek pemeliharaan infrastruktur yang ada maupun pengembangan sarana baru yang lebih memadai.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, berdasarkan survei kepada kontraktor yang menangani revitalisasi sekolah, durasi kontrak terbanyak untuk memperbaiki sekolah membutuhkan waktu sekitar 3-4 bulan.



Temuan ini mencerminkan bahwa proses penganggaran bersifat responsif terhadap kebutuhan revitalisasi sekolah, sehingga alokasi anggaran tidak hanya bersifat administratif tetapi jugabermanfaatkan dalam tahap implementasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa investasi pemerintah dalam revitalisasi sekolah berjalan efektif dalam mendorong realisasi program pendidikan. Konsistensi dalam kebijakan revitalisasi fasilitas pendidikan perlu dipertahankan bahkan diperkuat, terutama dalam wilayah dengan kualitas infrastruktur pendidikan yang rendah. Selain itu, monitoring dan evaluasi implementasi tetap diperlukan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan agar porsi realisasi dapat terus meningkat dan diarahkan pada outcome pendidikan jangka panjang, seperti peningkatan kualitas pembelajaran dan pemerataan layanan pendidikan.

Kehadiran Guru dan Siswa

Tabel: Rata-rata kehadiran Guru dan siswa sebelum dan sesudah revitalisasi

No	Satuan Pendidikan	Sebelum Revitalisasi	Sesudah Revitalisasi	Rata-Rata Kenaikan
1	KB/TK	94,7%	99,1%	4,3%
2	SD	95,3%	97,8%	2,5%
3	SMP	94,7%	97,2%	2,5%
4	SMA/SMK	95,1%	95,7%	0,6%

Tabel tersebut menyajikan perbandingan rata-rata kehadiran guru dan siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan program revitalisasi pada berbagai jenjang satuan pendidikan, yaitu KB/TK, SD, SMP, dan SMA/SMK. Secara umum, data menunjukkan adanya peningkatan tingkat kehadiran pada seluruh jenjang pendidikan setelah revitalisasi dilaksanakan, meskipun dengan besaran yang bervariasi.

Pada jenjang KB/TK, rata-rata kehadiran sebelum revitalisasi tercatat sebesar 94,7%, kemudian meningkat menjadi 99,1% setelah revitalisasi. Kenaikan sebesar 4,3% ini merupakan peningkatan tertinggi dibandingkan jenjang lainnya, yang mengindikasikan bahwa revitalisasi sarana dan prasarana memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap motivasi dan partisipasi guru serta siswa pada pendidikan usia dini.

Pada jenjang SD, tingkat kehadiran meningkat dari 95,3% sebelum revitalisasi menjadi 97,8% setelah revitalisasi, dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,5%. Peningkatan serupa juga terjadi pada jenjang SMP, di mana kehadiran naik dari 94,7% menjadi 97,2%, atau mengalami kenaikan sebesar 2,5%. Hal ini menunjukkan bahwa revitalisasi lingkungan belajar berkontribusi positif dalam meningkatkan kedisiplinan dan konsistensi kehadiran guru dan siswa pada pendidikan dasar dan menengah pertama.

Sementara itu, pada jenjang SMA/SMK, rata-rata kehadiran sebelum revitalisasi sebesar 95,1% dan meningkat menjadi 95,7% setelah revitalisasi, dengan kenaikan relatif kecil yaitu 0,6%. Peningkatan

yang lebih rendah ini dapat mengindikasikan bahwa tingkat kehadiran pada jenjang SMA/SMK sudah relatif tinggi sejak awal, sehingga ruang peningkatan setelah revitalisasi menjadi lebih terbatas dibandingkan jenjang lainnya.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa program revitalisasi berdampak positif terhadap peningkatan rata-rata kehadiran guru dan siswa di seluruh jenjang pendidikan. Dampak tersebut paling signifikan dirasakan pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar, sementara pada jenjang pendidikan menengah atas peningkatannya relatif lebih moderat. Temuan ini memperkuat asumsi bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan dapat meningkatkan kenyamanan, motivasi, dan partisipasi warga sekolah dalam proses pembelajaran.

c. Efek Multiplier Revitalisasi

Sektor pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembangunan sosial, melainkan juga menjadi penggerak ekonomi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan mampu menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan aktivitas industri jasa, perdagangan, serta sektor pendukung lainnya. Keterkaitan antara pembangunan fisik sekolah dan pergerakan ekonomi lokal terlihat ketika ditinjau melalui analisis empiris. Hasil estimasi regresi antara nilai kontrak revitalisasi sekolah dan penggunaan material lokal menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, yang tercermin dari koefisien sebesar 3,51458 dengan nilai p 0,004. Dalam model semi-log seperti ini, koefisien tersebut diinterpretasikan sebagai perubahan pada variabel penggunaan material lokal akibat perubahan persentase pada variabel nilai kontrak revitalisasi yang diterima sekolah. Koefisien 3,51 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan 1 persen dalam nilai kontrak proyek revitalisasi sekolah akan meningkatkan penggunaan material lokal sebesar 3,51 poin persentase.

Revitalisasi yang memiliki nilai kontrak lebih besar menunjukkan kecenderungan lebih tinggi untuk memanfaatkan material lokal. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin besar skala proyek, semakin besar pula ruang bagi kontraktor untuk melakukan diversifikasi material, termasuk melibatkan pemasok lokal dalam rantai pasok konstruksi. Selain itu, proyek bernilai besar biasanya mencakup pekerjaan yang relatif luas dan beragam sehingga membuka peluang lebih besar bagi penggunaan material lokal yang tersedia di sekitar lokasi proyek.

- regress MATERIALLOKAL LKONTRAK

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	78
Model	2955.31708	1	2955.31708	F(1, 76)	=	8.94
Residual	25117.5547	76	330.494141	Prob > F	=	0.0038
Total	28072.8718	77	364.582751	R-squared	=	0.1053
				Adj R-squared	=	0.0935
				Root MSE	=	18.179

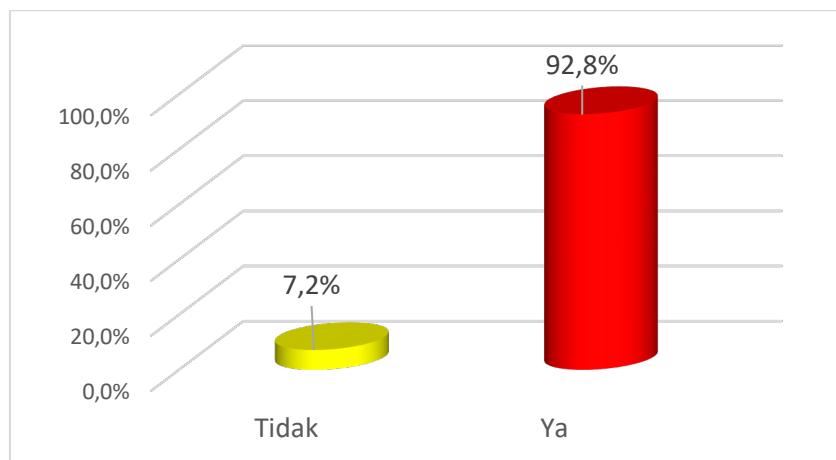
MATERIALLO~L	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LKONTRAK	3.51458	1.175312	2.99	0.004	1.173743 5.855417
_cons	157.2962	23.17919	6.79	0.000	111.1308 203.4615

Nilai konstanta 157,2962 menunjukkan tingkat dasar penggunaan material lokal ketika nilai kontrak berada pada titik nol, menggambarkan bahwa proyek dengan nilai kecil hingga menengah pun sudah memiliki kecenderungan cukup tinggi untuk memanfaatkan material lokal. Nilai R-squared sebesar 0,1053 menunjukkan bahwa variabel nilai kontrak mampu menjelaskan sekitar 10,5% variasi penggunaan material lokal, sehingga faktor lain seperti kebijakan TKDN, preferensi teknis

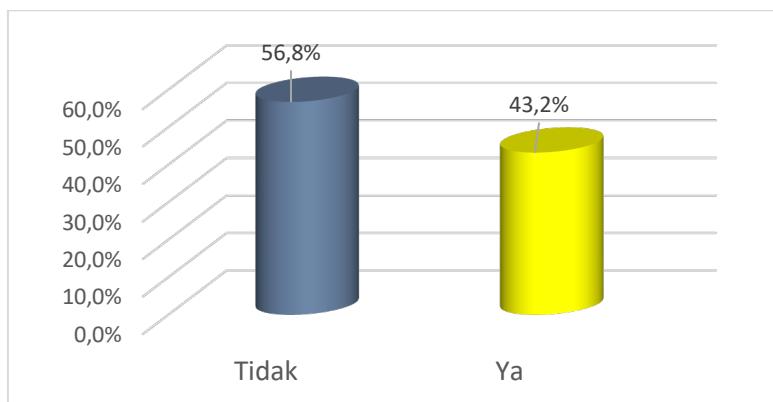
kontraktor, ketersediaan material lokal yang memenuhi standar kualitas, dan jarak logistik masih menjadi penentu utama pola penggunaan material lokal. Nilai R-squared yang relatif kecil tidak menjadi permasalahan dalam konteks penelitian ini karena data yang digunakan berasal dari survei primer, yang secara alami memiliki tingkat heterogenitas tinggi antarresponden dan dipengaruhi oleh kondisi lapangan yang sangat beragam. Dalam penelitian berbasis survei, nilai R-squared yang rendah sering kali terjadi dan tetap dianggap valid selama koefisien regresi signifikan secara statistik dan konsisten secara teoritis.

Peningkatan investasi melalui kontrak revitalisasi sekolah dapat memberi kontribusi ekonomi yang lebih besar apabila diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal. Temuan ini mendukung perlunya regulasi yang lebih eksplisit mengenai komponen lokal dalam proyek pendidikan, penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah penyedia material bangunan, serta peningkatan standardisasi kualitas produk lokal agar dapat memenuhi spesifikasi teknis proyek bernilai besar. Dengan demikian, revitalisasi sekolah tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi lokal melalui peningkatan permintaan terhadap material yang berasal dari produsen dalam negeri.

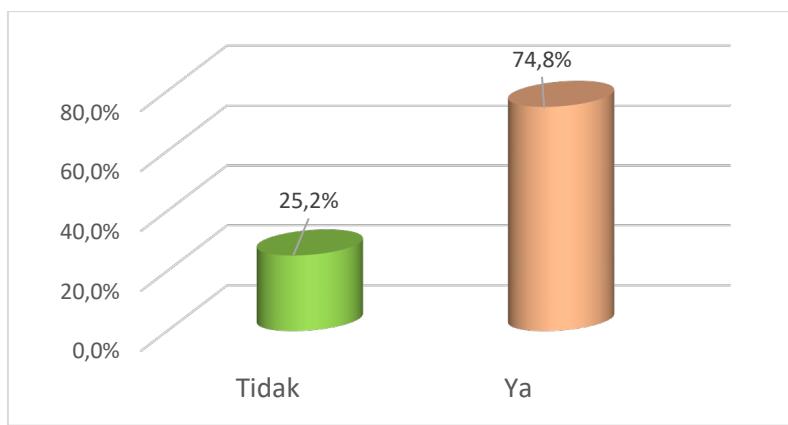
Berdasarkan survei kepada suplier bahan bangunan lokal, sebesar 92,8% menyatakan bahwa omzet usaha meningkat selama proyek revitalisasi sekolah



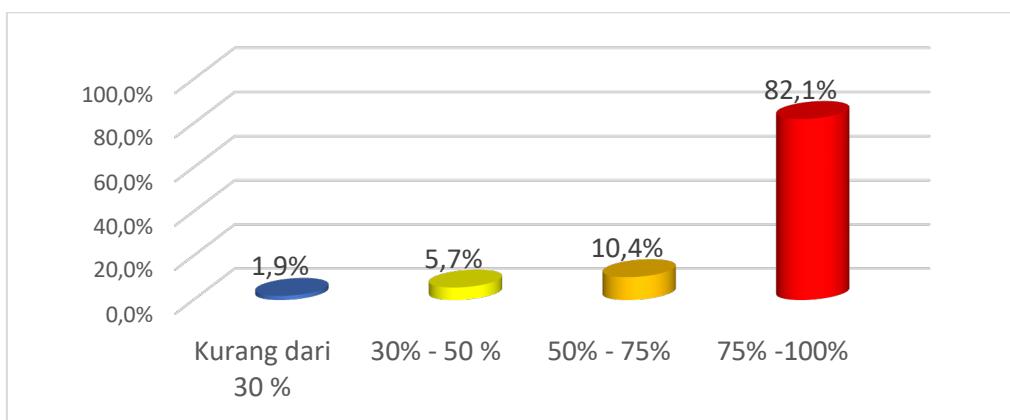
Sebanyak 56,8% suplier bahan material menyatakan permintaan bahan bangunan di wilayah sekitar, juga turut mengalami peningkatan.



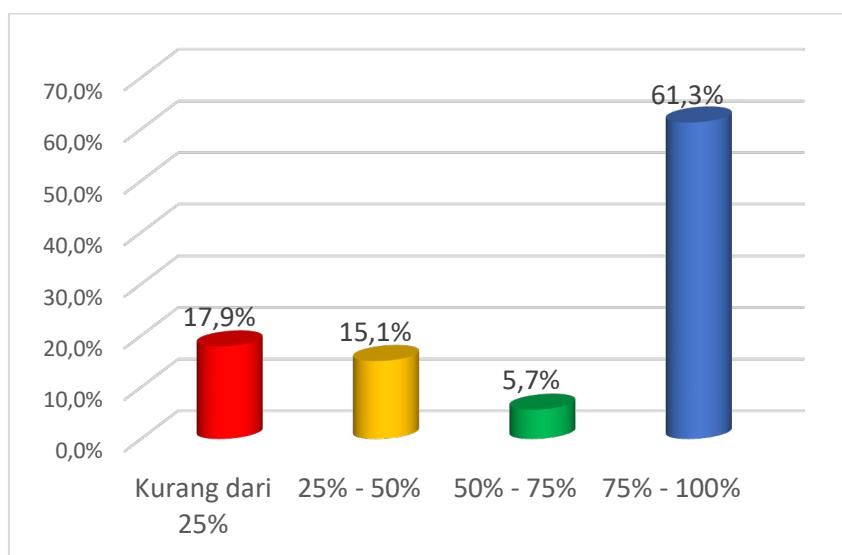
Peningkatan omset dari adanya revitalisasi sekolah membawa peningkatan usaha bahan bangunan lokal. Sebanyak 74,8% suplier bahan bangunan menyatakan dirinya melakukan penambahan modal atau melakukan investasi tambahan selama proyek berlangsung.



Hasil ini sejalan dengan survei terhadap kontraktor penanggung jawab program. Sebesar 82,1% responden menyatakan persentase bahan atau material yang dibeli dari pemasok lokal atau sekitar wilayah proyek mencapai 75 hingga 100 persen.

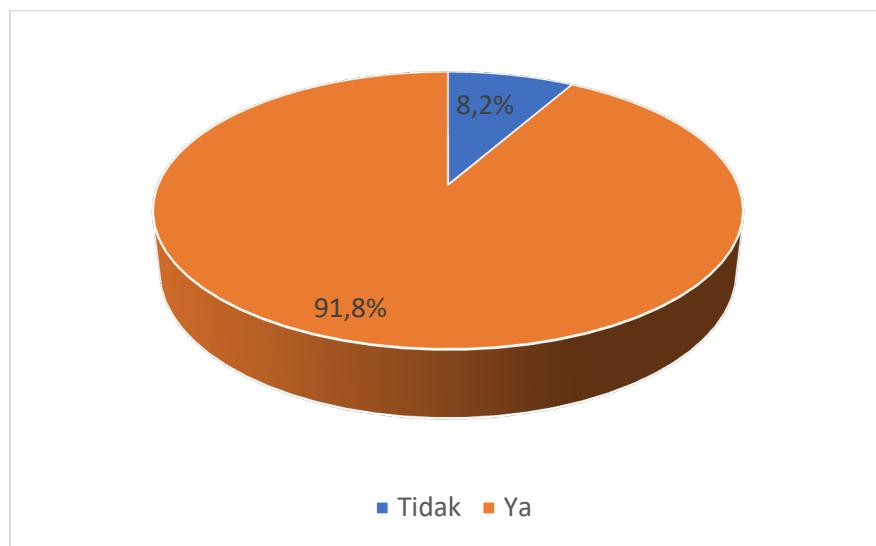


Selain penggunaan materil lokal, sebesar 61,3% responden kontraktor menyatakan menggunakan tenaga kerja yang berasal dari sekitar lokasi sekolah dengan porsi 75 hingga 100 persen dari seluru pekerja yang dipekerjakan dalam proyek revitalisasi.

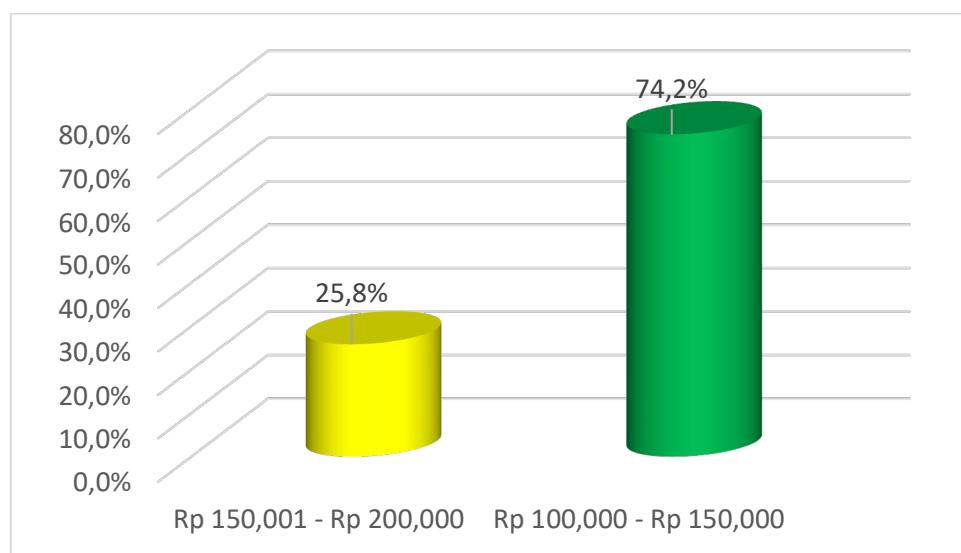


Dalam perspektif kebijakan fiskal, hasil ini mengisyaratkan bahwa belanja pendidikan, khususnya revitalisasi sekolah, merupakan investasi ekonomi produktif yang menghasilkan manfaat langsung dan tidak langsung terhadap peningkatan output regional. Alokasi anggaran revitalisasi sekolah perlu ditempatkan sebagai prioritas strategis pembangunan daerah, terutama di wilayah dengan kinerja ekonomi yang masih rendah, kualitas fasilitas pendidikan tertinggal, atau ketimpangan akses pendidikan tinggi. Selain itu, efektivitas belanja revitalisasi dapat lebih dimaksimalkan apabila disertai dengan kebijakan penguatan kompetensi guru, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan sekolah. Dari perspektif jangka panjang, temuan ini memberikan argumen ilmiah bahwa investasi di sektor pendidikan dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan revitalisasi akan memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

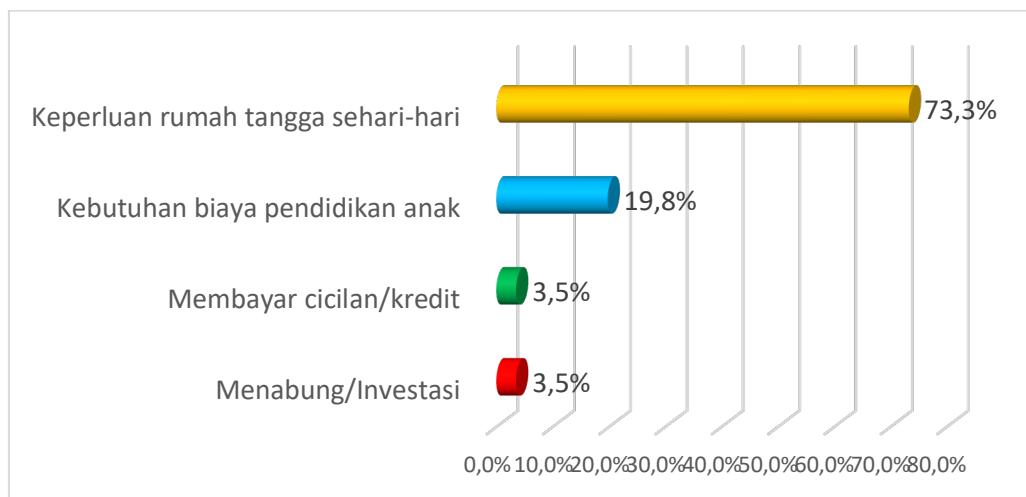
Survei terhadap rumah tangga sekitar sekolah memperlihatkan 91,8% responden menyatakan ada anggota keluarga yang bekerja dalam proyek revitalisasi.



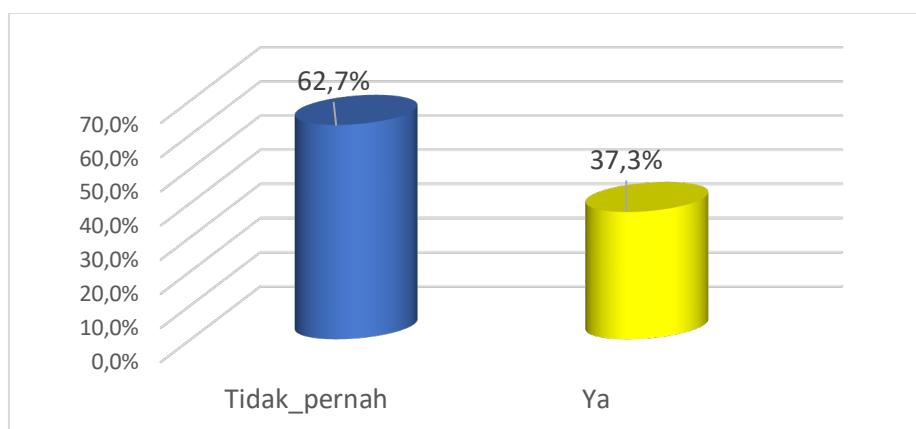
Sebanyak 74,2% responden menyatakan rata-rata upah yang diterima per orang per hari dari hasil bekerja di proyek revitalisasi sekitar Rp 100.000 hingga 150.000. Hal ini menjadi indikasi adanya pembukaan lapangan kerja sehingga terjadinya perputaran ekonomi pada rumah tangga sekitar.



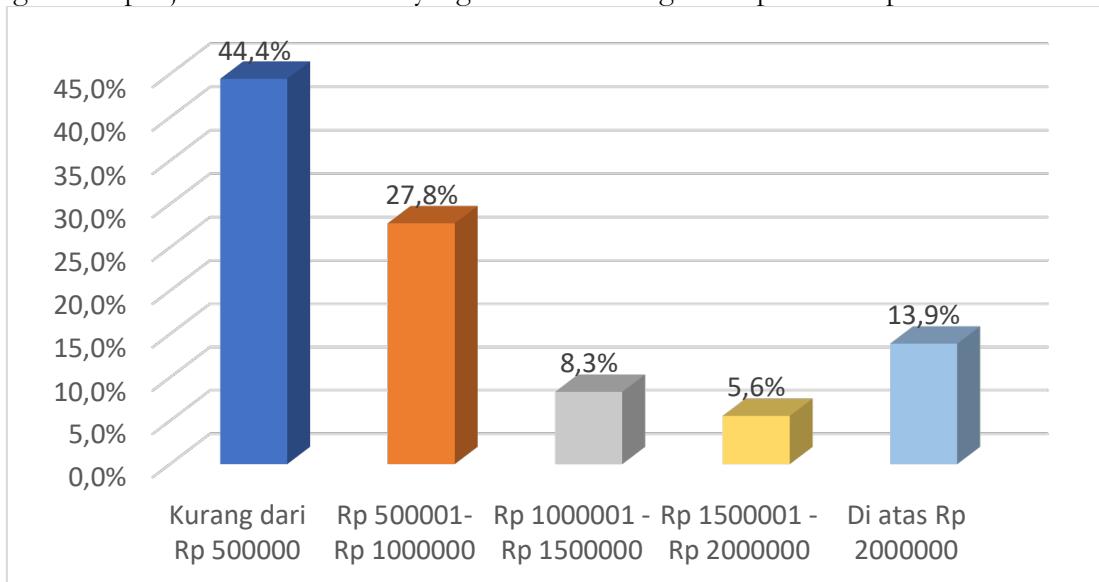
Pendapatan hasil bekerja pada proyek revitalisasi mayoritas digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-har rumah tangga.



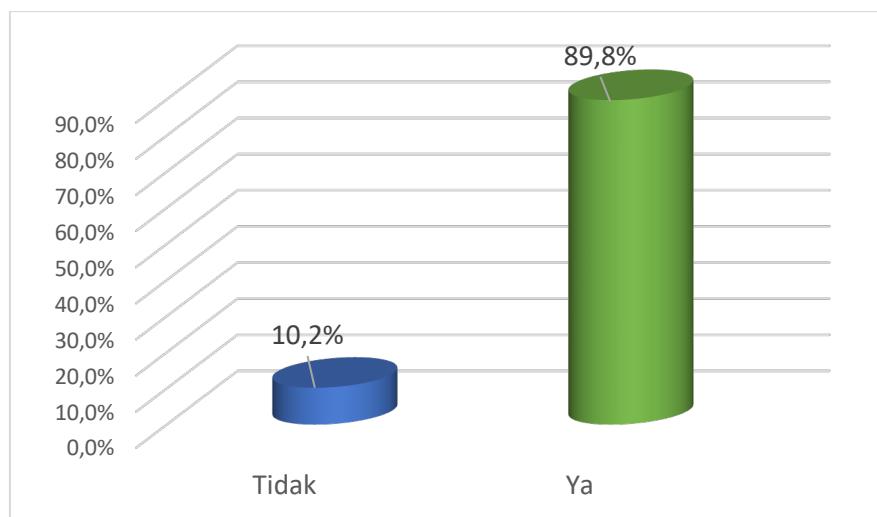
Sementara itu, survei terhadap pelaku UMKM atau pedagang lokal memperlihatkan 62,7% menjawab pernah menjadi pemasok barang/jasa untuk proyek revitalisasi.



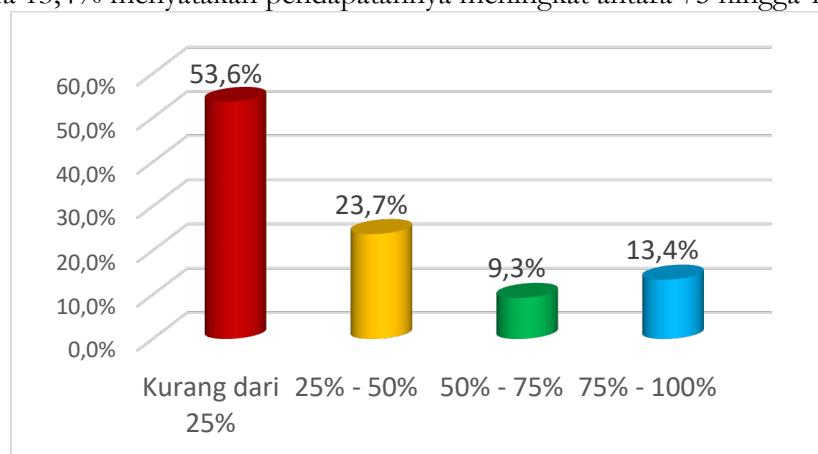
Dengan nilai penjualan atau kontrak yang diterima kurang dari Rp 500.000 per hari.



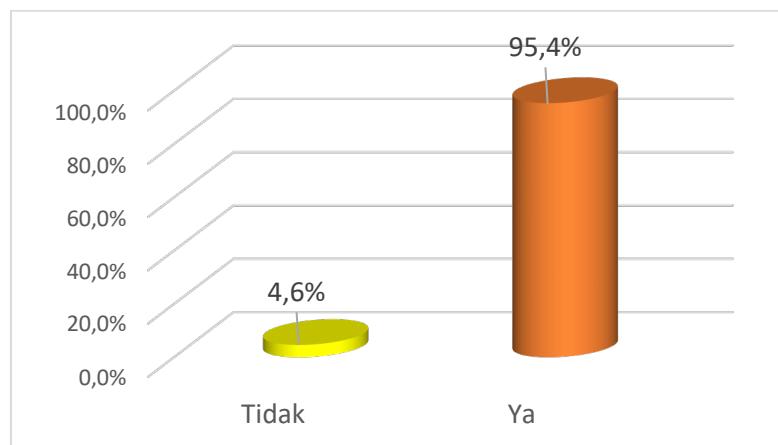
UMKM atau pedagang lokal juga turut merasakan dampak perputaran ekonomi dari adanya revitalisasi sekolah. Sebanyak 89,8% menyatakan pendapatannya meningkat selama proyek berlangsung.



Namun demikian, sebanyak 53,6% menyatakan perkiraan peningkatan pendapatan kurang dari 25%, sementara 13,4% menyatakan pendapatannya meningkat antara 75 hingga 100%.



Selain memberikan dampak ekonomi, program revitalisasi sekolah juga mendorong terjadinya transfer keahlian tenaga kerja. 95,4% pekerja proyek menyatakan bahwa keterlibatannya dalam proyek revitalisasi berkontribusi pada peningkatan keterampilan kerja mereka.



Implikasi ini menunjukkan pentingnya optimalisasi kebijakan revitalisasi melalui pendekatan penganggaran berbasis dampak ekonomi. Peningkatan alokasi dana revitalisasi sekolah berpotensi menghasilkan manfaat berlapis, seperti perbaikan sarana prasarana pembelajaran, peningkatan kualitas layanan pendidikan, peningkatan aktivitas ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi, peningkatan permintaan material bangunan, dan penguatan konsumsi rumah tangga. Efek pengganda ekonomi tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor riil dan pengembangan ekonomi daerah.

4.1.3. Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non ASN

a. Subsidi dan Ekonomi Daerah

1. Model 1: Hubungan Dasar

Hasil analisis regresi lintas provinsi menunjukkan adanya hubungan positif yang konsisten antara alokasi dana subsidi honor dan kinerja ekonomi daerah. Pada model awal, yang hanya memasukkan dana subsidi honor sebagai variabel penjelas, terlihat bahwa provinsi dengan alokasi subsidi honor lebih tinggi cenderung memiliki PDRB yang lebih besar. Hubungan ini signifikan secara statistik, menunjukkan bahwa pengeluaran untuk subsidi honor selaras dengan tingkat aktivitas ekonomi di daerah. Meski demikian, temuan ini bersifat awal karena belum memperhitungkan perbedaan kondisi sosial-ekonomi antarprovinsi.

Pada Model 1, dana subsidi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB provinsi, dengan koefisien sebesar 0,713 dan tingkat signifikansi 1 persen ($p = 0,003$). Artinya, peningkatan 1 persen alokasi dana subsidi pendidikan terkait dengan kenaikan PDRB sekitar 0,71 persen. Nilai R^2 sebesar 0,746 menandakan bahwa sekitar 74,6 persen variasi PDRB antarprovinsi dapat dijelaskan oleh perbedaan alokasi subsidi. Walaupun daya jelaskannya masih terbatas, model ini memberikan indikasi awal bahwa belanja subsidi honor sejalan dengan aktivitas ekonomi daerah. Dengan PDRB rata-rata sebesar Rp 579,49 triliun, kenaikan 0,746 persen setara dengan tambahan PDRB sekitar Rp 4,32 triliun. Artinya, rata-rata peningkatan 1 persen dana subsidi honor berkorelasi dengan tambahan aktivitas ekonomi lebih dari Rp 4 triliun. Temuan ini mengindikasikan bahwa subsidi honor memberikan dampak ekonomi yang nyata, meskipun faktor struktural lainnya belum diperhitungkan.

. regress LPDRB LSUBSIDI

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	38
Model	44.7390691	1	44.7390691	F(1, 36)	=	105.67
Residual	15.2423602	36	.423398895	Prob > F	=	0.0000
Total	59.9814294	37	1.62111971	R-squared	=	0.7459
				Adj R-squared	=	0.7388
				Root MSE	=	.65069

LPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LSUBSIDI	.713273	.0693884	10.28	0.000	.5725467 .8539993
_cons	7.275169	.3400021	21.40	0.000	6.585613 7.964725

2. Model (2): Model dengan Kontrol Kemiskinan

Pada model kedua, ketika tingkat kemiskinan provinsi dimasukkan sebagai variabel kontrol, hubungan antara dana subsidi honor dan PDRB tetap positif dan signifikan. Artinya, meskipun perbedaan tingkat kemiskinan telah diperhitungkan, provinsi dengan dana subsidi honor yang

lebih besar masih cenderung memiliki PDRB yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, tingkat kemiskinan menunjukkan hubungan negatif yang kuat dengan PDRB, di mana provinsi dengan persentase penduduk miskin yang lebih tinggi umumnya memiliki kinerja ekonomi yang lebih rendah. Hasil ini menegaskan bahwa manfaat ekonomi dari subsidi honor akan lebih optimal apabila dibarengi dengan pengendalian kemiskinan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien dana subsidi honor tetap positif dan signifikan, dengan nilai sebesar 0,639 ($p = 0,002$). Hal ini mengindikasikan bahwa hubungan antara dana subsidi honor dan PDRB tetap kuat meskipun perbedaan tingkat kemiskinan antarprovinsi telah dikendalikan. Kenaikan 1 persen dana subsidi honor berkaitan dengan peningkatan PDRB sekitar 0,64 persen. Dengan basis PDRB rata-rata sebesar Rp 579,49 triliun, 1 persen kenaikan dana subsidi honor berkaitan dengan tambahan PDRB sekitar Rp 3,71 triliun.

Sementara itu, koefisien kemiskinan bernilai -0,169 dan signifikan ($p = 0,003$), yang menunjukkan bahwa kenaikan 1 poin persentase tingkat kemiskinan berkaitan dengan penurunan PDRB sekitar 0,17 persen. Nilai R^2 meningkat menjadi 0,7678, yang berarti hampir 76,78 persen variasi PDRB antarprovinsi dapat dijelaskan oleh kombinasi dana subsidi honor dan tingkat kemiskinan.

. regress LPDRB LSUBSIDI KEMISKINAN

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	38
Model	46.0540252	2	23.0270126	F(2, 35)	=	57.87
Residual	13.9274042	35	.397925833	Prob > F	=	0.0000
Total	59.9814294	37	1.62111971	R-squared	=	0.7678
				Adj R-squared	=	0.7545
				Root MSE	=	.63081

LPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LSUBSIDI	.6396893	.0785087	8.15	0.000	.4803083 .7990704
KEMISKINAN	-.0335847	.0184751	-1.82	0.078	-.0710912 .0039218
_cons	7.974281	.5065095	15.74	0.000	6.946012 9.00255

3. Model (3): Model dengan Kontrol Kemiskinan dan Pengangguran

Pada model ketiga, analisis diperluas dengan memasukkan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel tambahan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa hubungan positif antara dana subsidi honor dan PDRB tetap konsisten, sementara efek negatif tingkat kemiskinan terhadap PDRB juga tetap kuat dan signifikan. Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap PDRB lintas provinsi pada tahun pengamatan. Temuan ini menunjukkan bahwa pada satu titik waktu, tingkat pengangguran belum selalu mencerminkan kekuatan ekonomi daerah secara keseluruhan, terutama karena beberapa provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi tetap memiliki pengangguran relatif tinggi akibat karakteristik pasar kerja perkotaan dan industri.

Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien dana subsidi honor tetap positif dan signifikan, sebesar 0,6256122 ($p = 0,003$), yang menegaskan konsistensi hubungan dengan PDRB. Artinya, peningkatan 1 persen dana subsidi honor terkait dengan kenaikan PDRB sekitar 0,63 persen. Dengan PDRB rata-rata sebesar Rp 579,49 triliun, kenaikan ini setara dengan tambahan PDRB sekitar Rp 3,63 triliun.

Koefisien kemiskinan tetap negatif dan signifikan, sebesar $-0,182$ ($p < 0,001$), menegaskan bahwa kemiskinan merupakan faktor struktural yang berkaitan erat dengan rendahnya kinerja ekonomi daerah. Sementara itu, koefisien pengangguran terbuka bernilai $-0,105$, namun tidak signifikan secara statistik ($p = 0,149$), yang menunjukkan bahwa pada tahun observasi ini variasi tingkat pengangguran belum memiliki hubungan yang kuat dengan PDRB antarprovinsi. Nilai R^2 meningkat menjadi $0,7892$, menunjukkan bahwa hampir $78,92$ persen variasi PDRB dapat dijelaskan secara simultan oleh ketiga variabel tersebut.

Ketiga model menunjukkan bahwa alokasi dana subsidi honor memiliki hubungan positif dan signifikan dengan PDRB provinsi. Model pertama menunjukkan hubungan langsung antara subsidi honor dan PDRB, sedangkan model kedua, yang memasukkan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol, tetapi menemukan hubungan positif subsidi honor, dengan kemiskinan berkaitan negatif signifikan terhadap kinerja ekonomi. Model ketiga menambahkan tingkat pengangguran terbuka, dan hasilnya menunjukkan subsidi honor tetap memiliki hubungan positif, kemiskinan tetap berkaitan negatif, sementara pengangguran terbuka tidak menunjukkan hubungan signifikan. Nilai R^2 yang tinggi pada masing-masing model menunjukkan bahwa variabel-variabel ini secara simultan menjelaskan sebagian besar variasi PDRB antarprovinsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa subsidi honor dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun efektivitasnya akan lebih optimal bila dikombinasikan dengan upaya pengendalian kemiskinan, sementara program peningkatan kesempatan kerja jangka panjang tetap relevan untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

. regress LPDRB LSUBSIDI KEMISKINAN PENGANGGURAN

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	38
Model	47.3382328	3	15.7794109	F(3, 34)	=	42.43
Residual	12.6431966	34	.371858723	Prob > F	=	0.0000
Total	59.9814294	37	1.62111971	R-squared	=	0.7892
				Adj R-squared	=	0.7706
				Root MSE	=	.6098

LPDRB	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
LSUBSIDI	.6256122	.0762708	8.20	0.000	.4706114 .7806131
KEMISKINAN	-.0363656	.0179223	-2.03	0.050	-.0727881 .000057
PENGANGGURAN	.1362073	.0732946	1.86	0.072	-.0127452 .2851599
_cons	7.462447	.5617862	13.28	0.000	6.32076 8.604134

b. Subsidi dan Pendapatan Guru Non ASN

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa terkait besaran tambahan penghasilan yang diterima oleh guru honorer non-ASN/P3K dalam satu tahun terakhir, terlihat adanya variasi nilai penerimaan pada setiap periode. Tabel menunjukkan empat periode penerimaan dengan rentang nilai minimal dan maksimal yang berbeda, serta nilai rata-rata yang relatif konsisten di kisaran Rp3,4 juta hingga Rp3,8 juta.

Pada periode pertama, tambahan penghasilan yang diterima responden berada pada kisaran Rp1.500.000 hingga Rp8.000.000, dengan rata-rata sebesar Rp3.414.627. Nilai minimal yang lebih tinggi pada periode ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru menerima tambahan penghasilan yang relatif lebih stabil pada awal tahun penerimaan.

Table 4. Jumlah (besaran) Tambahan Penghasilan yang diterima dalam Satu Tahun Terakhir

No	Periode Penerimaan	Minimal	Maksimal	Rata-rata
1	Penerimaan pertama	1.500.000	8.000.000	3.414.627
2	Penerimaan kedua	1.200.000	9.600.000	3.782.906
3	Penerimaan ketiga	1.000.000	9.600.000	3.841.593
4	Penerimaan keempat	1.500.000	9.600.000	3.797.824

Pada periode kedua, nilai penerimaan menunjukkan sedikit penurunan pada batas minimal, yaitu Rp1.200.000, namun batas maksimal meningkat hingga Rp9.600.000. Rata-rata penerimaan juga meningkat menjadi Rp3.782.906, mengindikasikan bahwa lebih banyak guru menerima tambahan penghasilan dalam jumlah lebih besar pada periode ini.

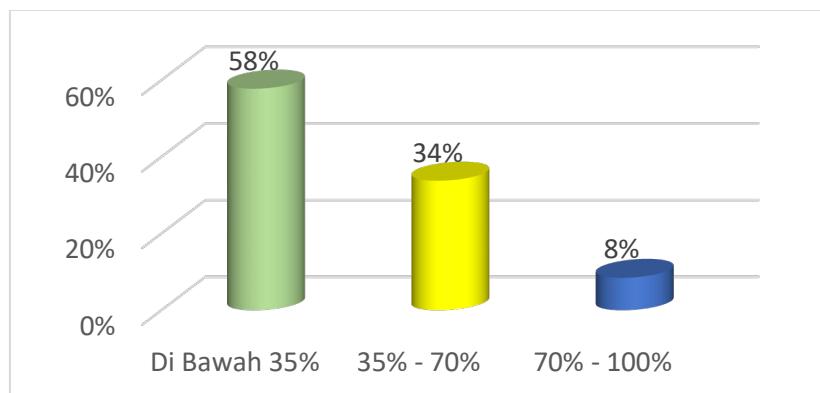
Pada periode pertama, tambahan penghasilan yang diterima responden berada pada kisaran Rp1.500.000 hingga Rp8.000.000, dengan rata-rata sebesar Rp3.414.627. Nilai minimal yang lebih tinggi pada periode ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru menerima tambahan penghasilan yang relatif lebih stabil pada awal tahun penerimaan.

Pada periode kedua, nilai penerimaan menunjukkan sedikit penurunan pada batas minimal, yaitu Rp1.200.000, namun batas maksimal meningkat hingga Rp9.600.000. Rata-rata penerimaan juga meningkat menjadi Rp3.782.906, mengindikasikan bahwa lebih banyak guru menerima tambahan penghasilan dalam jumlah lebih besar pada periode ini.

Selanjutnya, pada periode ketiga, nilai minimal kembali menurun menjadi Rp1.000.000, sementara nilai maksimal masih berada di angka Rp9.600.000. Nilai rata-rata sebesar Rp3.841.593 merupakan yang tertinggi dari keempat periode, yang menunjukkan bahwa periode ini merupakan saat dimana penerimaan tambahan penghasilan cenderung lebih besar bagi sebagian responden.

Pada periode keempat, nilai minimal kembali meningkat ke Rp1.500.000, sementara nilai maksimal tetap di kisaran Rp9.600.000, dengan nilai rata-rata Rp3.797.824. Stabilitas nilai minimal dalam periode ini menunjukkan adanya perbaikan atau konsistensi dalam distribusi tambahan penghasilan yang diterima guru.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tambahan penghasilan guru honorer dalam satu tahun terakhir memiliki variasi yang cukup signifikan pada rentang minimal dan maksimal, namun tetap menunjukkan kecenderungan stabil pada nilai rata-rata sekitar Rp3,5–Rp3,8 juta per periode. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat ketimpangan dalam besaran penerimaan antarresponden, secara umum program tambahan penghasilan telah memberikan kontribusi yang relatif konsisten terhadap peningkatan pendapatan guru honorer.



Grafik 1. Perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga setelah tambahan penghasilan guru

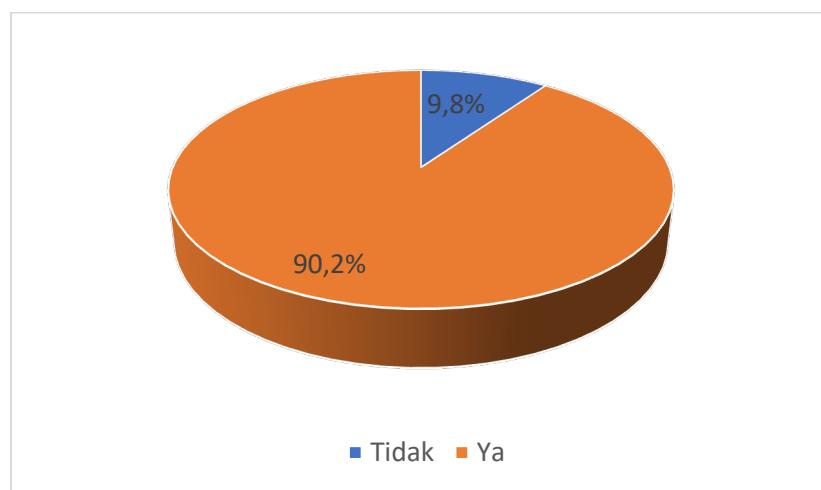
Dari grafik di atas terlihat bahwa berdasarkan hasil survei persentase perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga setelah menerima tambahan penghasilan guru, terlihat bahwa mayoritas responden mengalami peningkatan pendapatan yang relatif rendah, yaitu di bawah 35%. Sebanyak 58% responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan tersebut hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka kurang dari 35%. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun program tambahan penghasilan memberikan manfaat, kontribusinya terhadap total pendapatan rumah tangga masih terbatas bagi sebagian besar guru.

Selanjutnya, 34% responden menyatakan bahwa pendapatan rumah tangga mereka meningkat antara 35% hingga 70% setelah menerima tambahan penghasilan tersebut. Kelompok ini menunjukkan dampak yang lebih signifikan, di mana tambahan penghasilan memiliki peran yang cukup berarti dalam memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, meskipun belum menjadi sumber dominan.

Sementara itu, hanya 8% responden yang melaporkan peningkatan pendapatan rumah tangga antara 70% hingga 100%. Proporsi kecil ini mencerminkan bahwa bagi sebagian kecil guru, tambahan penghasilan tersebut memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap total pendapatan rumah tangga, kemungkinan karena mereka memiliki pendapatan utama yang relatif rendah atau tidak memiliki sumber pendapatan lain yang stabil.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tambahan penghasilan bagi guru honorer cenderung diikuti secara positif pada peningkatan pendapatan rumah tangga. Temuan ini menggambarkan bahwa program tersebut berperan sebagai dukungan finansial penting, terutama bagi guru dengan pendapatan terbatas, sekaligus menunjukkan perlunya kebijakan lanjutan untuk memperkuat dampak ekonomi bagi kelompok guru dengan kebutuhan yang lebih tinggi.

Mayoritas responden menyatakan bahwa program subsidi memberikan dampak positif yang signifikan. Sebanyak 90,2% responden menjawab “Ya”, menunjukkan bahwa tambahan penghasilan tersebut membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan pendidikan anak. Hasil ini mengindikasikan bahwa program tambahan penghasilan memiliki relevansi tinggi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi guru honorer yang umumnya berada dalam kondisi pendapatan terbatas.



Grafik 2. Dampak tambahan penghasilan terhadap kebutuhan dasar guru

Sebaliknya, hanya 9,8% responden yang menyatakan “Tidak”, yang berarti kelompok ini tidak merasakan manfaat yang cukup signifikan dari tambahan penghasilan yang diterima. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti besaran tambahan penghasilan yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan rumah tangga, adanya beban pengeluaran yang lebih besar dari rata-rata,

atau adanya sumber pendapatan lain yang mendominasi struktur ekonomi mereka sehingga tambahan penghasilan tidak memberikan perubahan berarti.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa program tambahan penghasilan bagi guru honorer memainkan peran penting dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Mayoritas responden merasakan bahwa insentif tersebut memberikan kontribusi langsung pada stabilitas ekonomi keluarga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi tekanan finansial sehari-hari. Temuan ini juga memperkuat pentingnya keberlanjutan program tambahan penghasilan bagi guru honorer sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik non-ASN.

c. Subsidi dan Pengeluaran Agregat Guru Non ASN

Dari sisi pengeluaran, hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa kebijakan subsidi dan kebijakan peningkatan honor memiliki kontribusi dalam mendorong peningkatan pengeluaran rumah tangga guru non ASN sebagai indikator kesejahteraan. Pengeluaran merepresentasikan seluruh arus keluar keuangan rumah tangga, termasuk belanja non-rutin, pembayaran tertunda, dan komponen non-konsumtif seperti biaya pendidikan atau perbaikan aset.

. regress Pengeluaran Subsidi Honor

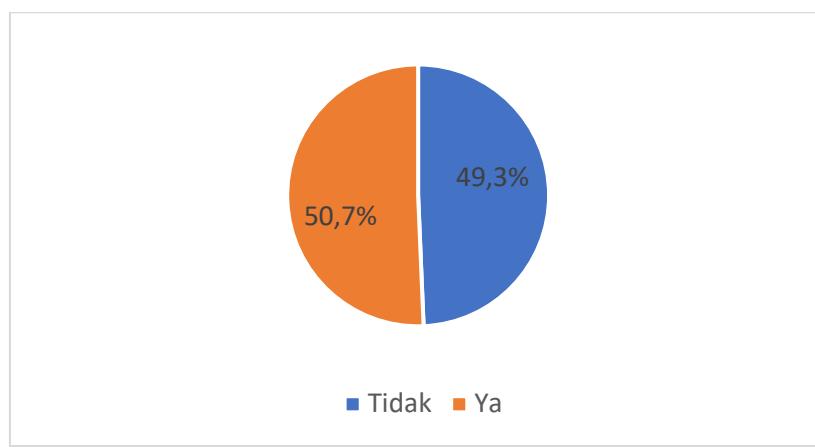
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	207
Model	2.9008e+14	2	1.4504e+14	F(2, 204)	=	12.83
Residual	2.3057e+15	204	1.1303e+13	Prob > F	=	0.0000
Total	2.5958e+15	206	1.2601e+13	R-squared	=	0.1117
				Adj R-squared	=	0.1030
				Root MSE	=	3.4e+06

Pengeluaran	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
Subsidi	.3177463	.0977516	3.25	0.001	.1250132 .5104794
Honor	.4972919	.1490836	3.34	0.001	.2033495 .7912342
_cons	1815369	390573.7	4.65	0.000	1045290 2585448

Secara statistik, model regresi menghasilkan nilai F-statistic sebesar 12,83 dengan Prob > F = 0,0000, yang mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama memiliki hubungan terhadap pengeluaran. Lebih jauh, koefisien variabel subsidi bernilai positif sebesar 0,3177 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p = 0,001$), yang menunjukkan bahwa peningkatan subsidi berbanding lurus dengan peningkatan pengeluaran guru. Artinya, program subsidi yang diberikan pemerintah efektif memperluas kapasitas daya beli guru melalui meningkatnya ruang fiskal untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Setiap kenaikan satu satuan nilai subsidi akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga guru rata-rata sebesar 0,3177 satuan, dengan asumsi variabel honor tetap. Hal ini menandakan bahwa program subsidi memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi guru untuk meningkatkan kemampuan pembelanjaan rumah tangga. Interval kepercayaan 95% memperkuat bukti bahwa hubungan subsidi bersifat nyata secara statistik. Selain itu, variabel honor juga menunjukkan koefisien positif sebesar 0,4973 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99% ($p = 0,001$), menegaskan bahwa peningkatan honor meningkatkan pengeluaran dan merupakan determinan yang sangat penting dalam memperkuat kesejahteraan ekonomi.

Jika koefisien 0,3177 diinterpretasikan dalam contoh kenaikan subsidi sebesar Rp1 juta rupiah, maka setiap kenaikan subsidi sebesar Rp1 juta akan meningkatkan pengeluaran rumah tangga guru

rata-rata sekitar Rp317.700, dengan asumsi variabel honor tetap (*ceteris paribus*). Pemisalan tersebut menggambarkan bagaimana tambahan dukungan fiskal dari pemerintah dapat secara langsung meningkatkan konsumsi rumah tangga guru non ASN. Dalam praktik sehari-hari, peningkatan pengeluaran ini umumnya tercermin pada beberapa jenis kebutuhan utama seperti belanja makanan, biaya transportasi, pembayaran utilitas, hingga alokasi kecil untuk pendidikan anak. Tambahan Rp317.700 ini tidak hanya meningkatkan kemampuan konsumsi, tetapi juga memberikan ruang fiskal baru yang membantu guru memenuhi kebutuhan yang sebelumnya tertunda, misalnya perawatan kesehatan rutin, pembelian perlengkapan mengajar, atau perbaikan kecil di rumah. Hal ini mengindikasikan kebijakan subsidi tidak hanya berdampak pada angka statistik, tetapi benar-benar meningkatkan kapasitas konsumsi dan kualitas hidup guru non ASN. Tambahan dukungan fiskal yang relatif kecil sekali pun dapat menghasilkan perubahan nyata pada kemampuan rumah tangga dalam mengelola pengeluaran dan meningkatkan kesejahteraan.



Grafik 3. Peningkatan pengeluaran/belanja rumah tangga penerima bantuan

Grafik di atas menunjukkan distribusi jawaban responden terkait pertanyaan apakah terdapat peningkatan pengeluaran rumah tangga setelah menerima tambahan penghasilan guru. Hasilnya memperlihatkan bahwa proporsi responden yang menyatakan terjadi peningkatan pengeluaran (50,7%) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang menyatakan tidak terjadi peningkatan (49,3%).

Perbedaan yang relatif tipis antara kedua kelompok ini mengindikasikan bahwa dampak tambahan penghasilan terhadap pola pengeluaran rumah tangga tidak bersifat seragam. Hal ini dapat dijelaskan melalui beberapa kemungkinan. Pertama, bagi sebagian responden, tambahan penghasilan berfungsi sebagai penambah kapasitas daya beli, sehingga memungkinkan peningkatan konsumsi, baik pada kebutuhan pokok, pendidikan, maupun kebutuhan pendukung lainnya. Kondisi ini sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan cenderung mendorong peningkatan konsumsi hingga mencapai tingkat kebutuhan yang sebelumnya tertunda.

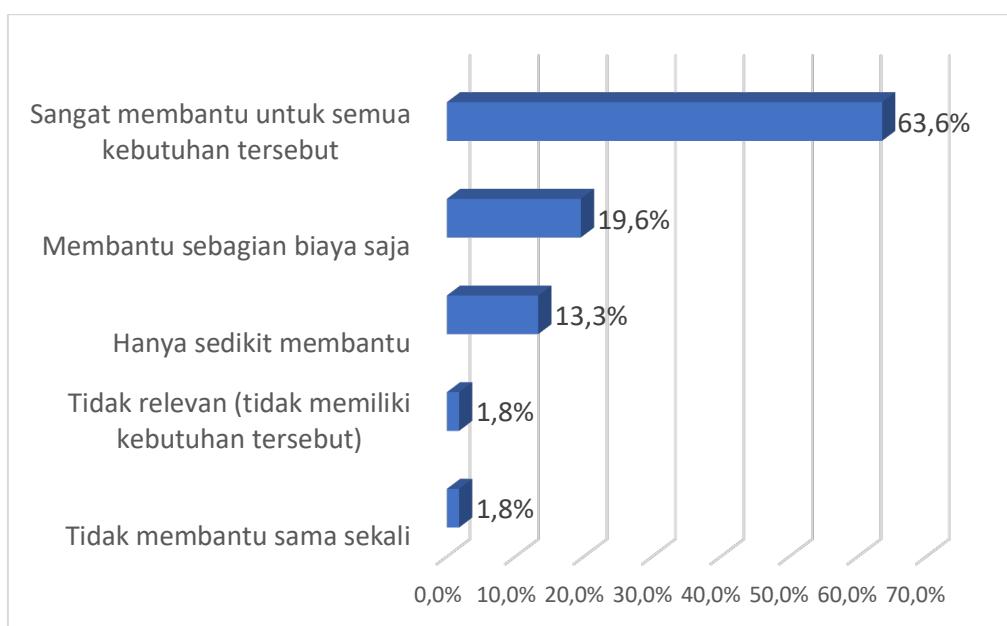
Namun, proporsi responden yang menyatakan tidak mengalami peningkatan pengeluaran hampir seimbang. Hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian guru memanfaatkan tambahan penghasilan bukan sepenuhnya untuk meningkatkan konsumsi, melainkan untuk menutupi kekurangan pengeluaran sebelumnya, menambah tabungan, atau menjaga stabilitas keuangan rumah tangga. Dengan demikian, tambahan penghasilan tidak selalu diterjemahkan sebagai peningkatan belanja aktual, melainkan lebih kepada perbaikan kondisi finansial secara umum.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan memiliki dampak yang beragam terhadap perilaku ekonomi rumah tangga. Walaupun terdapat kecenderungan peningkatan konsumsi pada sebagian responden, hampir separuh responden lainnya memilih untuk mempertahankan tingkat pengeluaran yang sama, sehingga tambahan penghasilan tidak sepenuhnya tercermin dalam pengeluaran rutin. Temuan ini menjadi indikator penting bahwa

intervensi peningkatan pendapatan tidak selalu menghasilkan pola konsumsi yang seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi finansial awal dan preferensi ekonomi masing-masing rumah tangga.

Peran tambahan penghasilan guru dalam membantu biaya transportasi, alat kerja, atau bahan ajar

Berdasarkan data pada grafik di bawah ini, dapat terlihat bahwa tambahan penghasilan guru memiliki peranan yang sangat signifikan dalam membantu pemenuhan kebutuhan terkait biaya transportasi, alat kerja, maupun bahan ajar. Mayoritas responden, yaitu sebesar **63,6%**, menyatakan bahwa tambahan penghasilan tersebut *sangat membantu* untuk memenuhi seluruh kebutuhan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru sangat bergantung pada sumber pendapatan tambahan guna menunjang aktivitas profesional mereka.



Grafik 4. Dampak tambahan penghasilan pada kebutuhan operasional guru

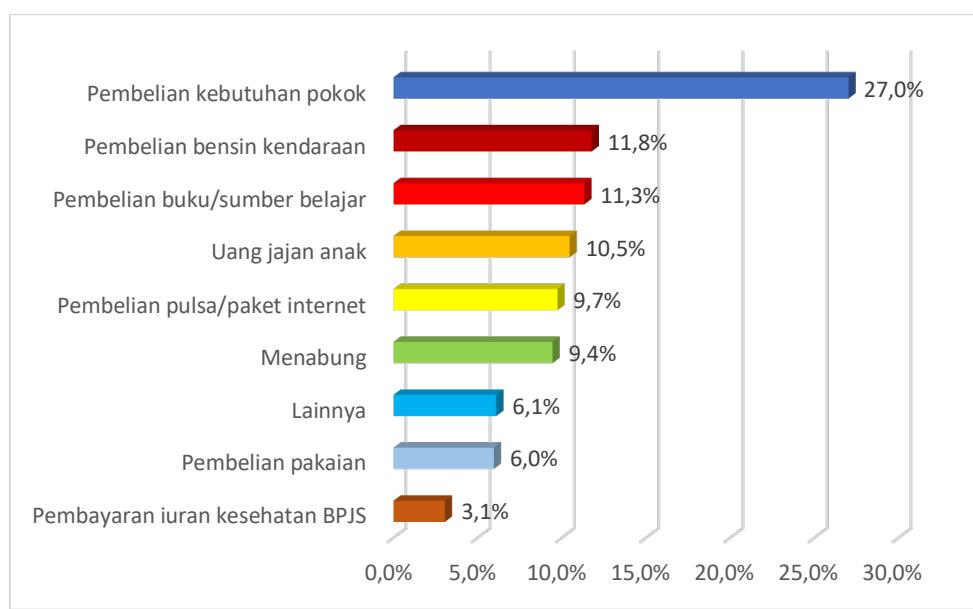
Selanjutnya, sebesar 19,6% responden menilai bahwa tambahan penghasilan hanya *membantu sebagian biaya saja*. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun mereka menerima tambahan pendapatan, jumlah yang diterima belum mampu menutup seluruh kebutuhan operasional terkait tugas keguruan. Sementara itu, 13,3% responden melaporkan bahwa tambahan penghasilan tersebut *hanya sedikit membantu*, yang dapat diartikan bahwa kontribusi finansial yang diterima relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil di lapangan.

Adapun proporsi responden yang menyatakan *tidak relevan* atau tidak memiliki kebutuhan tersebut, serta mereka yang menyatakan *tidak membantu sama sekali*, masing-masing hanya berada pada angka 1,8%. Persentase yang sangat kecil ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh guru memiliki kebutuhan terkait biaya transportasi, alat kerja, atau bahan ajar, dan tambahan penghasilan pada umumnya memainkan peran penting dalam mendukung tugas tersebut.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan guru berfungsi sebagai komponen finansial yang esensial dalam menopang pelaksanaan tugas profesional guru. Besarnya proporsi responden yang merasa sangat terbantu mencerminkan adanya kebutuhan ekonomi yang cukup tinggi di kalangan guru untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran. Dengan demikian, peningkatan atau penyesuaian tambahan penghasilan dapat menjadi strategi yang relevan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja guru di lapangan.

Pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan yang pertama kali diterima

Berdasarkan grafik di bawah terkait pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan yang pertama kali diterima oleh guru honorer, terlihat bahwa sebagian besar responden menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Sebesar 27,0% responden menyatakan bahwa dana tersebut dialokasikan untuk pembelian kebutuhan pokok, menunjukkan bahwa tambahan penghasilan berperan langsung dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian.



Grafik 5. Pemanfaatan dana bantuan pertama

Selanjutnya, dana bantuan juga banyak dimanfaatkan untuk menunjang mobilitas dan aktivitas pembelajaran. Hal ini tercermin dari 11,8% responden yang menggunakan dana tersebut untuk pembelian bensin kendaraan, serta 11,3% responden yang menggunakannya untuk pembelian buku atau sumber belajar. Kedua kategori ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung aktivitas profesional guru dan keberlanjutan proses pendidikan.

Sebanyak 10,5% responden menggunakan dana tersebut untuk uang jajan anak, dan 9,7% responden menggunakannya untuk pembelian pulsa atau paket internet. Temuan ini menegaskan bahwa bantuan tersebut turut berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga dan mendukung akses terhadap layanan digital yang penting untuk kegiatan belajar mengajar di era digital.

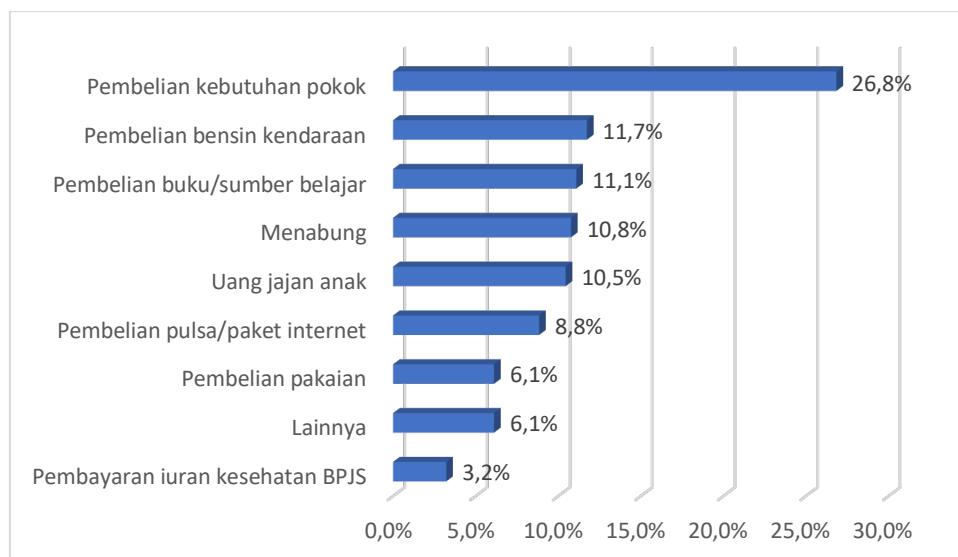
Sementara itu, 9,4% responden menyatakan bahwa mereka menabung sebagian dari dana yang diterima. Meskipun proporsinya tidak terlalu besar, temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian guru memiliki orientasi jangka panjang dalam pengelolaan keuangan, meskipun pendapatan mereka relatif terbatas.

Kategori lain seperti pembelian pakaian (6,0%) dan pembayaran iuran BPJS kesehatan (3,1%) menunjukkan bahwa dana bantuan juga digunakan untuk kebutuhan sekunder dan perlindungan sosial, meskipun hanya untuk sebagian kecil responden. Selain itu, 6,1% responden memilih kategori lainnya, yang mengindikasikan adanya variasi kebutuhan yang tidak tercakup dalam pilihan yang tersedia.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan terutama diarahkan pada kebutuhan konsumtif dasar dan kebutuhan penunjang pekerjaan, dengan

sebagian kecil digunakan untuk tabungan dan perlindungan kesehatan. Temuan ini menegaskan bahwa bantuan tambahan penghasilan memainkan peran penting dalam meningkatkan stabilitas ekonomi guru honorer, sekaligus mendukung fungsi sosial dan profesional mereka.

Pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan yang terakhir kali diterima



Grafik 6. Pemanfaatan Dana Bantuan terakhir

Selanjutnya, grafik di atas menggambarkan pola pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan oleh para responden. Secara umum, distribusi jawaban menunjukkan bahwa dana bantuan paling banyak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Kategori *pembelian kebutuhan pokok* menempati posisi tertinggi dengan persentase 26,8%. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penerima bantuan masih bergantung pada dukungan eksternal untuk menjaga kestabilan konsumsi dasar sehari-hari, sehingga bantuan memiliki fungsi utama sebagai penopang kebutuhan subsisten.

Selanjutnya, sebesar 11,7% responden memanfaatkan bantuan untuk *pembelian bensin kendaraan*. Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas dan aksesibilitas, baik untuk bekerja, mengantar anak, maupun aktivitas produktif lainnya, menjadi kebutuhan penting yang turut ditopang oleh dana bantuan. Penggunaan dana untuk *pembelian buku atau sumber belajar* mencapai 11,1%, yang mencerminkan bahwa sebagian penerima bantuan memprioritaskan investasi pada aspek pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anggota keluarga.

Alokasi dana untuk menabung (10,8%) memperlihatkan adanya kelompok responden yang memanfaatkan bantuan sebagai instrumen untuk memperkuat ketahanan finansial jangka pendek. Sementara itu, uang jajan anak (10,5%) menunjukkan bahwa kebutuhan terkait pengasuhan anak tetap menjadi pos pengeluaran rumah tangga yang tidak terhindarkan.

Pengeluaran untuk pembelian pulsa atau paket internet sebesar 8,8% mengindikasikan bahwa akses komunikasi dan internet telah menjadi kebutuhan penting dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, maupun aktivitas sosial. Dua kategori terakhir, yaitu pembelian pakaian dan lainnya, masing-masing sebesar 6,1%, mencerminkan proporsi yang relatif kecil namun tetap relevan dalam konteks kebutuhan rumah tangga secara umum.

Secara keseluruhan, pola pemanfaatan dana bantuan menunjukkan bahwa dana tersebut lebih banyak diarahkan pada kebutuhan yang bersifat konsumtif dasar dan operasional harian. Hal ini menguatkan kesimpulan bahwa bantuan tambahan penghasilan berperan penting dalam menjaga keberlangsungan kebutuhan esensial rumah tangga, sekaligus mendukung aspek pendidikan, mobilitas, serta ketahanan finansial sebagian penerima.

d. Subsidi dan Konsumsi Guru Non ASN

Konsumsi dalam hal ini mencerminkan penggunaan barang dan jasa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Hasil analisis regresi selanjutnya memperlihatkan model yang disusun untuk menjelaskan perilaku konsumsi rumah tangga guru non ASN signifikan secara statistik, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai Prob > F = 0,0000, sehingga model dinyatakan layak untuk digunakan dalam penarikan kesimpulan empiris. Nilai R-squared sebesar 0,1287 mengindikasikan bahwa sekitar 12,87% variasi konsumsi rumah tangga guru non ASN dapat dijelaskan oleh variabel subsidi dan honor, sementara sisanya dikaitkan oleh faktor-faktor lain di luar model seperti struktur kebutuhan keluarga, lokasi geografis, dan preferensi konsumsi. Secara parsial, variabel subsidi menunjukkan keterkaitan positif dan signifikan terhadap konsumsi, dengan koefisien 0,1203269 dan nilai p = 0,002. Koefisien ini mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan subsidi berasosiasi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga guru sebesar 0,1203 satuan, dengan asumsi variabel honor tetap.

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan subsidi berfungsi sebagai stimulus fiskal yang efektif dalam meningkatkan belanja konsumsi rumah tangga guru non ASN, memperkuat daya beli, serta mendukung stabilitas ekonomi keluarga. Interval kepercayaan 95% mempertegas bahwa hubungan variabel subsidi bersifat nyata secara statistik. Selain itu, variabel honor juga berkaitan signifikan terhadap konsumsi dengan koefisien 0,2386558 dan nilai p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan honor berhubungan dengan peningkatan konsumsi sebesar 0,2387 satuan, ceteris paribus. Dengan hasil tersebut, kebijakan subsidi diperlukan karena mampu meningkatkan konsumsi dan berfungsi sebagai bantalan ekonomi ketika terjadi tekanan finansial.

. regress Konsumsi Subsidi Honor

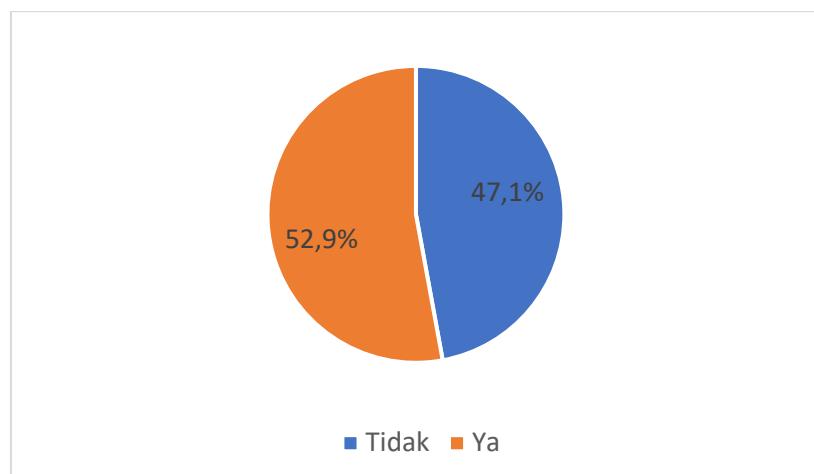
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	212
Model	5.5543e+13	2	2.7772e+13	F(2, 209)	=	15.43
Residual	3.7607e+14	209	1.7994e+12	Prob > F	=	0.0000
Total	4.3161e+14	211	2.0455e+12	R-squared	=	0.1287
				Adj R-squared	=	0.1204
				Root MSE	=	1.3e+06

Konsumsi	Coefficient	Std. err.	t	P> t	[95% conf. interval]
Subsidi	.1203269	.0385882	3.12	0.002	.0442548 .196399
Honor	.2386558	.0579928	4.12	0.000	.1243301 .3529815
_cons	1092509	153663.9	7.11	0.000	789579.6 1395439

Pada tingkat individu, variabel subsidi memiliki koefisien sebesar 0,1203269, signifikan pada tingkat kepercayaan 99% (p = 0,002). Nilai ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan Rp1 pada subsidi akan berhubungan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga guru sebesar Rp0,12, dengan asumsi variabel honor tidak berubah. Jika diinterpretasikan dalam contoh yang lebih praktis, kenaikan subsidi sebesar Rp 1 juta rupiah akan berhubungan dengan kenaikan konsumsi rumah tangga guru non ASN sekitar Rp120 ribu. Temuan ini memperlihatkan bahwa kebijakan subsidi pemerintah berkaitan dengan perbaikan kapasitas konsumsi guru, meskipun hubungannya bersifat moderat. Hasil regresi ini menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal pendidikan berhubungan langsung terhadap kehidupan sehari-hari guru non ASN. Misalnya, ketika guru memperoleh tambahan subsidi sebesar Rp1 juta, konsumsi rumah tangga seperti belanja bahan makanan, akan berpotensi meningkat sekitar Rp120 ribu. Tambahan ini dapat membantu menutup kebutuhan dasar yang sebelumnya tertunda atau dialihkan ke pos lain.

Dengan demikian, subsidi diperlukan sebagai instrumen pendukung yang memberikan tambahan ruang fiskal jangka pendek, terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang bersifat mendesak atau fluktuatif, menciptakan struktur dukungan yang komprehensif untuk meningkatkan daya beli, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, dan pada akhirnya mendukung produktivitas guru dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan secara optimal.

Perilaku berbelanja



Grafik 7. Perilaku belanja setelah mendapat tambahan penghasilan

Grafik memperlihatkan distribusi jawaban responden terkait perubahan frekuensi berbelanja di toko atau warung lokal setelah menerima tambahan penghasilan guru. Data menunjukkan bahwa 52,9% responden menyatakan ya, yakni mereka menjadi lebih sering berbelanja di toko/warung lokal. Sementara itu, 47,1% responden menyatakan tidak mengalami perubahan dalam frekuensi berbelanja.

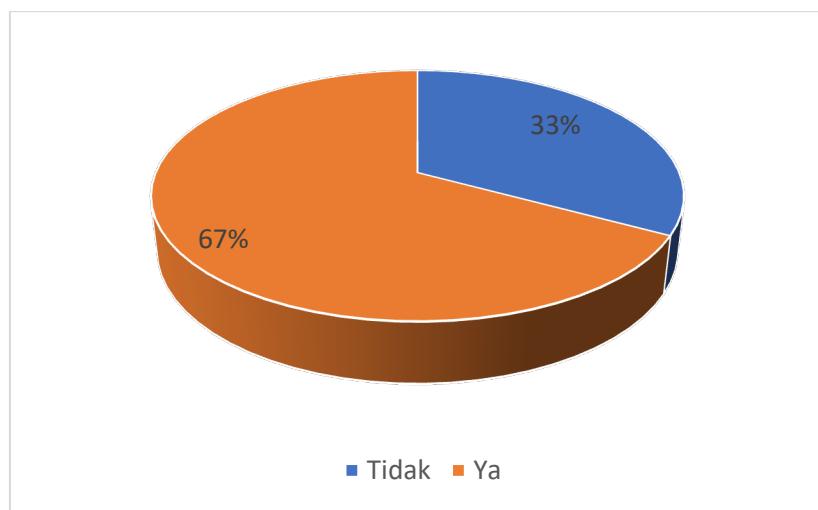
Dominasi respon "ya" meskipun dengan selisih yang relatif tipis mengindikasikan bahwa tambahan penghasilan memiliki kecenderungan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal. Dengan adanya peningkatan kapasitas daya beli, sebagian rumah tangga tampak lebih memilih mengalokasikan belanja pada sektor usaha mikro atau kecil di lingkungan sekitar. Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi perilaku yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan dapat memperluas pola konsumsi, termasuk pada barang yang sebelumnya dibeli dengan frekuensi lebih rendah.

Namun demikian, persentase responden yang menjawab "tidak" cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh responden tidak mengalami perubahan perilaku belanja meskipun pendapatan meningkat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain preferensi konsumsi yang sudah stabil, kecenderungan berbelanja di tempat yang dianggap lebih murah atau lebih lengkap (seperti minimarket atau pasar modern), atau pemanfaatan tambahan pendapatan untuk kebutuhan non-konsumtif seperti tabungan, pendidikan, atau menutup defisit pengeluaran sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan guru memiliki dampak positif namun tidak seragam terhadap penguatan aktivitas ekonomi lokal. Meski sebagian responden meningkatkan partisipasi mereka dalam ekosistem perdagangan lokal, sebagian lainnya tetap mempertahankan pola konsumsi yang sama. Dengan demikian, efek tambahan penghasilan terhadap dinamika ekonomi lokal bersifat moderat dan dipengaruhi oleh preferensi konsumsi serta kondisi sosial-ekonomi rumah tangga masing-masing.

Pengaruh tambahan penghasilan guru

Grafik di bawah menunjukkan persepsi responden mengenai sejauh mana tambahan penghasilan guru berpengaruh terhadap kemampuan mereka dalam membeli barang atau jasa yang sebelumnya sulit dijangkau. Hasilnya memperlihatkan bahwa mayoritas responden, yaitu 67%, menyatakan ya, mereka merasa tambahan penghasilan tersebut meningkatkan kemampuan finansial sehingga dapat mengakses barang atau layanan yang sebelumnya berada di luar jangkauan. Sementara itu, 33% responden menyatakan tidak, menunjukkan bahwa bagi sebagian kelompok tambahan penghasilan belum memberikan perubahan signifikan terhadap daya beli mereka.



Grafik 8. Pengaruh tambahan penghasilan terhadap pembelian barang/jasa

Dominasi jawaban “ya” mengindikasikan bahwa tambahan penghasilan memainkan peran penting dalam memperluas kapasitas konsumsi rumah tangga. Temuan ini sejalan dengan konsep marginal propensity to consume (MPC), yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah, cenderung langsung dialokasikan untuk peningkatan konsumsi, termasuk konsumsi barang atau jasa yang sebelumnya bersifat tersier atau tidak mendesak. Dengan kata lain, tambahan penghasilan memberikan ruang fiskal yang lebih besar, memungkinkan responden memenuhi kebutuhan atau keinginan yang sebelumnya tertunda karena keterbatasan finansial.

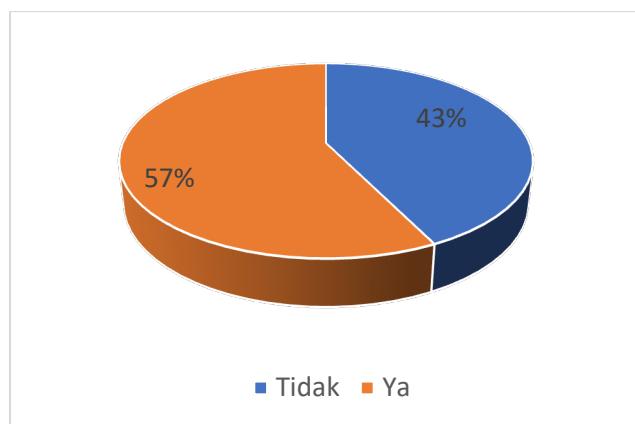
Namun demikian, sepertiga responden melaporkan bahwa tambahan penghasilan tidak berdampak pada kemampuan mereka untuk membeli barang atau jasa yang sulit dijangkau sebelumnya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan dasar yang masih rendah, besaran tambahan penghasilan yang mungkin tidak cukup signifikan untuk mengubah struktur konsumsi, atau adanya prioritas pengeluaran yang lebih mendesak seperti kebutuhan pokok, pendidikan anak, atau pembayaran utang. Dalam konteks ini, tambahan penghasilan lebih berfungsi sebagai penopang kestabilan ekonomi rumah tangga daripada pendorong peningkatan konsumsi.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa tambahan penghasilan guru memiliki dampak yang cukup kuat dalam meningkatkan daya beli sebagian besar responden, tetapi efek tersebut tidak bersifat universal. Variasi respons ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi awal dan kebutuhan prioritas rumah tangga dalam menganalisis efek program peningkatan penghasilan terhadap kesejahteraan individu maupun keluarga.

Perubahan pola menabung atau investasi kecil

Grafik menunjukkan tanggapan responden terkait perubahan pola menabung atau investasi kecil setelah menerima tambahan penghasilan guru. Hasil survei memperlihatkan bahwa 57% responden menjawab ya, mereka mengalami perubahan atau pergeseran perilaku keuangan menuju

peningkatan aktivitas menabung maupun investasi kecil. Sebaliknya, 43% responden menyatakan tidak mengalami perubahan dalam pola tersebut.



Grafik 9. Perumahan pola menabung/investasi setelah tambahan penghasilan

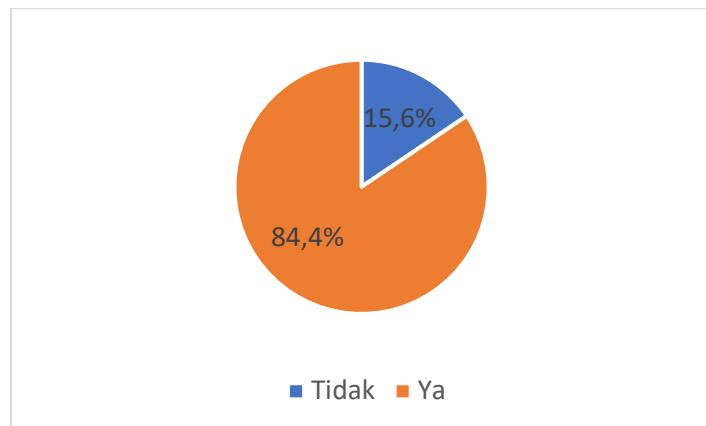
Dominasi jawaban “ya” menandakan bahwa tambahan penghasilan memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan sebagian besar responden untuk membangun cadangan finansial. Temuan ini relevan dengan teori perilaku keuangan rumah tangga yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan akan meningkatkan saving capacity, terutama ketika kebutuhan dasar telah relatif terpenuhi. Dengan adanya ruang finansial baru, responden cenderung menggunakan sebagian pendapatan tambahan untuk menabung sebagai upaya memperkuat ketahanan ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, sebagian responden juga mulai memanfaatkan pendapatan tambahan untuk melakukan investasi kecil, yang menunjukkan adanya kesadaran finansial dan orientasi jangka panjang yang meningkat.

Namun, persentase responden yang tidak mengalami perubahan sebesar 43% cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari responden masih belum mampu atau belum memilih untuk mengalokasikan tambahan penghasilan ke dalam tabungan atau investasi. Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini, antara lain besaran tambahan penghasilan yang mungkin belum cukup untuk menyisakan ruang tabungan setelah memenuhi kebutuhan dasar, tingginya tekanan pengeluaran rutin rumah tangga, atau preferensi konsumsi yang lebih dominan. Selain itu, sebagian responden mungkin berada pada kondisi finansial yang menuntut pendapatan tambahan digunakan untuk menutupi kekurangan atau utang sebelumnya, sehingga tidak terjadi peningkatan akumulasi aset finansial.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan guru memberikan dampak beragam terhadap perilaku keuangan responden. Sementara sebagian besar mulai menunjukkan perbaikan dalam kapasitas menabung dan investasi kecil, hampir separuh lainnya tetap berada pada kondisi keuangan yang belum memungkinkan perubahan tersebut. Data ini menegaskan pentingnya mempertimbangkan konteks ekonomi rumah tangga dan tingkat literasi finansial dalam menilai efektivitas peningkatan pendapatan terhadap penguatan ketahanan ekonomi keluarga.

Manfaat untuk kebutuhan mendesak

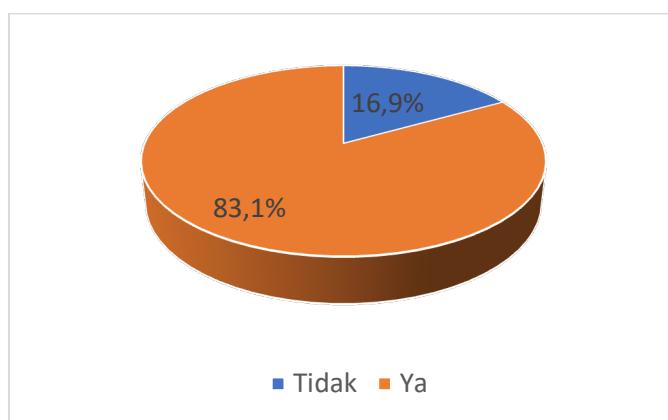
Sebagaimana terlihat dalam grafik, 84,4% responden menyatakan bahwa program tambahan penghasilan bagi guru memberikan manfaat dalam membantu mereka memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan maupun pendidikan anak. Sementara itu, sebanyak 15,6% responden menyatakan bahwa program tersebut tidak membantu dalam memenuhi kebutuhan mendesak tersebut.



Grafik 10. Manfaat tambahan penghasilan untuk kebutuhan mendesak

Kestabilan kondisi ekonomi keluarga

Grafik menunjukkan persepsi responden mengenai stabilitas kondisi ekonomi keluarga setelah menerima tambahan penghasilan sebagai guru. Mayoritas responden, yaitu sebesar 83,1%, menyatakan “Ya”, yang berarti mereka merasakan peningkatan stabilitas ekonomi keluarga sejak memperoleh tambahan pendapatan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tambahan penghasilan tersebut memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi rumah tangga, baik melalui pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengurangan tekanan finansial, maupun peningkatan kemampuan untuk mengelola pengeluaran secara lebih terencana.

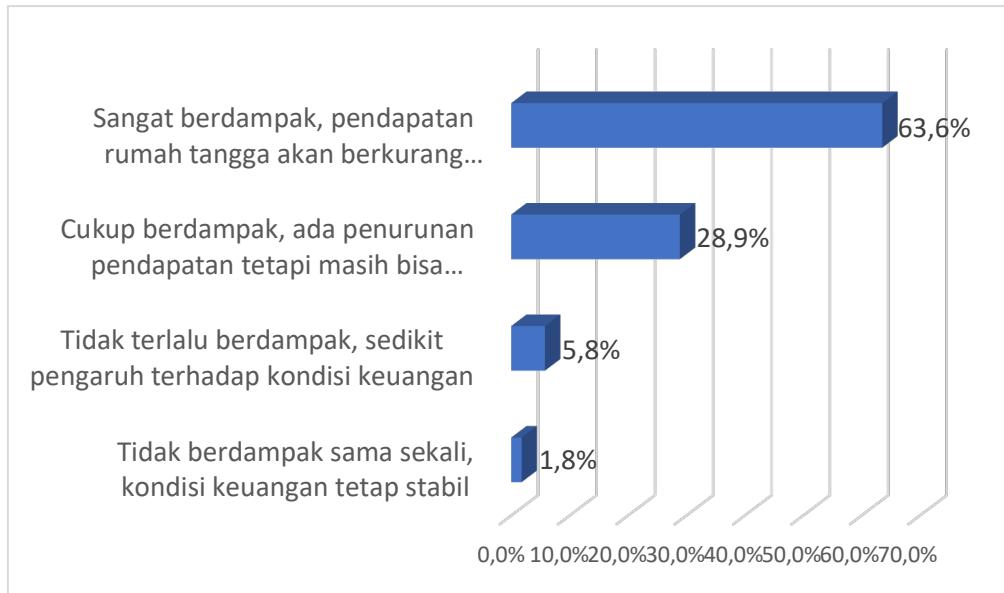


Grafik 11. Dampak tambahan penghasilan terhadap stabilitas ekonomi

Sebaliknya, sebesar 16,9% responden menyatakan “Tidak”, yang menunjukkan bahwa tambahan penghasilan yang diterima belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi keluarga bagi sebagian kecil guru. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti besaran tambahan penghasilan yang relatif kecil dibandingkan kebutuhan keluarga, kondisi ekonomi rumah tangga yang sudah memiliki beban finansial tinggi, atau adanya ketergantungan pada sumber pendapatan lain yang lebih dominan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa tambahan penghasilan guru memainkan peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi sebagian besar keluarga guru. Tingginya proporsi responden yang merasakan stabilitas ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan tersebut memiliki dampak positif yang nyata. Namun demikian, adanya persentase responden yang tidak merasakan perubahan signifikan memberikan indikasi bahwa besaran dan skema penyaluran tambahan penghasilan masih dapat ditingkatkan agar manfaatnya lebih merata di seluruh kelompok guru.

Dampak jika bantuan dihentikan



Grafik 12.Dampak jika tambahan penghasilan guru dihentikan

Berdasarkan hasil survei terhadap responden guru, terlihat bahwa penghentian tambahan penghasilan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kondisi keuangan rumah tangga. Mayoritas responden, yaitu 63,6%, menyatakan bahwa penghentian tambahan penghasilan akan sangat berdampak, ditandai dengan penurunan pendapatan rumah tangga yang cukup besar sehingga berpotensi mengganggu pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar guru memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber pendapatan tambahan di luar gaji pokok.

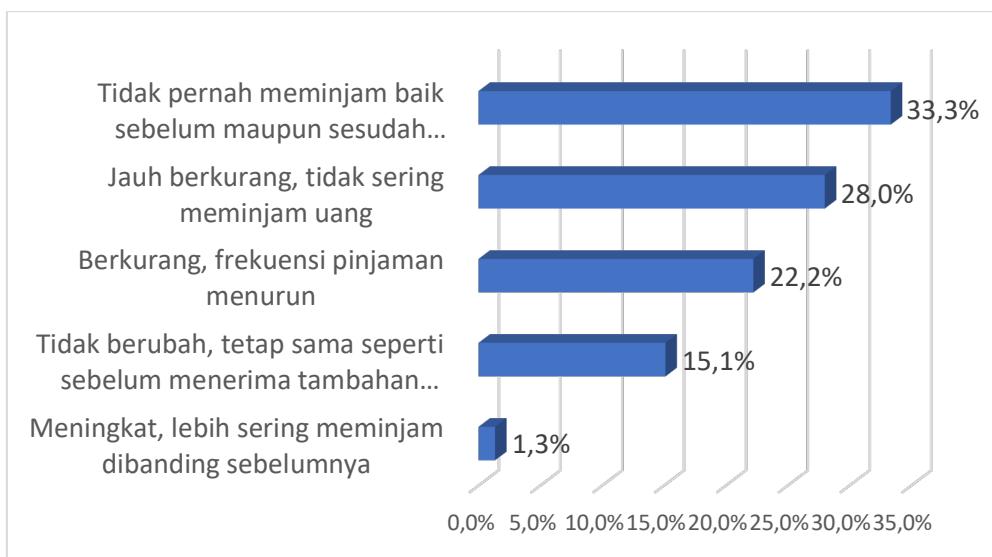
Selanjutnya, sebesar 28,9% responden melaporkan bahwa dampaknya cukup berdampak, yakni terjadi penurunan pendapatan namun kondisi keuangan rumah tangga masih dapat ditangani dengan penyesuaian tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada penghasilan tambahan, kelompok ini tetap merasakan tekanan finansial apabila pendapatan tambahan tersebut dihentikan.

Hanya 5,8% responden yang menyatakan bahwa penghentian penghasilan tambahan tidak terlalu berdampak, menandakan bahwa sebagian kecil guru memiliki struktur keuangan yang relatif lebih stabil atau memiliki sumber pendapatan lain yang cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga tanpa tambahan penghasilan tersebut.

Adapun 1,8% responden menyatakan tidak berdampak sama sekali, yang berarti kondisi keuangan mereka tetap stabil meskipun tanpa penghasilan tambahan. Proporsi ini sangat kecil, mengindikasikan bahwa kasus ketahanan keuangan tanpa pendapatan tambahan merupakan pengecualian.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan memegang peranan krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi mayoritas guru. Ketergantungan yang tinggi terhadap penghasilan tambahan mencerminkan bahwa gaji pokok yang diterima belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga secara optimal. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk mengevaluasi struktur kompensasi guru serta mempertimbangkan kebijakan pendukung untuk memperkuat kesejahteraan ekonomi mereka.

Frekuensi peminjaman uang



Grafik 13. Perumahan frekuensi peminjaman uang setelah tambahan penghasilan guru

Hasil survei mengenai perubahan frekuensi peminjaman uang (baik melalui lembaga formal maupun informal) setelah guru menerima tambahan penghasilan menunjukkan dinamika yang cukup beragam, namun secara umum mengarah pada peningkatan stabilitas keuangan rumah tangga. Kategori terbesar, yaitu 33,3% responden, menyatakan bahwa mereka tidak pernah meminjam uang baik sebelum maupun sesudah menerima tambahan penghasilan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sekelompok guru telah berada dalam kondisi keuangan yang relatif stabil, sehingga tambahan penghasilan tidak mengubah perilaku mereka dalam hal peminjaman.

Selanjutnya, 28,0% responden melaporkan bahwa frekuensi peminjaman mereka jauh berkurang, artinya tambahan penghasilan berperan signifikan dalam mengurangi ketergantungan terhadap hutang. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan pendapatan tersebut memberikan ruang likuiditas yang lebih besar, sehingga kebutuhan finansial dapat dipenuhi tanpa meminjam.

Sebanyak 22,2% responden menyatakan bahwa peminjaman mereka **berkurang**, meskipun tidak secara drastis. Kelompok ini tetap merasakan perbaikan kondisi finansial, namun kemungkinan masih menghadapi kebutuhan tertentu yang membuat peminjaman sesekali tetap diperlukan. Adapun 15,1% responden mengaku bahwa frekuensi peminjaman mereka tidak berubah sama sekali. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa tambahan penghasilan belum cukup kuat mempengaruhi pola pengeluaran atau struktur keuangan rumah tangga mereka, atau bahwa kebutuhan peminjaman bersifat rutin dan tidak terkait langsung dengan besaran pendapatan.

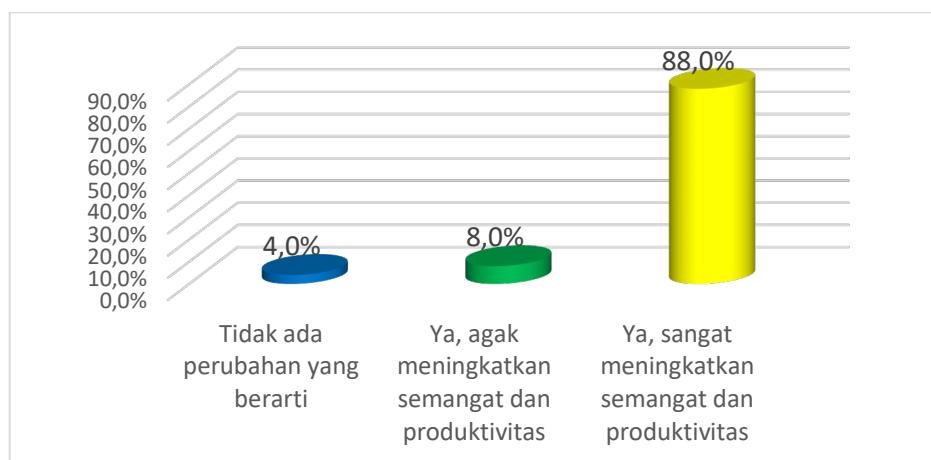
Menariknya, hanya 1,3% responden yang menyatakan bahwa frekuensi peminjaman mereka meningkat setelah menerima tambahan penghasilan. Meskipun jumlahnya kecil, fenomena ini dapat merefleksikan adanya perilaku adaptif tertentu, seperti peningkatan konsumsi setelah memperoleh tambahan, yang pada akhirnya justru mendorong kebutuhan untuk kembali meminjam. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tambahan penghasilan guru cenderung memberikan dampak positif terhadap pola peminjaman, terutama dengan menurunkan frekuensi peminjaman baik secara signifikan maupun moderat. Hal ini menguatkan asumsi bahwa tambahan pendapatan memiliki peran penting dalam meningkatkan ketahanan finansial serta mengurangi risiko ketergantungan terhadap hutang pada sebagian besar guru.

4.1.3 Produktivitas Kerja Penerima Program Bantuan

Pemberian tambahan penghasilan kepada guru Non-ASN baik dalam bentuk tunjangan khusus, insentif pendidikan, dan bantuan subsidi upah untuk meningkatkan pendapatan guru Non-ASN.

Tunjangan khusus guru (TKG) diberikan kepada guru sebagai kompensasi terhadap kesulitan hidup guru dalam melaksanakan tugas di daerah 3T: daerah terpencil, terluar, dan terdepan, serta daerah yang mengalami bencana. Sementara itu, pemberian subsidi upah (SU) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan hidup guru. Tujuan pemberian insentif pendidikan sedikit berbeda dengan pemberian TKG dan SU. Pemberian insetif pendidikan selain untuk menambah pendapatan dan kesejahteraan guru juga untuk mendorong peningkatan motivasi kerja guru.

Aspek ekonomi dan kesejahteraan menjadi prioritas dari program pemberian tambahan penghasilan guru Non-ASN. Walaupun demikian, pemberian bantuan tambahan penghasilan menjadi trigger peningkatan kinerja dan produktivitas guru di tempat mengajar. Tambahan penghasilan yang diterima dapat dimanfaatkan guru untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan pengembangan keprofesionalan guru. Peningkatan kinerja, produktivitas, maupun keprofesionalan guru dalam melaksanakan tugas akan berdampak pada mutu pendidikan di sekolah tempat mereka bertugas. Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dapat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan secara nasional.

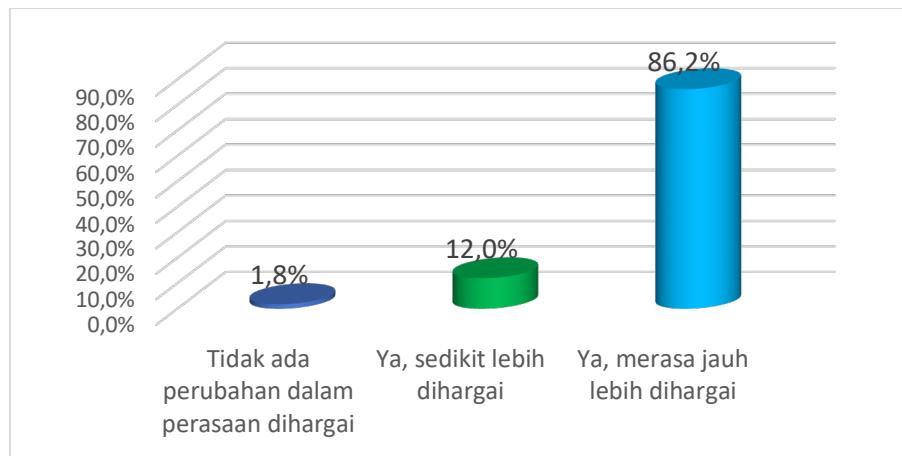


Grafik di atas menyajikan persepsi responden mengenai dampak penerimaan tambahan penghasilan guru terhadap peningkatan semangat dan produktivitas kerja di sekolah. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden (88,0%) menyatakan bahwa tambahan penghasilan sangat meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa insentif finansial memiliki pengaruh yang kuat sebagai faktor motivasional bagi mayoritas guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya.

Selanjutnya, 8,0% responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan agak meningkatkan semangat dan produktivitas kerja. Kelompok ini menunjukkan adanya dampak positif, meskipun tidak terlalu signifikan, yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar aspek finansial. Adapun 4,0% responden menyatakan bahwa tidak terdapat perubahan yang berarti, yang mengisyaratkan bahwa bagi sebagian kecil guru, tambahan penghasilan bukan merupakan determinan utama dalam memengaruhi motivasi dan produktivitas kerja.

Secara analitis, distribusi jawaban ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian tambahan penghasilan guru berpotensi efektif dalam meningkatkan kinerja kerja, khususnya dari aspek semangat dan produktivitas. Namun demikian, keberadaan responden yang merasakan dampak terbatas atau tidak merasakan perubahan sama sekali menegaskan bahwa peningkatan kinerja guru juga dipengaruhi oleh faktor non-finansial, seperti iklim kerja sekolah, beban kerja, dukungan kepemimpinan, serta kesempatan pengembangan profesional. Oleh karena itu, kebijakan tambahan penghasilan akan lebih optimal apabila diimplementasikan secara terpadu dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan dan manajemen pendidikan secara menyeluruh.

Penghargaan



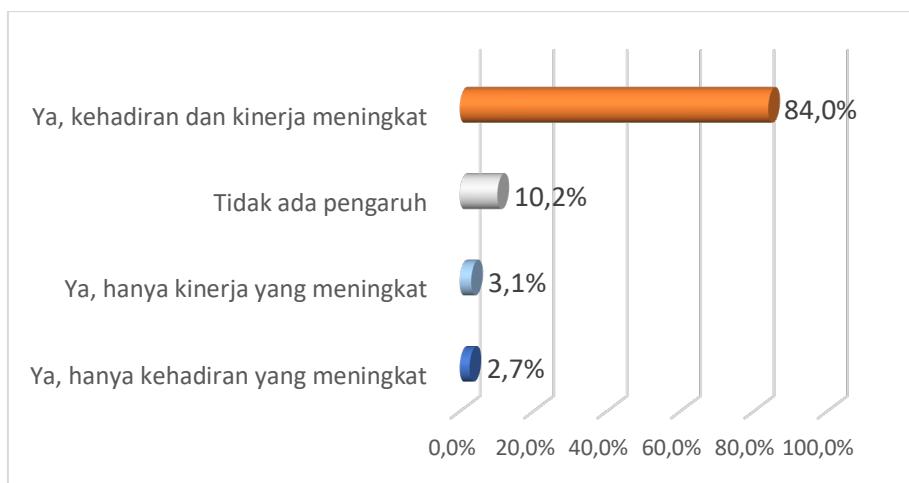
Persepsi guru terkait rasa penghargaan yang dirasakan setelah menerima tambahan penghasilan dari pemerintah. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas responden (86,2%) menyatakan merasa jauh lebih dihargai, yang mengindikasikan bahwa kebijakan tambahan penghasilan dipersepsikan secara kuat sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi pemerintah terhadap peran dan kontribusi guru.

Selanjutnya, 12,0% responden menyatakan merasa sedikit lebih dihargai, yang menunjukkan adanya dampak positif meskipun dengan intensitas yang lebih moderat. Sementara itu, hanya 1,8% responden yang menyatakan tidak ada perubahan dalam perasaan dihargai, mengindikasikan bahwa kelompok ini menilai tambahan penghasilan belum cukup merepresentasikan bentuk penghargaan yang mereka harapkan atau belum menyentuh aspek non-material yang dianggap penting.

Secara analitis, temuan ini menegaskan bahwa tambahan penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi simbolik yang signifikan dalam membangun rasa dihargai dan pengakuan profesional guru. Rasa dihargai ini berpotensi berkontribusi pada peningkatan motivasi intrinsik, komitmen kerja, dan loyalitas terhadap institusi pendidikan. Namun demikian, keberadaan sebagian kecil responden yang tidak merasakan perubahan menunjukkan pentingnya melengkapi kebijakan finansial dengan strategi penghargaan non-finansial, seperti peningkatan partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, pengembangan karier, serta penguatan dukungan institusional, agar rasa dihargai dapat dirasakan secara lebih merata.

Kehadiran dan Kinerja

Grafik di bawah menunjukkan bahwa persepsi responden mengenai pengaruh tambahan penghasilan guru terhadap kehadiran dan kinerja di tempat kerja. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar responden (84,0%) menyatakan bahwa tambahan penghasilan berpengaruh positif terhadap kehadiran sekaligus kinerja. Temuan ini mengindikasikan bahwa insentif finansial tidak hanya mendorong peningkatan motivasi kerja, tetapi juga berimplikasi pada aspek disiplin kehadiran dan kualitas pelaksanaan tugas.

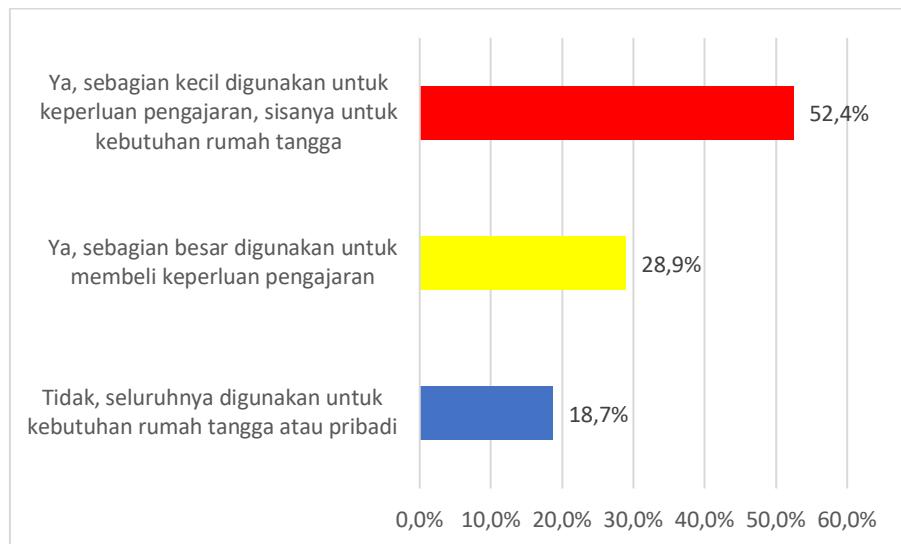


Selanjutnya, 10,2% responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan tidak memberikan pengaruh terhadap kehadiran maupun kinerja. Proporsi ini menunjukkan bahwa bagi sebagian guru, kinerja dan kedisiplinan kerja lebih ditentukan oleh faktor lain di luar aspek finansial, seperti komitmen profesional, etos kerja personal, atau kondisi lingkungan kerja.

Adapun responden yang menyatakan bahwa tambahan penghasilan hanya berpengaruh pada salah satu aspek relatif sangat kecil, yaitu 3,1% yang menyebutkan peningkatan hanya pada kinerja, dan 2,7% yang menyatakan peningkatan hanya pada kehadiran. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak tambahan penghasilan cenderung bersifat simultan, memengaruhi kehadiran dan kinerja secara bersamaan, bukan secara parsial.

Secara analitis, distribusi jawaban tersebut menegaskan bahwa kebijakan tambahan penghasilan guru berpotensi menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kinerja organisasi sekolah secara keseluruhan, terutama melalui penguatan disiplin kerja dan produktivitas. Namun demikian, keberadaan responden yang tidak merasakan pengaruh menunjukkan pentingnya pendekatan kebijakan yang komprehensif, dengan mengombinasikan insentif finansial dan intervensi non-finansial, seperti perbaikan manajemen sekolah, iklim kerja yang kondusif, serta sistem evaluasi dan penghargaan kinerja yang transparan dan berkeadilan.

Pemenuhan Alat Pengajaran



Grafik tersebut menunjukkan pola pemanfaatan tambahan penghasilan guru, khususnya terkait penggunaannya untuk membeli keperluan pengajaran. Hasil survei memperlihatkan bahwa 52,4% responden menyatakan sebagian kecil tambahan penghasilan digunakan untuk keperluan

pengajaran, sementara sisanya dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat pemanfaatan dana untuk mendukung aktivitas pembelajaran, kebutuhan ekonomi rumah tangga masih menjadi prioritas utama bagi sebagian besar guru.

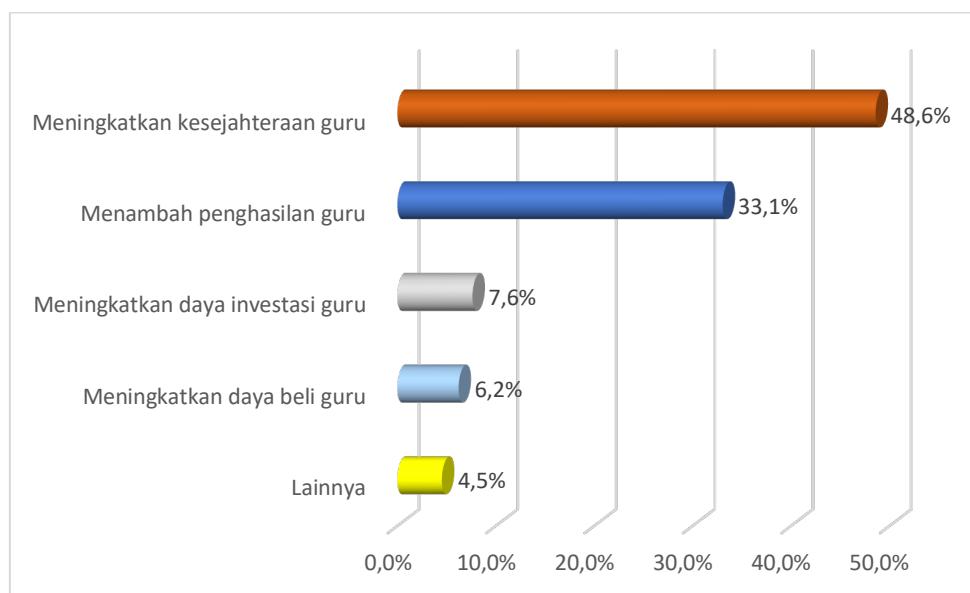
Selanjutnya, 28,9% responden menyatakan bahwa sebagian besar tambahan penghasilan digunakan untuk membeli keperluan pengajaran. Proporsi ini menunjukkan adanya komitmen yang cukup signifikan dari sebagian guru untuk mengalokasikan insentif finansial guna menunjang proses pembelajaran, seperti pengadaan bahan ajar, alat bantu pembelajaran, atau perlengkapan kelas.

Di sisi lain, 18,7% responden menyatakan bahwa tambahan penghasilan tidak digunakan sama sekali untuk keperluan pengajaran, melainkan seluruhnya dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga atau keperluan pribadi. Temuan ini mencerminkan kondisi ekonomi guru yang masih menuntut pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas, sehingga penggunaan dana untuk kepentingan profesional menjadi terbatas.

4.1.4 Tata Kelola Program

Implementasi Program pemberian bantuan penghasilan guru Non-ASN dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana program jika terpenuhi aspek regulasi, juknis, dan pengawasan pelaksanaan program. Program pemberian bantuan penghasilan guru Non-ASN diatur berdasarkan sejumlah regulasi dan petunjuk teknis (Juknis) program. Pada tahun 2025 pemberian tambahan penghasilan guru Non-ASN berdasarkan ketentuan berikut: 1) Persesjen Kemdikdasmen No. 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi Dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025; 2) Persesjen Kemdikdasmen No. 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Insentif Bagi Pendidik Nonaparatur Sipil Negera Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Tahun Anggaran 2025; dan 3) Persesjen Kemdikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pendidik Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal Tahun Anggaran 2025.

Pengetahuan Tentang Program Tambahan Penghasilan Yang Diterima



Grafik 14.Pemahaman responden tentang tujuan program tambahan penghasilan guru

Dari grafik di atas, terlihat bahwa mayoritas responden memahami bahwa tujuan utama dari program pemberian tambahan penghasilan kepada guru honorer non-ASN/P3K adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan guru. Hal ini tercermin dari 48,6% responden yang memilih opsi tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa para responden melihat program tersebut sebagai bentuk dukungan langsung terhadap kondisi sosial-ekonomi guru, khususnya mereka yang berada dalam kategori honorer dan belum mendapatkan penghasilan tetap yang memadai.

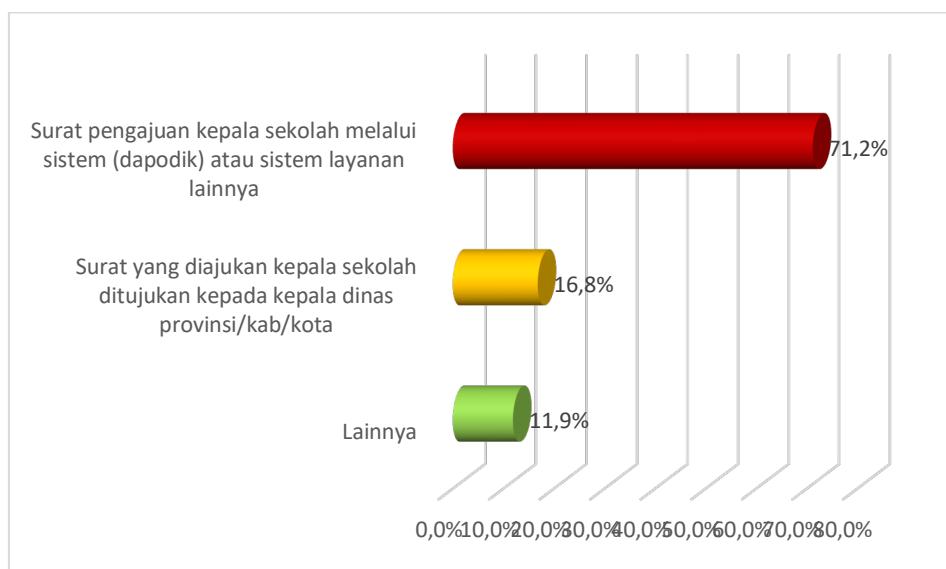
Selanjutnya, 33,1% responden berpendapat bahwa tujuan program ini adalah untuk menambah penghasilan guru. Jawaban ini memperkuat pemahaman bahwa tambahan insentif tersebut dipandang sebagai langkah strategis untuk memperbaiki kondisi pendapatan guru honorer yang selama ini sering dinilai tidak sebanding dengan beban kerja serta kontribusi mereka dalam proses pendidikan.

Selain itu, terdapat 7,6% responden yang menilai bahwa pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan daya investasi guru. Pandangan ini menunjukkan bahwa sebagian kecil responden melihat insentif tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan investasi produktif, misalnya untuk pendidikan, keterampilan, atau usaha kecil.

Kemudian, 6,2% responden memahami bahwa program ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli guru, yang berarti program tersebut dianggap membantu guru dalam memenuhi kebutuhan hidup secara lebih layak di tengah meningkatnya biaya ekonomi. Terakhir, 4,5% responden memilih kategori lainnya, yang mengindikasikan adanya pemahaman tambahan di luar opsi yang telah disediakan, meskipun proporsinya relatif kecil.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa para responden memiliki persepsi yang kuat bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada guru honorer merupakan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa program tersebut dinilai relevan dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi guru honorer, yang pada akhirnya diharapkan memberikan dampak terhadap kualitas pendidikan.

Pengajuan Penerima Tambahan Penghasilan



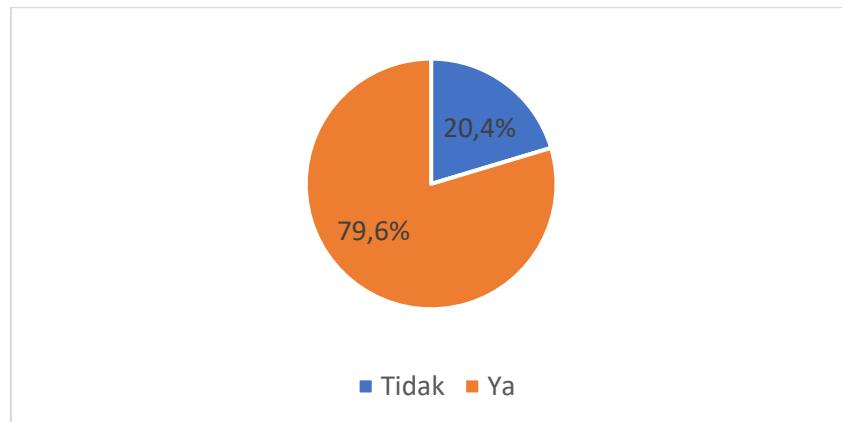
Grafik 15. Media/moda pengajuan penerima bantuan tambahan penghasilan

Hasil survei menunjukkan bahwa 71,2% responden menyatakan bahwa surat pengajuan dari kepala sekolah yang disampaikan melalui sistem (Dapodik) atau sistem layanan lainnya merupakan moda atau media utama dalam proses pengajuan nama guru penerima bantuan tambahan penghasilan. Sementara itu, 16,8% responden melaporkan bahwa pengajuan dilakukan melalui surat resmi yang diajukan oleh kepala sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.

Adapun 11,9% responden lainnya menyebutkan media atau mekanisme pengajuan yang berbeda dari dua moda tersebut.

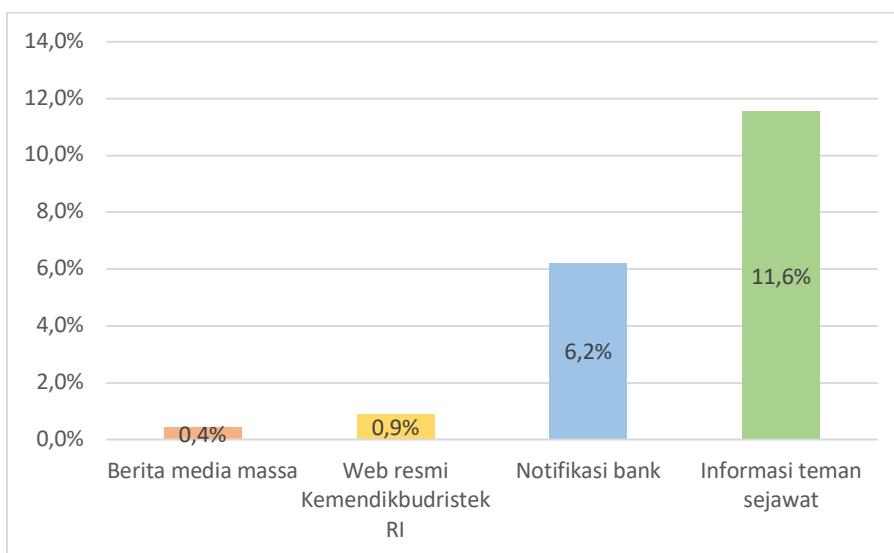
Penyaluran Dana Tambahan Penghasilan

Berdasarkan grafik di bawah, terlihat bahwa mayoritas guru, yaitu sebesar 79,6%, memperoleh informasi mengenai waktu penyaluran bantuan tambahan penghasilan secara resmi melalui saluran yang ditetapkan oleh pihak berwenang. Sementara itu, 20,4% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui informasi tersebut.



Grafik 16. Informasi resmi tentang waktu penyaluran bantuan tambahan penghasilan guru

Lebih lanjut, bagi responden yang menyatakan tidak mengetahui informasi penyaluran secara resmi, dilakukan pertanyaan lanjutan mengenai sumber informasi yang mereka peroleh terkait penyaluran pembayaran dana bantuan tambahan penghasilan guru. Hasilnya menunjukkan bahwa 11,6% mengetahui informasi tersebut dari rekan sejawat, 6,2% melalui notifikasi dari pihak bank, 0,9% dari situs resmi Kemendikbudristek RI, dan 0,4% dari berita di media massa. Temuan ini sebagaimana ditampilkan pada grafik berikut.



Grafik 17. Sumber informasi lain penyaluran tambahan penghasilan guru

Ketersediaan Petunjuk Teknis pelaksanaan program memudahkan dalam tata kelola program, baik pelaksana maupun sasaran penerima program. Juknis memberikan informasi tentang program, persyaratan pemerolehan bantuan, prosedur pemerolehan bantuan, waktu penyaluran, cara penyaluran, besaran dana bantuan, struktur pelaksana program, dan pengawasan program.

Informasi yang ada dalam petunjuk teknis program tambahan penghasilan menjadi pedoman baik untuk pelaksana maupun penerima manfaat program, yaitu guru Non-ASN. Secara umum, ketersediaan regulasi dan Juknis Program Pemberian Tambahan Penghasilan dibutuhkan oleh guru sasaran penerima program. Sekitar 83,4% guru menyatakan sangat membutuhkan adanya regulasi dan 75,3% guru menyatakan sangat membutuhkan Petunjuk Teknis Program Pemberian Tambahan Penghasilan.

Tata cara pemerolehan bantuan tambahan penghasilan sangat penting diketahui oleh guru sasaran penerima program. Guru perlu memahami tentang persyaratan dan prosedur untuk mendapat bantuan tambahan penghasilan. Persyaratan pemerolehan bantuan tambahan penghasilan dalam bentuk TKG, insentif, dan SU telah diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikdasmen. Persyaratan untuk memperoleh bantuan tambahan penghasilan berbeda-beda untuk tiap bentuk bantuan yang diterima. Demikian pula prosedur untuk memperoleh bantuan juga berbeda prosedurnya.

Persyaratan memperoleh bantuan tambahan penghasilan guru Non-ASN tidak sulit. Demikian pula prosedur pemerolehan bantuan tidak berbelit. Menurut 55% lebih penilaian guru penerima manfaat program bahwa tata cara pemerolehan dan prosedur memperoleh bantuan dinilai mudah. Selain itu, ada 28% guru yang menilai tata cara pemerolehan bantuan tambahan penghasilan sangat mudah, dan 30% lebih menyatakan prosedur pemerolehan bantuan tambahan sangat mudah.

Waktu penyaluran dan cara penyaluran dana bantuan tambahan penghasilan dinilai positif oleh guru penerima manfaat program. Sekitar 55% lebih guru menilai penyaluran dilakukan secara tepat waktu. Tata cara penyaluran dana bantuan yang telah berjalan dinilai guru perlu dipertahankan. Menurut 63,5% guru, tata cara penyaluran dana bantuan perlu dipertahankan dan 43,2% menyatakan perlu ada perbaikan.

Dana bantuan tambahan penghasilan yang diterima guru Non-ASN membantu guru dalam memenuhi kebutuhan. Sebagian besar atau 80,7% guru menilai dana bantuan tambahan penghasilan sangat membantu kebutuhan guru. Pemanfaatan dana bantuan yang diterima guru dalam Juknis tidak diatur. Walaupun demikian sekitar hampir 50% guru penerima manfaat program sangat diperlukan pengawasan dalam pemanfaatan dana bantuan. Hanya sekitar 13,5% guru yang menyatakan tidak diperlukan pengawasan.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Program Revitalisasi Sekolah

1. Program Revitalisasi Satuan Pendidikan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Setiap kenaikan 1 persen alokasi dana revitalisasi sekolah berkorelasi / berdampak pada peningkatan PDRB provinsi sebesar 0,527 persen, dengan tingkat signifikansi yang sangat kuat ($p = 0,003$). Hal itu berarti jika pada sebuah provinsi memiliki PDRB sekitar Rp100 triliun, maka program revitalisasi berkorelasi / berdampak pada kenaikan PDRB sebesar Rp527 miliar. Temuan ini menunjukkan bahwa investasi pemerintah pada sarana pendidikan telah berperan sebagai stimulus fiskal berbasis pendidikan.
2. Dampak revitalisasi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal tersebut tersebut terjadi melalui tiga hal:
 - a. Pembelian bahan baku material bangunan, dimana berdasarkan survei yang dilakukan oleh LP3ES, 82% bahan bangunan yang digunakan untuk program revitalisasi dibeli diwilayah sekitar sekolah penerima program.
 - b. Trickle Down Effect terhadap tenaga kerja lokal, dimana 62% tenaga kerja dari program revitalisasi berasal dari masyarakat sekitar dengan gaji-gaji rata-rata 100.000 sd 150.000 per hari.
 - c. Peningkatan pendapatan UMKM, dimana 37% dari UMKM disekitar sekolah mendapatkan peningkatan pendapatan kurang lebih sekitar Rp. 100.000 per hari
3. Selain berdampak pada ekonomi daerah, revitalisasi sekolah juga efektif dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi sekolah penerima bantuan program. Setiap kenaikan 1 persen dana revitalisasi berkorelasi / berdampak pada peningkatan pemenuhan kebutuhan revitalisasi sekolah sebesar sekitar 0,95 persen
4. Pemenuhan kebutuhan tersebut, 46,9% merupakan kegiatan rehab ruangan kelas sekaligus pembangunan sarpras baru, 23% rehap ruang kelas tanpa pembangunan sarpras baru, rehap ruang laboratorium 9,7%, rehap ruang kantor 8,4%, rehab ruang praktikum 6,2%, rehap ruang ibadah 3,5% dan lainnya.

Program Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN

1. Program Bantuan Tambahan Penghasilan Guru Non-ASN berkorelasi /dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi guru. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa subsidi dan honor guru berkorelasi/ berdampak positif dan signifikan terhadap pengeluaran rumah tangga. Setiap kenaikan satu satuan nilai subsidi berdampak pada pengeluaran rumah tangga guru rata-rata sebesar 0,3177 satuan. Jika koefisien 0,3177 diinterpretasikan dalam contoh kenaikan subsidi sebesar Rp1 juta rupiah, maka setiap kenaikan subsidi sebesar Rp1 juta akan berdampak pada peningkatan pengeluaran rumah tangga guru rata-rata sekitar Rp317.700, dengan asumsi variabel honor tetap
2. Pengeluaran tersebut disebabkan karena, 92% guru penerima bantuan tersebut menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengalami peningkatan pendapatan sebesar kurang dari 35%, sebagian lainnya mengalami peningkatan pendapatan antara 35% sampai dengan 70%.
3. Peningkatan pengeluaran yang disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan tersebut, 27% digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, 11,8% untuk transportasi, 11,3% untuk pembelian buku / sumber belajar, 10,5% untuk jajan anak, dan lainnya
4. Selain itu, 57% penerima program tersebut menyatakan terjadi perubahan pola menabung atau investasi kecil yang semula berada pada prioritas ke 6 ketika menerima pertama kali bantuan

- menjadi prioritas ke 4 (terjadi kenaikan dua tingkat prioritas) ketika menerima bantuan ketiga kali.
5. Karena terjadinya peningkatan kesejahteraan diatas, 88% guru penerima bantuan menyatakan peningkatan semangat dan produktivitas kerja. 86,2% menyatakan lebih dihargai oleh pemerintah dan 84% menyatakan peningkatan kehadiran di sekolah.

5.2. Rekomendasi

1. Temuan empiris ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah untuk melanjutkan dan memperkuat intervensi fiskal melalui skema subsidi sebagai dukungan pendapatan tambahan yang menopang daya beli guru secara berkelanjutan. Penguatan skema juga dapat berdampak positif tidak hanya pada kondisi ekonomi rumah tangga guru, tetapi juga pada peningkatan motivasi, kinerja, dan kualitas layanan pendidikan karena faktor kesejahteraan terbukti berhubungan erat dengan produktivitas kerja. Hasil penelitian juga membuka peluang bagi pemerintah untuk mengadopsi pendekatan subsidi berbasis kebutuhan (*need-based scheme*). Guru non ASN dengan pendapatan relatif lebih rendah, tanggungan keluarga besar, atau bertugas di wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan dapat menjadi prioritas penerima subsidi yang lebih besar. Pendekatan ini dapat meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus menghadirkan pemerataan kesejahteraan tenaga pendidik secara lebih adil.
2. Revitalisasi sekolah terbukti berhubungan positif terhadap PDRB. Hasil ini dapat menjadi justifikasi bahwa investasi pendidikan bukan hanya berperan dalam peningkatan sektor sosial, tetapi juga mesin pertumbuhan yang berperan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing daerah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk: (1) memperluas alokasi anggaran revitalisasi sekolah secara merata ke provinsi dengan indeks pembangunan pendidikan rendah, (2) mengintegrasikan revitalisasi fisik sekolah dengan peningkatan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru, dan (3) menyinergikan program pendidikan dengan kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan berkualitas. Dengan demikian, kebijakan revitalisasi sekolah diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Lampiran

KUESIONER SEKOLAH REVITALISASI SARANA PRASARANA SEKOLAH

I. IDENTITAS PENGISI KUESIONER

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala sekolah/ wakil kepala sekolah/ lainnya:
3. NUPTK :
4. No. Mobile phone :

II. IDENTITAS SEKOLAH

5. Nama sekolah :
6. NIS :
7. Alamat sekolah : Jl.....RT/RW.....
Desa/Kel.....
Kecamatan.....
Kab/Kota..... Kode pos.....
Provinsi.....
8. No. Telepon :
9. Status akreditasi : A/ B/ C

III. KEADAAN GURU DAN SISWA

10. Keadaan Guru

No.	Keterangan Guru	Jumlah	Jumlah Total
1.	Status Kepegawaian	PNS	
		PPPK (P3K)	
		Honorer	
2.	Pendidikan Guru	SMA/Sederajat	
		Diploma	
		S1	
		S2	
		S3	
3.	Guru ikut PPG	Lulus PPG	
		Masih pendidikan PPG	
4.	Tunjangan Sertifikasi Guru	Guru yang mendapat	
		Guru yang tidak mendapat	
5	Jumlah murid	Laki-laki	

		Perempuan		
--	--	-----------	--	--

IV. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA (FISIK/BANGUNAN SEKOLAH)

12. Kepemilikan Tanah

- a. Status tanah : milik sendiri bersertifikat/ milik sendiri belum bersertifikat/ sewa
- b. Luas tanah : P=..... x L=..... =m²
- c. Luas bangunan :m²

13. Keadaan Bangunan

No.	Jenis Bangunan/Ruang	Ketersediaan		Kondisi & Jumlah			Jumlah
		Ada	Tidak ada	Baik	Sedang	Rusak	
1.	Ruang kelas						
2.	Ruang kantor guru						
3.	Ruang tata usaha						
4.	Ruang UKS						
5.	Ruang bermain						
6.	Musholla/ruang ibadah						
7.	Lapangan upacara/olahraga						
8.	Ruang perpustakaan						
9.	Kantin						
10.	Ruang Laboratorium						
11.	Gudang						

V. BANTUAN DANA REVITALISASI SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

14. Berapa kali sekolah memperoleh bantuan dana revitalisasi sarana dan prasarana?

15. Berapa total dana revitalisasi yang disetujui?

16. Berapa jumlah dana revitalisasi yang telah diterima?

17. Jenis bantuan revitalisasi yang diterima (bisa lebih dari satu jawaban):

- Rehab/perbaikan ruang kelas
- Rehab/perbaikan ruang kantor
- Rehab/perbaikan ruang laboratorium
- Rehab/perbaikan ruang praktik/workshop
- Rehab/perbaikan ruang/gedung perpustakaan
- Rehab/perbaikan ruang ibadah (musholla/masjid)
- Rehab/perbaikan ruang/gedung perpustakaan
- Rehab/perbaikan ruang/gedung lainnya:

18. Klasifikasi kerusakan bangunan : Rusak ringan/ Rusak sedang/ Rusak berat

19. Luas ruang/gedung yang diperbaiki/rehab:m²

VI. MEKANISME PENERIMAAN BANTUAN DANA REVITALISASI SARPRAS

20. Bagaimana cara sekolah dapat memperoleh bantuan dana revitalisasi sarpras?

- Mengajukan bantuan dana melalui system informasi yang disediakan kemdikdasmen.
- Mengajukan bantuan dana ke Dinas Pendidikan
- Mendapat penunjukkan oleh Dinas Pendidikan
- Lainnya:

21. Sebelum sekolah Bapak/Ibu memperoleh dana bantuan revitalisasi sarpras, apakah dilakukan visitasi oleh pihak Dinas Pendidikan atau petugas yang ditunjuk?

- Ya/ Tidak

22. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui bahwa sekolah Bapak/Ibu memperoleh dana bantuan revitalisasi?

- Sistem informasi yang disediakan kemdikdasmen
- Dinas Pendidikan setempat
- Pengawas sekolah
- Lainnya:

23. Berapa lama waktu tunggu dari Bapak/Ibu mengajukan dana bantuan revitalisasi sampai Bapak/Ibu mengetahui pengajuan tersebut diterima?

23. Apakah Bapak/Ibu membuat laporan penggunaan dana bantuan revitalisasi?

- Ya/ Tidak

23. b. Jika Ya, berapa kali laporan tersebut dibuat?

23. c. Laporan yang Bapak/Ibu buat disampaikan kepada:

VII. PEMANFAATAN DANA REVITALISASI SARPRAS

24. Jenis pekerjaan revitalisasi sarpras

- Swakelola tanpa melibatkan komite sekolah
- Swakelola dengan melibatkan komite sekolah
- Lelang
- Lainnya:

25. Pekerjaan rehab/pembangunan:

- a. Penanggung jawab pekerjaan :
- b. Bendahara :
- c. Jumlah pekerja :
- d. Jumlah hari kerja/pengerjaan :

26. Pembiayaan rehab/pembangunan

- a. Jumlah total dana yang dikeluarkan : Rp.....
- b. Jumlah biaya bahan bangunan : Rp.....
- c. Jumlah biaya tukang : Rp.....
- d. Jumlah biaya transportasi : Rp.....
- e. Jumlah biaya konsumsi : Rp.....
- f. Jumlah biaya lain-lain : Rp.....

27. Rekap dana

- a. Dana bantuan yang diperoleh : Rp.....
- b. Dana bantuan yang dikeluarkan : Rp.....
- c. Sisa dana bantuan : Rp.....

28. Mitra Bahan Bangunan

- a. Nama mitra (1) bahan bangunan :
- b. Alamat mitra bahan bangunan :
- c. Nama mitra (2) bahan bangunan :
- d. Alamat mitra bahan bangunan :
- e. Nama mitra (3) bahan bangunan :
- f. Alamat mitra bahan bangunan :

29. Mitra Pekerja/Tukang

- a. Nama pekerja (1) :
- b. Alamat pekerja :
- c. Nama pekerja (2) :
- d. Alamat pekerja :
- e. Nama pekerja (3) :
- f. Alamat pekerja :
- g. Nama pekerja (4) :
- h. Alamat pekerja :
- i. Nama pekerja (5) :
- j. Alamat pekerja :

VIII. REVITALISASI

30. Berapa persentase nilai pengadaan yang dibeli dari pemasok dalam kabupaten/kota yang sama (%)?.....%

31. Berapa total jumlah hari kerja (orang/hari) yang tercipta selama pelaksanaan proyek?.....orang/hari

32. Perkiraan berapa persen tenaga kerja proyek berasal dari warga desa/kelurahan setempat (%)?.....%

33. Berapa jumlah pekerja perempuan yang dipekerjakan untuk proyek?.....orang

34. Apakah sekolah menggunakan kontraktor lokal atau perusahaan dari luar?

- Lokal
- Luar Daerah

35. Sebelum dan setelah revitalisasi, berapa rata-rata kehadiran guru dan siswa (%)?

Sebelum:%

Sesudah:%

36. Apakah pendapatan sekolah (mis. sewa ruang, kantin) berubah setelah revitalisasi?

- Meningkat
- Tidak berubah
- Menurun

37. Apakah ada estimasi biaya pemeliharaan tahunan tambahan akibat fasilitas baru?

- Ya, Rpper tahun
- Tidak

38. Apakah terdapat keterlambatan pencairan yang berdampak pada proyek?

- Ya
- Tidak

KUESIONER DAMPAK REVITALISASI SARANA PRASARANA SEKOLAH

(PIHAK LUAR SEKOLAH)

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Alamat :
4. No. Mobile phone :
5. Jenis responden :

- Rumah Tangga Sekitar Sekolah
- Pelaku UMKM / Pedagang Lokal
- Kontraktor / Pengawas Proyek / Vendor
- Pekerja / Buruh
- Suplier Bahan Bangunan

A. Rumah Tangga Sekitar Sekolah

39. Apakah ada anggota rumah tangga yang bekerja pada proyek revitalisasi?

- Ya
- Tidak

40. Jika ya, berapa jumlah anggota yang bekerja?

41. Berapa rata-rata upah per hari yang diterima (Rp/hari)?

42. Apakah pendapatan rumah tangga berubah selama/sesudah proyek?

- Meningkat ____ % / Rp ____
- Tidak berubah
- Menurun ____ % / Rp ____

43. Apakah pengeluaran konsumsi rumah tangga berubah selama/sesudah proyek?

- Meningkat
- Tidak berubah
- Menurun

44. Pendapatan hasil bekerja pada proyek revitalisasi digunakan untuk apa saja?

45. Apakah revitalisasi mempengaruhi keputusan Bapak/Ibu untuk menyekolahkan anak di Sekolah ini?

- Ya, jelaskan: _____
- Tidak

8. Apakah hasil pendapatan dari proyek revitalisasi ada yang ditabung / diinvestasikan?

- Ya, berapa nilainya: _____
- Tidak

B. Pelaku UMKM / Pedagang Lokal

1. Apakah Bapak/Ibu pernah menjadi pemasok barang/jasa untuk proyek revitalisasi?
 Ya
 Tidak
2. Jika ya, berapa nilai penjualan/kontrak yang diterima (Rp)?
Rp _____
3. Apakah proyek revitalisasi ini meningkatkan penjualan Bapak/Ibu?
 Ya
 Tidak
4. Berapa rata-rata omzet per bulan sebelum proyek (Rp)?
5. Berapa rata-rata omzet per bulan setelah proyek (Rp)?
6. Apakah adanya revitalisasi berdampak pada peningkatan usaha di masa mendatang (pasca revitalisasi)?
 Sangat meningkat
 Sedikit meningkat
 Tidak berdampak
 Justru menurun

C. Kontraktor / Pengawas Proyek / Vendor

1. Berapa nilai kontrak revitalisasi (Rp)?
Rp _____
2. Berapa durasi kontrak (bulan)?
_____ bulan
3. Berapa total orang-hari yang dikerahkan selama proyek?
_____ orang-hari
4. Berapa persentase bahan/material yang dibeli dari pemasok lokal/sekitar wilayah proyek?
_____ %
5. Berapa persentase tenaga kerja yang berasal dari sekitar lokasi sekolah?
_____ %
6. Apakah menggunakan subkontraktor lokal sekitar lokasi sekolah?
 Ya, total nilai Rp _____
 Tidak
7. Adakah kendala logistik atau material lokal yang mempengaruhi proyek?
 Ya, jelaskan: _____

Tidak

D. Pekerja / Buruh

1. Apakah pendapatan Anda meningkat selama proyek berlangsung?
 Ya
 Tidak
2. Jika Ya, berapa persen perkiraan peningkatannya?
_____ %
3. Apakah pekerjaan tersebut bersifat sementara atau berkelanjutan?
 Sementara
 Berkelanjutan
4. Apakah proyek membuka kesempatan kerja juga bagi keluarga atau warga sekitar?
 Ya
 Tidak
5. Apakah setelah proyek selesai Anda masih bekerja dengan pendapatan lebih baik?
 Ya
 Tidak
6. Apakah ada kesempatan kerja lanjutan setelah proyek selesai?
 Ya
 Tidak
7. Apakah proyek membantu meningkatkan keterampilan kerja Anda?
 Ya, jelaskan: _____
 Tidak

E. Suplier Bahan Bangunan

1. Apakah omzet usaha Anda meningkat selama proyek revitalisasi sekolah?
 Ya
 Tidak
2. Jika Ya, berapa persen perkiraan peningkatannya dibanding sebelum proyek?
_____ %
3. Apakah proyek revitalisasi membuka peluang kerja sama baru dengan kontraktor/pemerintah daerah?
 Ya
 Tidak
4. Seberapa besar proyek revitalisasi meningkatkan total penjualan Anda pada tahun berjalannya proyek?
_____ %

5. Apakah proyek revitalisasi mendorong perekutan tenaga kerja tambahan?
 Ya
 Tidak
6. Apakah proyek meningkatkan permintaan bahan bangunan di wilayah Anda?
 Ya
 Tidak
7. Apakah Anda menambah modal / melakukan investasi tambahan selama proyek berlangsung?
 Ya
 Tidak
8. Apakah proyek meningkatkan kerja sama antar usaha lokal (material, transportasi, jasa)?
 Ya
 Tidak
9. Apakah proyek membantu meningkatkan stabilitas usaha Anda jangka panjang?
 Ya
 Tidak

KUESIONER

GURU NON ASN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

A. IDENTITAS

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Jenis Kelamin | : <input type="checkbox"/> Laki-laki/ <input type="checkbox"/> Perempuan |
| 2. NUPTK | : <input type="checkbox"/> |
| 3. Pendidikan | : <input type="checkbox"/> SMA/Sederajat / <input type="checkbox"/> S1/ <input type="checkbox"/> S2/ <input type="checkbox"/> S3 |
| 4. Pendidikan Profesi/PPG | : <input type="checkbox"/> Ya/ <input type="checkbox"/> Tidak |
| 5. Status Perkawinan | : <input type="checkbox"/> Kawin/ <input type="checkbox"/> Tidak/belum kawin/ <input type="checkbox"/> Cerai |

B. KEPEGAWAIAN

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah Tempat Bekerja | : |
| 2. Alamat Lengkap Sekolah | : Jl.....
Desa/Kel.....
Kec.....
Kab/Kota.....
Provinsi..... |
| 3. Nomor Telp/Mobile phone | : |
| 4. Status kepegawaian | :
a. Honor Pemda
b. Honor Sekolah
:tahun |
| 5. Lama Bertugas | : <input type="checkbox"/> Guru Kelas <input type="checkbox"/> Guru Mata Pelajaran |
| 6. Jenis Tugas | : <input type="checkbox"/> Wali kelas
<input type="checkbox"/> Pembina Esktra sekolah |
| 7. Penugasan lainnya | : <input type="checkbox"/> Petugas Piket
<input type="checkbox"/> Lainnya: |

C. KELUARGA

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Jumlah anggota keluarga | : |
| 2. Suami/Istri bekerja | : <input type="checkbox"/> Ya/ <input type="checkbox"/> Tidak |
| 3. Jumlah anak yang masih bersekolah | : |

D. JENIS BANTUAN

Jenis bantuan tambahan penghasilan yang Bapak/Ibu peroleh:

- Tambahan Penghasilan Guru (TPG)
- Tunjangan Khusus Guru (TKG)
- Insentif Guru Non-ASN
- Insentif Non formal
- Bantuan Subsidi Upah (BSU)
- Tidak Tahu

E. KEADAAN EKONOMI KELUARGA

- | | |
|--|--------------|
| 1. Jumlah honor Bapak/Ibu per bulan | :
Rp..... |
| 2. Jumlah penghasilan pasangan (suami/istri) | :
Rp..... |

3. Sumber penghasilan lainnya :
Rp.....
4. Jumlah pengeluaran total per bulan :
Rp.....
 - a. Biaya pengeluaran konsumsi/bulan :
Rp.....
 - b. Biaya pengeluaran pendidikan/bulan :
Rp.....
 - c. Biaya rekreasi per bulan :
Rp.....
 - d. Biaya lainnya per bulan :
Rp.....
5. Tabungan/Investasi per bulan :
Rp.....
6. Jumlah pembayaran pinjaman per bulan :
Rp.....

F. PENGETAHUAN TENTANG PROGRAM TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA

7. Apakah Bapak/Ibu memperoleh informasi tentang program tambahan penghasilan yang diberikan kepada guru honorer atau non-ASN/P3K?
 Ya/ Tidak
8. Jika **jawaban Ya**, sumber informasi? (Jawaban dapat lebih dari satu)
 Surat Edaran Kemdikdasmen RI
 Berita media massa
 Media sosial (medsoc)
 Grup whatsapp sekolah
 Pengumuman sekolah (Kepala sekolah/Kepala Tata Usaha)
 Rekan sejawat
 Operator sekolah
 Lainnya:
9. Menurut pengetahuan/pemahaman Bapak/Ibu, apa tujuan utama program dari pemberian tambahan penghasilan kepada guru honorer non-ASN/P3K?
 Menambah penghasilan guru
 Meningkatkan kesejahteraan guru
 Meningkatkan daya beli guru
 Meningkatkan daya investasi guru
 Lainnya:

G. PENGAJUAN PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

10. Apakah Bapak/Ibu mengajukan diri untuk memperoleh bantuan tambahan penghasilan guru honorer non-ASN/P3K?
 Ya/ Tidak
11. Jika **jawaban Ya**, apakah Bapak/Ibu mengisi formulir pengajuan bantuan tambahan penghasilan guru honorer non-ASN/P3K?
 Ya/ Tidak

12. Jika **jawaban Tidak**, pengajuan nama guru penerima bantuan tambahan penghasilan guru honorer non-ASN/P3K dilakukan oleh siapa?

- Kepala sekolah
- Kepala tata usaha
- Operator yang ditugaskan oleh kepala sekolah
- Operator yang ditugaskan oleh kepala tata usaha
- Lainnya:

13. Sepengetahuan Bapak/Ibu pengajuan nama guru penerima bantuan tambahan penghasilan guru honorer non-ASN/P3K dilakukan menggunakan moda atau media apa?

- Surat yang diajukan kepala sekolah ditujukan kepada kepala dinas provinsi/kab/kota
- Surat pengajuan kepala sekolah melalui sistem (dapodik) atau sistem layanan lainnya
- Lainnya:

H. PENYALURAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN

14. Sampai saat ini berapa kali Bapak/Ibu menerima tambahan penghasilan?

- 1 kali/ 2 kali/ 3 kali// 4 kali

15. Berapa jumlah (besaran) tambahan penghasilan yang Bapak/Ibu terima dalam satu tahun terakhir?

- Penerimaan pertama : Rp.....
Penerimaan kedua : Rp.....
Penerimaan ketiga : Rp.....
Penerimaan keempat : Rp.....

16. Berapa periode penerimaan subsidi Bapak/Ibu?

- Setiap bulan sekali
- Setiap triwulan sekali
- Setiap semester sekali
- Setiap tahun sekali

17. Bagaimana cara Bapak/Ibu menerima uang bantuan tambahan penghasilan?

- Menerima uang bantuan tambahan penghasilan secara tunai di sekolah
- Menerima uang bantuan tambahan penghasilan secara tunai di kantor pos
- Menerima uang bantuan tambahan penghasilan melalui transfer bank
- Lainnya:

18. Apakah Bapak/Ibu memperoleh informasi resmi tentang waktu penyaluran bantuan tambahan penghasilan guru?

- Ya/ Tidak

19. Jika **jawaban Tidak**, bagaimana Bapak/Ibu mengetahui ada penyaluran pembayaran dana bantuan tambahan penghasilan guru?

- Notifikasi bank
- Informasi teman sejawat
- Berita media massa
- Web resmi Kemendikbudristek RI

I. PEMANFAATAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN

20. Berapa persen perkiraan peningkatan pendapatan rumah tangga setelah menerima tambahan penghasilan guru dibandingkan sebelum menerima subsidi?.....
21. Apakah tambahan penghasilan guru membantu Anda memenuhi kebutuhan dasar (makanan, transportasi, pendidikan anak)?
 Ya/ Tidak
22. Dana bantuan tambahan penghasilan yang pertama kali Bapak/Ibu terima dimanfaatkan untuk apa saja?
 Pembelian kebutuhan pokok
 Uang jajan anak
 Pembelian pakaian
 Pembelian bensin kendaraan
 Pembayaran iuran kesehatan BPJS
 Pembelian pulsa/paket internet
 Pembelian buku/sumber belajar
 Membayar hutang
 Menabung
 Lainnya:
23. Dana bantuan tambahan penghasilan yang terakhir kali Bapak/Ibu terima dimanfaatkan untuk apa saja?
 Pembelian kebutuhan pokok
 Uang jajan anak
 Pembelian pakaian
 Pembelian bensin kendaraan
 Pembayaran iuran kesehatan BPJS
 Pembelian pulsa/paket internet
 Pembelian buku/sumber belajar
 Membayar hutang
 Menabung
 Lainnya:
24. Berapa jumlah besaran pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan yang **Bapak/Ibu terima** selama ini untuk masing-masing komponen pengeluaran?
- Biaya konsumsi = Rp.....atau% dari dana yang diterima
Biaya transportasi = Rp.....atau% dari dana yang diterima
Biaya investasi/tabungan = Rp.....atau% dari dana yang diterima
Pinjaman/cicilan/hutang = Rp.....atau% dari dana yang diterima
Lainnya: = Rp.....atau% dari dana yang diterima

J. KENDALA UNTUK MEMPEROLEH DANA SUBSIDI TAMBAHAN PENGHASILAN

25. Apakah ada kendala yang Bapak/Ibu hadapi untuk memperoleh dana bantuan tambahan penghasilan?
 Ya, ada/ Tidak ada

26. Jika **jawaban Ya ada**, apa kendala yang Bapak/Ibu hadapi?

- Dokumen persyaratan
- Waktu pemberkasan
- Prosedur pemberian bantuan
- Kebijakan sekolah
- Sistem aplikasi
- Jaringan internet
- Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Lainnya:

27. Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala tersebut?

- Memenuhi dokumen yang dibutuhkan secara lengkap
- Meminta bantuan operator sekolah
- Bertanya kepada operator sekolah
- Lainnya:

K. KONSUMSI DAN STABILITAS EKONOMI

28. Setelah menerima tambahan penghasilan guru, apakah terjadi peningkatan pengeluaran/belanja rumah tangga per bulannya?

- Ya/ Tidak ada

29. Apakah Anda menjadi lebih sering berbelanja di toko/warung lokal setelah menerima tambahan penghasilan guru?

- Ya/ Tidak

30. Apakah tambahan penghasilan guru membuat anda mampu membeli barang/jasa yang sebelumnya sulit dijangkau?

- Ya/ Tidak

31. Apakah ada perubahan dalam pola menabung atau investasi kecil setelah menerima tambahan penghasilan guru?

- Ya/ Tidak ada

32. Apakah tambahan penghasilan guru membantu anda menghadapi kebutuhan mendesak (biaya kesehatan, pendidikan anak)?

- Ya/ Tidak

33. Seberapa besar peran tambahan penghasilan guru dalam membantu biaya transportasi, alat kerja, atau bahan ajar?

- Sangat membantu untuk semua kebutuhan tersebut
- Membantu sebagian biaya saja
- Hanya sedikit membantu
- Tidak membantu sama sekali
- Tidak relevan (tidak memiliki kebutuhan tersebut)

34. Apakah anda merasa kondisi ekonomi keluarga lebih stabil sejak menerima tambahan penghasilan guru?

- Ya/ Tidak

35. Jika tambahan penghasilan guru dihentikan, bagaimana dampaknya terhadap kondisi keuangan rumah tangga anda?
- Sangat berdampak, pendapatan rumah tangga akan berkurang secara signifikan
 - Cukup berdampak, ada penurunan pendapatan tetapi masih bisa menyesuaikan
 - Tidak terlalu berdampak, sedikit pengaruh terhadap kondisi keuangan
 - Tidak berdampak sama sekali, kondisi keuangan tetap stabil
36. Apakah ada perubahan dalam frekuensi peminjaman uang (formal/informal) setelah menerima tambahan penghasilan guru?
- Jauh berkurang, tidak sering meminjam uang
 - Berkurang, frekuensi pinjaman menurun
 - Tidak berubah, tetap sama seperti sebelum menerima tambahan penghasilan guru
 - Meningkat, lebih sering meminjam dibanding sebelumnya
 - Tidak pernah meminjam baik sebelum maupun sesudah menerima tambahan penghasilan guru

L. PRODUKTIVITAS KERJA

37. Apakah penerimaan tambahan penghasilan guru meningkatkan semangat dan produktivitas kerja Anda di sekolah?
- Ya, sangat meningkatkan semangat dan produktivitas
 - Ya, agak meningkatkan semangat dan produktivitas
 - Tidak ada perubahan yang berarti
 - Justru menurun
38. Apakah dengan adanya tambahan penghasilan guru Anda merasa lebih dihargai oleh pemerintah atau lembaga pendidikan?
- Ya, merasa jauh lebih dihargai
 - Ya, sedikit lebih dihargai
 - Tidak ada perubahan dalam perasaan dihargai
 - Tidak merasa dihargai sama sekali
39. Apakah tambahan penghasilan guru berpengaruh pada kehadiran dan kinerja Anda di tempat kerja?
- Ya, kehadiran dan kinerja meningkat
 - Ya, hanya kehadiran yang meningkat
 - Ya, hanya kinerja yang meningkat
 - Tidak ada pengaruh
40. Apakah tambahan penghasilan guru digunakan untuk membeli keperluan pengajaran?
- Ya, sebagian besar digunakan untuk membeli keperluan pengajaran (misalnya alat tulis, bahan ajar, atau media pembelajaran)
 - Ya, sebagian kecil digunakan untuk keperluan pengajaran, sisanya untuk kebutuhan rumah tangga
 - Tidak, seluruhnya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau pribadi

M. TANGGAPAN TENTANG PROGRAM

Berikan tanggapan Bapak/Ibu terhadap pernyataan-pernyataan di bawah ini.

41. Ketersediaan regulasi tentang program tambahan penghasilan guru non- ASN:

- Sangat dibutuhkan
- Dibutuhkan
- Kurang dibutuhkan
- Tidak dibutuhkan

42. Juknis tentang penyaluran program tambahan penghasilan guru non-ASN dibutuhkan oleh guru di sekolah:

- Sangat dibutuhkan
- Dibutuhkan
- Kurang dibutuhkan
- Tidak dibutuhkan

43. Prasyarat tentang pemerolehan dana bantuan tambahan penghasilan guru non- ASN:

- Sangat mudah
- Mudah
- Sulit
- Sangat sulit

44. Prosedur tentang pemerolehan dana bantuan tambahan penghasilan guru non-ASN:

- Sangat mudah
- Mudah
- Sulit
- Sangat sulit

45. Waktu penyaluran dana bantuan tambahan penghasilan guru non-ASN:

- Tepat waktu
- Kurang tepat waktu
- Tidak tepat waktu

46. Cara penyaluran dana bantuan tambahan penghasilan guru non-ASN:

- Perlu dipertahankan
- Perlu perbaikan
- Perlu cara lain

47. Manfaat dana bantuan tambahan penghasilan guru non-ASN dalam memenuhi kebutuhan:

- Sangat membantu
- Membantu
- Kurang membantu
- Sangat kurang membantu

48. Pengawasan pemanfaatan dana bantuan tambahan penghasilan guru non-ASN oleh pemerintah/instansi terkait:

- Sangat diperlukan
- Diperlukan
- Kurang diperlukan
- Tidak diperlukan

PANDUAN WAWANCARA MENDALAM

Responden : Kepala Dinas Pendidikan

Tema : Dampak Ekonomi Kebijakan Tamsil dan Revitalisasi Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada guru non-ASN?
2. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang dampak ekonomi pemberian tambahan penghasilan kepada guru non-ASN bagi guru penerima, Masyarakat sekitar, perekonomian daerah?
3. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang dampak pemberian tambahan penghasilan kepada guru non-ASN terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah?
4. Menurut penilaian Bapak/Ibu pada bagian mana (aspek apa) yang membutuhkan perbaikan dari kebijakan pemberian tambahan penghasilan kepada guru non-ASN sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan di daerah?
5. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu tentang kebijakan revitalisasi sarpras di sejumlah sekolah?
6. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang dampak ekonomi dari kebijakan revitalisasi sarpras dengan system swakelola bagi masyarakat sekitar dan perekonomian daerah?
7. Bagaimana penilaian Bapak/Ibu tentang dampak pemberian dana revitalisasi sarpras dengan system swakelola terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah?
8. Menurut penilaian Bapak/Ibu pada bagian mana (aspek apa) yang membutuhkan perbaikan dari kebijakan pemberian pemberian dana revitalisasi sarpras dengan system swakelola sehingga berdampak secara ekonomi kepada Masyarakat sekitar dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah?

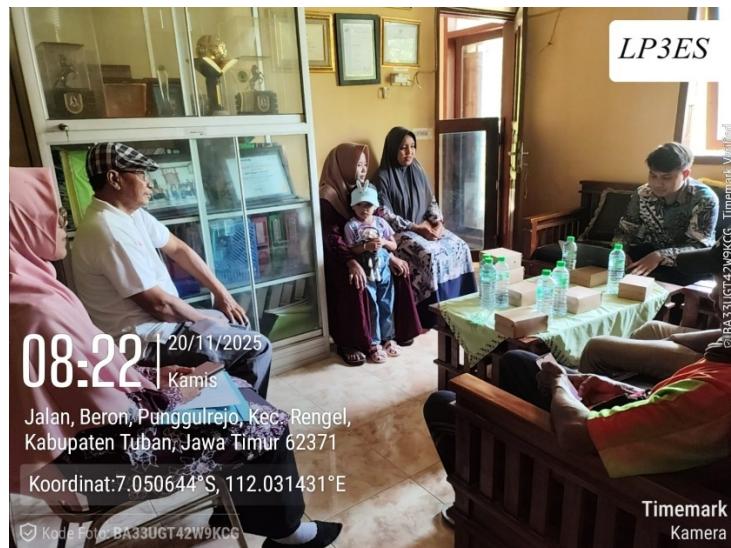
DOKUMENTASI WAWANCARA



Dokumentasi Wawancara dengan responden Pihak Luar sekolah Kab. Merauke Papua Selatan



Dokumentasi Wawancara dengan responden Pihak Luar sekolah Kab. Bangka Bangka Belitung



Dokumentasi Wawancara dengan responden Pihak Luar sekolah Kab. Tuban Jawa Timur



Kemendiknas-LP3ES
Survei Dampak Ekonomi
21.11.2025 14:44
-4.90383, 119.58768
Ketinggian: 58m
3HWQ+C4X, Jl. tangaparang, Bontonlempangan,
Kec. Bontoa 90554

Dokumentasi Wawancara Responden Guru penerima bantuan penghasilan Tambahan
Kecamatan Bontoa Kab. Maros Sulawesi Selatan



Dokumentasi Wawancara Responden Guru penerima bantuan penghasilan Tambahan
Sleman Yogyakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2025

Disusun oleh:

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)